

**Volume 8 Nomor 1
Januari-Juni 2018**

ISSN: 2088-0308

JURNAL

Pendidikan IPS



Diterbitkan Oleh:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN TAMAN SISWA BIMA**

JPI

JURNAL PENDIDIKAN IPS

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung dan Penasehat

Muslim, S.Sos.

Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si.

Ketua Yayasan STKIP Taman Siswa Bima

Ketua STKIP Taman Siswa Bima

Penganggung Jawab

Muliana, M.Pd.

Ketua LPPM STKIP Taman Siswa Bima

Ketua Penyunting

Asriyadin, M.Pd.Si.

Penyunting Pelaksana

Zuriatin, S.S., M.Pd.

Tati Haryati, M.Pd.

Syahbudin, M.Pd.

A. Gafar Hidayat, S.Pd.

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A

Prof. Dr. Juraid

Desain Cover

Asriyadin, M.Pd.Si.

Alamat Redaksi

Redaksi Jurnal Pendidikan MIPA

LPPM STKIP Taman Siswa Bima

Jln. Lintas Bima - Tente Palibelo. Tlp (0374) 42891

Email: lppmtamansiswabima@gmail.com

Jurnal Pendidikan IPS STKIP Taman Siswa Bima, terbit 2 kali setahun dengan edisi Januari-Juni dan Juli-Desember. Sebagai media informasi, pemikiran dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan sosial dan ilmu sosial.

JURNAL PENDIDIKAN IPS
Volume 8 No. 1, Januari-Juni 2018
ISSN : 2088-0308

DAFTAR ISI

Peningkatan Hasil Belajar Mengapresiasi Karya Seni Rupa Melalui Penggunaan Media Pembelajaran Appreciation Card Pada Mahasiswa Semester VIA, Mata Kuliah Pendidikan Keterampilan Seni Rupa Program PGSD di STKIP Taman Siswa Bima Tahun 2017 Sulfahri	1-10
Involusi Pertanian Di Jawa 1830-1900 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Syahbuddin	11-20
Peran Lembaga Adat Donggo (Lasdo) dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Untuk Ius Constituendum Suherman, Ady Irawan	21-31
Kajian Geo Homestay Kawasan Geopark Tambora Zulharman, Ibnu Khaldun, Asriyadin	32-45
Penerapan Metode Problem Solving dalam Meningkatkan Hasil Belajar PPKn Andriana, Nunung Nugrahawati, Huriah Rachmah	46-52
Tradisi Nika Leka Pasa Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tati Haryati, A. Gafar Hidayat	53-63
Identifikasi Pola Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Kelas X IPS SMAN 2 Wera Roni Irawan, Zuriatin	64-69
Proses Penambangan Pasir Pantai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Syafruddin, Ihsan	70-75
Problem Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Ahmadin	76-84
Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Surat Lukman Ayat 13-19 Subhan	85-93

Peningkatan Hasil Belajar Mengapresiasi Karya Seni Rupa Melalui Penggunaan Media Pembelajaran *Appreciation Card* Pada Mahasiswa Semester VIA, Mata Kuliah Pendidikan Keterampilan Seni Rupa Program PGSD di Stkip Taman Siswa Bima Tahun 2017

Sulfahri

STKIP Taman Siswa Bima
sulfahriadiwanhar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar Pada Mahasiswa Semester VI, Mata Kuliah Pendidikan Keterampilan Seni Rupa serta performansi Dosen dan calon guru pada materi mengapresiasi karya seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran appreciation card untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar pada peserta didik. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek yang diteliti yaitu mahasiswa Kelas IV A berjumlah 23 orang Program pendidikan guru sekolah dasar stkip taman siswa bima. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes dan non tes (observasi dan dokumentasi). Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini yaitu rata-rata kelas minimal 75, persentase tuntas belajar klasikal minimal 75%, keberanian mahasiswa dalam mengajukan/menjawab pertanyaan Dosen $\geq 50\%$, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran $\geq 75\%$ dan skor performansi Dosen minimal 70. Hasil penelitian diperoleh persentase aktivitas belajar mahasiswa pada siklus I sebesar 75.70% dan meningkat menjadi 90.20% pada siklus II. Jadi persentase aktivitas belajar mengalami peningkatan sebesar 19.16%. Hasil belajar mahasiswa pada siklus I diperoleh rata-rata kelas sebesar 59.58 dan meningkat menjadi 80.80 pada siklus II. Jadi rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar 35.62%. Sedangkan persentase tuntas belajar klasikal pada siklus I sebesar 56.52% dan meningkat menjadi 86.96% pada siklus II. Jadi persentase tuntas belajar klasikal mengalami peningkatan sebesar 53.86%. Performansi Dosen pada siklus I sebesar 83.85 dan meningkat menjadi 97.35. Jadi performansi Dosen mengalami peningkatan sebesar 16.10%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran appreciation card dapat meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, hasil belajar mahasiswa, dan performansi guru pada materi mengapresiasi karya seni rupa pada Kelas IVA STKIP Taman Siswa Bima. Oleh karena itu, sebaiknya Dosen menggunakan media pembelajaran appreciation card dalam pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa.

Kata Kunci: meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab I Pasal 1 Nomor 2 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Pendidikan seni sekarang ini lebih berpusat pada proses, terutama untuk pendidikan dasar. Inilah tuntutan perubahan zaman bahwa pembelajaran supaya menekankan pada proses dari pada hasil, “...more importance on process than on the end product in early childhood education” (Stone dan Chakraborty). Muatan seni budaya dan keterampilan tidak hanya terdapat dalam satu

mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatannya terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman estetis dalam bentuk kegiatan berekspressi/berkreasi dan berapresiasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat (1) butir d disebutkan bahwa kelompok mata pelajaran estetika atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan menyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Mata Kuliah pendidikan keterampilan seni rupa masih dipahami sebagai mata pelajaran yang membuat suatu karya seni atau dalam istilah seni disebut kreasi. Mahasiswa merespon kedatangan Dosen yang akan mengajar mata pelajaran SBK (pendidikan keterampilan seni rupa) dengan persiapan segala perlengkapan seninya untuk membuat gambar.

Itulah yang dialami peneliti ketika akan mengajarkan pelajaran pendidikan keterampilan seni rupa. Padahal pelajaran SBK juga mengajarkan kepada siswa mengenai bagaimana memberi penghargaan terhadap suatu karya seni atau dalam istilah seni disebut apresiasi. Kegiatan apresiasi merupakan kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan manusia, seperti menikmati dan merasakan nilai-nilai yang ada pada karya orang lain yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Apresiasi berperan sebagai

bentuk penghargaan pengamat terhadap keunikan karya dari seniman yang bisa berupa rasa senang atau tidak senang, dapat juga beranggapan baik ataupun tidak baik. Apresiasi diperlukan agar manusia mampu memahami suatu karya seni dengan baik. Kegiatan apresiasi merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan seni rupa, karena dengan apresiasi, siswa akan melihat keindahan suatu karya seni. Hal ini merupakan kegiatan mental yang kreatif. Apresiasi dikatakan sebagai suatu sikap dalam hal mencermati dan memahami seni. Sikap bukanlah sesuatu yang dapat tumbuh secara tiba-tiba, tetapi sikap hanya dapat tumbuh melalui kegiatan yang berulang-ulang. Apresiasi sebagai bagian dalam pendidikan seni rupa merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa, yang berguna untuk mengembangkan kemampuan atau pengetahuannya terhadap karya seni, sebagaimana diungkapkan oleh Read (dalam Soebandi, 2008: 116) yang menyatakan bahwa seni sebagai bagian dari wilayah pembelajaran perlu dikembangkan melalui pembelajaran apresiasi. Bagi mahasiswa, biasanya kegiatan apresiasi ini berfungsi untuk menumbuhkan atau memupuk rasa cinta terhadap budaya bangsa dan membuka cakrawala mahasiswa. Dengan memperkenalkan hasil karya seni tersebut, mahasiswa akan mulai mengenali budaya bangsa tersebut dari jenis, bahan, dan cara membuatnya. Untuk itu, dalam pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa ini guru harus memiliki kemampuan dalam menggunakan bahan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa perlu adanya media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif agar siswa dapat mengapresiasi karya seni rupa dengan lebih mudah. Pemilihan media pembelajaran bukanlah hal yang sulit, jika guru dapat memahami karakteristik siswa dan bahan ajar yang hendak disampaikan. Kemampuan guru dalam memilih, mengeksplorasi, dan menggunakan media pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran perlu dimiliki dan dikembangkan. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu siswa dalam

memahami bahan ajar dan memfasilitasi siswa melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar dan hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu memberikan media sehingga media merupakan strategi yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi siswa dan akan lebih mudah dalam mengapresiasi karya seni rupa. Terdapat suatu media yang pernah digunakan dalam pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa. Media bernama appreciation card diciptakan oleh Eko Sugiarto, seorang mahasiswa Pendidikan Seni Rupa di Stkip Taman Siswa Bima. Melalui penggunaan media tersebut, hasil belajar mengapresiasi karya seni rupa dapat ditingkatkan. Hasil pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di kelas Mahasiswa Semester VIA, Mata Kuliah Pendidikan Keterampilan Seni Rupa Program PGSD Di Stkip Taman Siswa Bima khususnya materi apresiasi seni rupa kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil belajar Mahasiswa yang belum memuaskan, masih terdapat beberapa nilai Mahasiswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai KKM mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) di SD Kraton 2 Kota Tegal yaitu 71. Dari sejumlah 16 orang Mahasiswa terdapat 6 (enam) orang Mahasiswa yang memperoleh nilai dibawah 71. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penyebab baik faktor internal yang datang dari dalam Mahasiswa sendiri seperti kurangnya motivasi dalam diri Mahasiswa dalam mengikuti pelajaran maupun eksternal yang datang dari guru misalnya penggunaan media yang kurang menarik. 5 Penelitian tindakan kelas ini dipilih karena pembelajaran seni rupa selama ini tidak memanfaatkan media yang inovatif, kreatif dan interaktif. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pikiran untuk menunjang keberhasilan pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa di Mahasiswa kelas Semester VIA, Mata Kuliah Pendidikan Keterampilan Seni Rupa Program PGSD. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, peneliti akan menggunakan media pembelajaran appreciation card untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa pada kelas Mahasiswa Semester VIA, Mata Kuliah Pendidikan Keterampilan Seni Rupa Program PGSD Di Stkip Taman Siswa Bima: (1) Meningkatkan aktivitas belajar mengapresiasi karya seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran appreciation card pada mahasiswa Kelas VIA Program PGSD Stkip Taman Siswa Bima. (2) Meningkatkan hasil belajar mengapresiasi karya seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran appreciation card pada mahasiswa Kelas VIA Program PGSD Stkip Taman Siswa Bima. (3) Meningkatkan performansi guru dalam pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran appreciation card pada Mahasiswa VIA Program PGSD Stkip Taman Siswa Bima.

Prestasi dan aktivitas belajar

Aktivitas Belajar Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas artinya kegiatan, keaktifan, kesibukan. Belajar menurut Dimiyati dan Mudjiono (1999: 7) merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Menurut Sardiman dalam Saminanto (2010: 97) aktivitas belajar adalah keaktifan yang bersifat fisik maupun mental. Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya pada siswa, 11 sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan berdampak terciptanya situasi belajar aktif. Karena aktivitas tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam mencari pengalaman dan mengalami sendiri, sehingga pembelajaran lebih berhasil dan menarik. Menurut Dimiyati dan Mudjiono (1999: 51), implikasi keaktifan bagi siswa berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, membuat karya tulis, membuat klipng dan perilaku sejenis lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan kegiatan fisik maupun mental yang mendukung siswa belajar sehingga tercipta situasi belajar yang aktif.

2.1.3 Hasil Belajar Keberhasilan dari proses pembelajaran dapat diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa. Menurut Catharina Tri Anni, dkk.

(2007: 5), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Suprijono dalam Thobroni dan Mustofa (2011: 22) merumuskan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hasil belajar siswa akan terlihat adanya perubahan perilaku setelah melakukan aktivitas belajar berupa nilai, pengertian, sikap, apresiasi, keterampilan dan perbuatan. Dari hasil belajar siswa itulah dapat diketahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Bloom dalam Anni, dkk. (2007: 7) merumuskan hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku yang mengusulkan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah 12 kognitif yang mencakup ranah pengetahuan, ranah afektif mencakup ranah sikap dan ranah psikomotor mencakup ranah keterampilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar yang mencakup tiga ranah belajar yakni kognitif, afektif dan psikomotor.

Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan Kurikulum pendidikan di Indonesia memasukkan pendidikan seni dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Kemudian pendidikan seni dibagi menjadi beberapa bidang seni. 2.1.5.1 Pendidikan Seni Istilah umum pendidikan seni terdiri dari mata pelajaran tari, drama, musik, media, dan seni rupa, sebagaimana pernyataan "given that the umbrella term 'art education' now collect the school subject dance, drama, music, media, and visual art 'visuasi' might serve to distinguish what visual arts uniquely provides among the range of subjects that have, in effect, been put into competition in our schools" (Lee, 2009: 218). 14 Pendidikan seni di sekolah dasar tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 dengan sebutan Seni Budaya dan Keterampilan (SBK). Bambang Soehendro (2006: 186) menyatakan bahwa mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan bertujuan agar

peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan, menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan, menampilkan peran serta dalam seni budaya dan keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global. Mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan meliputi aspek seni rupa, seni musik, seni tari, seni drama, dan keterampilan. Seni rupa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya. Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya musik. Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. Seni drama, mencakup keterampilan pementasan dengan memadukan seni musik, seni tari dan peran. Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills) yang meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan vokasional dan keterampilan akademik. 2.1.5.2 Seni Rupa Kamaril (2007: 1.5) menyatakan bahwa seni adalah estetika, estetika adalah keindahan. Menurut Hiusman dalam Sahman (1993: 11) menjelaskan seni 15 itu dapat dikonsepsi antara lain sebagai kegiatan meniru alam, kegiatan bermain-main dengan bentuk seni. Seni lahir sebagai sarana pemenuhan keinginan-keinginan bawah sadar. Sedangkan Pamadhi (2010: 1.4) menyatakan pula bahwa seni adalah ekspresi jiwa manusia yang tertuang dalam berbagai bentuk karya seni. Karya seni merupakan perwujudan terselubung dari keinginan bawah sadar itu. Kamaril (2007: 2.5) menjelaskan bahwa seni rupa adalah bentuk ungkapan yang dinyatakan melalui media rupa. Dapat dikatakan bahwa seni rupa adalah bentuk ungkapan yang dicurahkan melalui media rupa (visual) menjadi karya dwimatra dan trimatra. Kamaril (20017: 2.10) menjabarkan jenis karya seni rupa antara lain, gambar/lukisan, seni grafis, seni patung, keramik, dan seni rupa terapan. Gambar/lukisan merupakan jenis karya seni rupa dwimatra.

Menggambar merupakan proses perekaman objek ke dalam bidang dua dimensi. Sedangkan seni lukis cenderung mengekspresikan konseptual seniman melalui media unguap dan teknik berdasarkan prinsip-prinsip seni rupa. Seni grafis adalah salah satu bagian seni rupa dwimatra yang berusaha menghasilkan karya seni rupa yang bersifat dapat diperbanyak. Seni patung adalah bagian seni rupa yang merupakan pernyataan pengalaman artistik manusia melalui bentuk-bentuk trimatra. Keramik sering diidentikkan dengan seni terapan, karena pada umumnya karya-karya keramik tampil dengan bentuk guci dan perlengkapan rumah tangga. Seni rupa terapan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni seni kriya dan desain. Seni kriya biasanya dibuat dengan dibuat dengan tujuan untuk melestarikan tradisi berkesenirupa suatu daerah atau suatu bangsa. Sedangkan desain diciptakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk seni.

2.1.6 Konsep Dasar Apresiasi Seni

Apresiasi termasuk dalam materi pendidikan seni diantara dua materi seni lainnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Soebandi (2008: 44) bahwa ada 3 (tiga) cakupan substansi materi yang dipelajari dari pendidikan seni, yaitu konsepsi, kreasi dan apresiasi. Pembelajaran konsepsi dilakukan untuk membekali siswa mengetahui materi ilmu seni, kegiatan berolah seni dilakukan untuk memberikan pengalaman dan kemahiran mencipta seni, dan berapresiasi seni dilakukan untuk memberi pengalaman dalam proses menghargai karya seni.

2.1.6.1 Pengertian Apresiasi

Apresiasi merupakan kegiatan mental individu dalam proses penilaian. Pandangan lain mengenai istilah ini ditunjukkan kepada khalayak sebagai pertukaran pikiran yang berhubungan dengan mengagumi sesuatu nilai. Menurut Soebandi (2008: 104) apresiasi seni berarti pengertian yang sebenarnya mengenai seluk-beluk sesuatu hasil seni serta menjadi sensitif terhadap segi-segi estetika. Masih dalam pengertian yang sama, kemudian Bastomi (2003: 29) menambahkan dengan apresiasi kita mampu menikmati dan menilai karya seni dengan semestinya. Jika ditinjau dari asal katanya, apresiasi berasal dari kata appreciation. Dalam

bentuk kata kerjanya yaitu *to appreciate* yang berarti menentukan nilai, mengerti atau menikmati sepenuhnya dengan jalan benar. Selanjutnya Bastomi (2003: 28) mendefinisikan apresiasi adalah suatu aktivitas dalam rangka menikmati, merasakan nilai-nilai yang ada pada suatu karya seni dengan terlebih dahulu oleh minat estetik. Hal ini diperkuat oleh Paper (dalam Bastomi, 2003: 28) yang mengemukakan bahwa apresiasi pada dasarnya menyenangkan sesuatu barang agar memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Pernyataan lain juga dikemukakan oleh Bahari (2008: 148) yang mengemukakan bahwa apresiasi merupakan proses sadar yang dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi dan memahami karya seni. dalam memahami karya seni sebaiknya terlebih dahulu mengenal struktur bentuk karya seni, pengorganisasian elemen seni rupa atau dasar-dasar penyusunan dari karya seni yang sedang diapresiasi. Kemudian dalam mengapresiasi proses yang terjadi yaitu proses menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam karya seni. Sudarso (dalam Bastomi, 2003: 28) menuliskan bahwa apresiasi berarti mengerti serta menyadari sepenuhnya sehingga mampu menilai semestinya, sedangkan dalam hubungannya dengan seni menjadi: mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk beluk sesuatu hasil seni serta menjadi sensitif terhadap segi-segi estetikanya, sehingga mampu menikmati dan menilai karya seni rupa dengan semestinya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa apresiasi merupakan proses pengenalan nilai-nilai seni untuk menghargai dan menafsirkan makna (arti) yang terkandung di dalam karya seni rupa melalui kegiatan pengamatan yang menimbulkan respon terhadap stimulus yang berasal dari karya seni, sehingga 18 menimbulkan rasa keterpesonaan yang diikuti dengan penikmatan serta pemahaman bagi pengamatnya.

2.1.6.2 Dimensi Apresiasi

Menurut Osborn (dalam Sobandi, 2008: 108) membagi apresiasi menjadi dua dimensi yaitu, apresiasi sebagai suatu sikap (*attitudes*) dan apresiasi sebagai suatu aksi (*actions*). Apresiasi sebagai suatu sikap sering didefinisikan sebagai suatu kebiasaan (*habits*) dan keahlian (*skills*),

tetapi apresiasi seharusnya mengandung suatu sikap atau perasaan tentang seni yang membawa individu kepada suatu pengalaman tentang seni. Apresiasi dapat mengembangkan kebiasaan mental berupa perhatian (attentions) dan ketertarikan (interest) secara bersama-sama membawanya dengan keahlian yang dituntut dalam keahlian dan kemampuan yang tumbuh dari pengulangan dan perhatian dari pengalaman. Jadi dapat dikatakan bahwa apresiasi sebagai suatu sikap dapat tumbuh dari pengulangan dan perhatian dari pengalaman yang dapat diperdalam melalui studi secara formal. Apresiasi sebagai suatu aksi dapat dilatih melalui kegiatan apresiasi. Kegiatan ini meliputi bagaimana seorang apresiator melakukan pengamatan dengan memusatkan perhatian, mengenal perbedaan meningkatkan pemahaman kontekstual dan penilaian. Apresiator harus terlibat aktif dalam kegiatan apresiasi seni dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan apresiasi seni dikembangkan atas dasar pengetahuan yang dimiliki apresiator dalam melakukan kegiatan apresiasi. Apresiasi seni berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan interaksi antara apresiator dengan 19 karya seni. Agar proses hubungan tersebut berjalan dengan lancar, aktif dan komunikatif, maka sejumlah wawasan yang berkaitan dengan pemahaman tentang seni harus dikuasai dengan baik. Seorang siswa yang menjadi apresiator karya seni dapat dikatakan bahwa apresiasi yang dilakukan siswa tersebut termasuk apresiasi sebagai suatu aksi. Apresiasi yang dilakukan oleh siswa terhadap karya seni terdiri dari beberapa kegiatan apresiasi yang saling berkaitan sehingga kegiatan-kegiatan apresiasi tersebut mengantarkan siswa dalam mengapresiasi karya seni.

2.1.6.3 Proses Apresiasi Garha (1980: 58)

menjelaskan bahwa kegiatan apresiatif ialah kegiatan penghayatan seni yang didalamnya termasuk aktivitas mental yang berupa penikmatan, pengaguman serta penilaian. Menurut Syafii (dalam Sugiarto, 2011: 2) proses apresiasi seni rupa dapat diawali dengan kegiatan melihat, mengamati, menghayati, dan selanjutnya memasuki proses menilai dan menghargai. Melihat adalah kegiatan yang paling awal dilakukan oleh

pengamat. Selanjutnya, melalui penginderaan tersebut pengamat mulai memasuki proses psikologis lebih dalam yang disebut dengan penghayatan. Dalam proses inilah apresiator mulai memahami karya seni, yang dilanjutkan dengan proses penilaian dan penghargaan. Penilaian dan penghargaan merupakan pengambilan keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bernilai atau berharga. Dalam proses inilah apresiator mulai menentukan keputusan apakah suka/tidak suka, indah/tidak indah, cocok/tidak cocok dengan suasana hatinya.

2.1.6.4 Apresiasi Seni dalam Konteks Pendidikan Menurut Kartono (dalam Soebandi, 2008: 111)

apresiasi adalah suatu proses yang melahirkan sikap dalam mencermati seni. Sikap adalah sesuatu yang tidak tumbuh dengan begitu saja. Sikap terbentuk setelah berulang-ulang. Sikap (attitude) adalah kecenderungan untuk memberi respon, baik positif maupun negatif, terhadap orang-orang, benda-benda, situasi-situasi tertentu. Berdasarkan hal tersebut, agar kemampuan apresiasi tumbuh, maka dapat melalui proses pendidikan seperti pendidikan seni. Upaya ini sangat strategis dalam membina siswa untuk dapat menghayati, menikmati, menghargai, serta menilai karya seni. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa mampu memiliki kecintaan untuk menghargai karya seni dan budaya bangsa dimasa yang akan datang.

METODE

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Suharsimi Arikunto, dkk. (2009: 3) mengartikan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencerminan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Suharsimi Arikunto, dkk. (2009: 16) menjelaskan bahwa dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan yang dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan dan (4) refleksi. Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali ke langkah semula. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I dilaksanakan selama dua pertemuan, siklus II dilaksanakan selama dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran.

Perencanaan Tahap Penelitian Penelitian

Ini direncanakan minimal dalam dua siklus dengan berbagai kemungkinan perubahan yang dianggap penting sehingga terdapat perencanaan tahap penelitian siklus I dan perencanaan tahap penelitian siklus II. 28 Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. (1) Perencanaan Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian. Peneliti melaksanakan prasurvei, menemukan dan menganalisis masalah sehingga peneliti dapat merumuskan dan mengembangkan alternatif tindakan untuk dapat memperbaiki hasil belajar siswa. Peneliti menyusun rancangan strategi dan skenario penerapan pembelajaran yang akan diterapkan. Instrumen penelitian disiapkan sebelum pelaksanaan penelitian. (2) Pelaksanaan Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan perencanaan, mengumpulkan dan merekam data dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan. (3) Pengamatan Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan/observasi berjalan bersamaan pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data

kualitatif dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan. Peneliti juga mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. (4) Refleksi Pada tahap ini peneliti mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Peneliti mengevaluasi hasil belajar 29 dan aktivitas belajar siswa.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan selama satu tahun yang dimulai pada bulan November 2016 sampai dengan September 2017.

Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data digunakan beberapa teknik antara lain:

Tes

Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa pada akhir setiap siklus. Jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis dan bentuk tes yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Tes pilihan ganda berisi soal-soal untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi karya seni rupa. Tes isian singkat berisi soal-soal untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengapresiasi karya seni rupa menggunakan appreciation card.

Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa dan performansi guru.

Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (Mariamah, dkk: 2016) merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa daftar nama Mahasiswa, daftar nilai Mahasiswa dan foto-foto aktivitas Mahasiswa dalam pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa melalui penggunaan media pembelajaran appreciation card di kelas A Semester VI Program pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP TAMAN SISWA BIMA.

Teknik Analisa Data

Data penelitian terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.

Untuk menentukan nilai akhir hasil belajar yang diperoleh masing-masing siswa dari tes. Nilai Akhir = Skor Perolehan x 100 / Skor Maksimal (BSNP, 2007: 25) (2) Untuk menentukan rata-rata kelas $M = \frac{\sum X}{N}$ 36 Keterangan: X = Nilai yang diperoleh individu N = Banyaknya individu M = Nilai Rata-rata kelas (Sudjana, 2010: 125) (3) Untuk menentukan tuntas belajar klasikal p = Jumlah mahasiswa yang tuntas belajar x 100% / Jumlah mahasiswa Keterangan: p = Tuntas belajar klasikal Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa: >80% = Sangat tinggi 60-79% = Tinggi 40-59% = Sedang 20-39% = Rendah

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif Data Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas IVA Program pendidikan guru sekolah dasar, STKIP Taman Siswa Bima, kecamatan palibelo kabupaten bima tahun Pelajaran 2016/7 sebanyak 225 mahasiswa dengan sampel sebanyak 90 mahasiswa. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik setiap variabel, maka digunakan analisis statistik deskriptif. Berikut ini akan disajikan deskripsi data hasil penelitian yang terdiri dari dua variabel, yaitu penguasaan kosakata sebagai variabel bebas, dan kemampuan membaca pemahaman sebagai variabel terikat.

4.1.1.1 Variabel Penguasaan Kosakata Data penguasaan kosakata diperoleh melalui tes penguasaan kosakata yang terdiri dari 25 item soal pilihan ganda dengan skor benar 1 dan skor salah 0. Kemudian jumlah skor yang diperoleh dikalikan 4. Sehingga diperoleh skor total tertinggi 100 dan skor total terendah 0. Skor tertinggi yang diperoleh dari data adalah 92, dan skor terendah yang diperoleh dari data adalah 32. Berdasarkan data tersebut diperoleh juga rata-rata (M) sebesar 65,6, median (Md) sebesar 66, dan modus (Mo) sebesar 64 serta simpangan

baku 14,4. Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus Sturges (Sugiyono, 2012: 34), yaitu jumlah kelas = $1 + 3,3 \log n$, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari perhitungan diketahui bahwa $n = 90$, sehingga 71 diperoleh banyak kelas $1 + 3,3 \log 144 = 7,5$ dibulatkan menjadi 8 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal - nilai minimal kemudian ditambah 1, sehingga diperoleh rentang data sebesar $(92-32) + 1 = 61$, sedangkan panjang kelas (rentang)/K = $(61)/8=7,6$.

Rata-rata hasil belajar mahasiswa pada siklus I diperoleh 59.58 dengan ketuntasan belajar 56.52, dari hasil belajar tersebut dapat dikatakan bahwa nilai hasil belajar mahasiswa masih sangat rendah dan tidak mencapai target indikator keberhasilan yang ditetapkan. Upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut dapat diatasi dengan membuat instrumen penelitian yang lebih efektif. Tes formatif Rata-rata Tuntas belajar Aktivitas siswa Performansi guru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Indikator yang ditentukan Hasil penelitian Tuntas belajar Tidak tuntas belajar 48 siklus I tidak lebih banyak menunjukkan gambar maka guru dapat membuat tes formatif untuk siklus II dengan lebih banyak pilihan jawaban bergambar bukan selalu dengan tulisan saja sehingga siswa lebih antusias dalam mengerjakan tes. Pada silabus terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan pada siklus I yaitu membuat produk karya seni rupa berupa gambar motif batik. Hal ini merupakan tantangan bagi guru untuk mempersiapkan kegiatan kreasi dan apresiasi supaya dapat terlaksana pada siklus II. Guru dapat memodifikasi appreciation card yang bisa digunakan untuk berkreasi sekaligus dapat diapresiasi oleh siswa. Namun perlu diperhatikan kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu pelajaran yang tersedia. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh 75.70% maka aktivitas belajar siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan. Pada siklus I, siswa belum diberikan kesempatan untuk berkreasi membuat karya seni rupa. Kegiatan berkreasi dan mengapresiasi dilaksanakan pada siklus II merupakan kesempatan bagi guru untuk

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Persentase performansi guru pada siklus I diperoleh 83.85 maka performansi guru sudah memenuhi indikator keberhasilan. Guru perlu mencantumkan dampak pengiring pada RPP dan penggunaan media lain selain media appreciation card.

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Siklus II dimulai pada pertemuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012. Karena pada siklus I hasil belajar masih belum mencapai indikator keberhasilan keberhasilan maka pembelajaran mengapresiasi karya seni rupa 49 diulang dengan perubahan kegiatan pembelajaran dan modifikasi Appreciation Card. Materi pada siklus II sama dengan materi pada siklus I. Pada pertemuan ketiga siswa belajar tentang seni rupa murni dan seni rupa terapan. Guru menggunakan metode ceramah dan media pembelajaran Appreciation Card. Siswa dengan kelompoknya memanfaatkan Appreciation Card untuk lebih mendalami contoh-contoh karya seni rupa. Guru juga mengenalkan motif batik. Di akhir pertemuan ketiga siswa mengerjakan soal-soal latihan. Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012. Masing-masing siswa membuat gambar motif batik kemudian diapresiasi. Guru menggunakan metode ceramah dan media Appreciation Card. Siswa menggambar motif batik seperti yang sudah dikenalkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siswa menggambar motif batik dengan teknik jiplakan. Gambar jiplakan motif batik dibagikan kepada setiap siswa. Setiap siswa disediakan pilihan dua gambar jiplakan. Setiap siswa memilih sendiri motif yang diinginkannya. Setelah selesai menggambar, masing-masing siswa saling bertukar gambar satu sama lain kemudian setiap siswa mengapresiasi gambar temannya.

Jumlah siswa yang sudah tuntas atau mencapai nilai ≥ 71 sebanyak 20 siswa, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 2 siswa, sehingga persentase tuntas belajar klasikal 86,96%.

Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran

Deskripsi observasi pembelajaran terdiri dari hasil pengamatan terhadap aktivitas mahasiswa

dan performansi guru.

4.1.1.2.1 Deskripsi Aktivitas mahasiswa Aspek-aspek aktivitas belajar mahasiswa antara lain keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, keberanian mahasiswa dalam bertanya, ketekunan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru, dan kerjasama mahasiswa dalam kelompok. Data aktivitas belajar mahasiswa siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.6 Aktivitas Belajar mahasiswa Siklus II 52 No. Aspek yang dinilai Rata-rata persentase aktivitas Pertemuan 3 Pertemuan 4

1. Keantusiasan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas 86.36% 96.59%
2. Keberanian mahasiswa dalam bertanya 75% 78.41%
3. Ketekunan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 92.05% 100%
4. Kerjasama mahasiswa dalam kelompok 93.18% 100%

Rata-rata persentase aktivitas 86.65% 93.75% Rata-rata persentase aktivitas siklus II 90.20%

Aspek keberanian mahasiswa dalam bertanya pada pertemuan ketiga yaitu 75% dan pada pertemuan keempat 78.41%. Aktivitas pada pertemuan ketiga yaitu 86.65% dan aktivitas pada pertemuan keempat 93.75% maka rata-rata aktivitas siklus II yaitu 90.2%.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Yonni, dkk. 2010. *Menyusun Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Familia.
- Achmad Sugandi, dkk. 2007. *Teori Pembelajaran*. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Bahari, Nooryan. 2008. *Kritik Seni Wacana, Apresiasi dan Kreasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastomi. Suwaji. 2003. *Kritik Seni*. Semarang: UNNES Press.
- BSNP. 2006. *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- BSNP. 2007. *Pedoman Penilaian Hasil Belajar Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdiknas.
- Catharina Tri Anni, dkk. 2007. *Psikologi Belajar*. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Dimiyati dan Mudjiono. 1999. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Garha. Oho. 1980. *Pendidikan Kesenian Seni Rupa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan

- Kebudayaan.
- Hamalik, Oemar. 2007. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadjar Pamadhi, dkk. 2010. *Pendidikan Seni Di SD*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Jools, Tessa dan Denise Grande. 2005. *A Case Study in Elementary School Media Literacy and Arts Education*. Project SMARTArt. 25-30.
- Lee, Alan. 2009. *Art Education and The National Review of Visual Education*. Australian journal of Education. 218.
- Iswidayati, Sri. 2010. *Pemanfaatan Media Pembelajaran Seni Budaya*. Semarang: UNNES Press.
- Mariamah, Fifi Faridah, Ratnah & Suratman. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima Menggunakan Jasa Konsultan Dalam Penyusunan Skripsi Tahun Akademik 2015. *Jurnal MIPA* vol. 6 no.2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*. 227 Sadiman, Arief S. 2009.
- Media Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahman, Humar. 2003. *Mengenal Dunia Seni Rupa*. Semarang.
- IKIP Semarang Press. Saminanto. 2010. *Ayo Praktik PTK: Penelitian Tindakan Kelas*. Semarang: RaSAIL Media Group. Sobandi, Bandi. 2008.
- Model Pembelajaran Kritik dan *Apresiasi Seni Rupa*. Bandung: UPI Press. Stone, Sandra J. dan Basanti Chakraborty. *Proses Art vs. Product Art: The Teacher's*
- Dilemma. Sudjana, Nana. 2010. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiarto, Eko. 2011. *Peningkatan Kemampuan Apresiasi Lukisan Berbasis Kritik Menggunakan Media Pembelajaran Appreciation Card Bagi Siswa Kelas IX B SMP N 2 Kudus*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suharsimi Arikunto, dkk. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suprayekti, dkk. 2009. *Pembaharuan Pembelajaran Di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa. 2011. *Belajar & Pembelajaran*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Zainal Aqib, dkk. 2010. *Penelitian Tindakan Kelas Untuk Guru, SD, SLB, TK*. Bandung: CV Yrama Widya.

Involusi Pertanian Di Jawa 1830-1900 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa

Syahbuddin

STKIP Taman Siswa Bima

oribedo70@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak 1830-1900, dimana dalam rentang waktu di atas terapkan dua sistem yaitu tanam paksa dan liberal. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang terdiri dari *heuristik*, *kritik*, *Interprerasi* dan *historiografi*. Peneliti menggunakan pendekatan ekonomi sedangkan model penjelasan yang digunakan adalah kausalitas atau sebab akibat (*cause and effect*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa involusi pertanian di Jawa dilatarbelakangi kebijakan kolonial Hindia Belanda (1619-1942) yang membawa produk pertanian Indonesia ke pasar dunia. Namun Belanda tidak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia. Untuk itu kolonial Belanda terus mendorong petani untuk memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Untuk itu Belanda menerapkan sistem tanam paksa 1830-1870 dan sistem liberal 1870-1900. Penerapan dua sistem ini menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor dan menyerap tenaga kerja. Artinya, lahan pertanian makin sempit sedangkan jumlah penduduk makin bertambah. Hal inilah yang disebut dengan proses involusi yang kemudian akan menyebabkan petani akan berfikir keras dalam mengelola sawahnya, karena lapangan kerja di luar pertanian tidak tersedia. Kondisi ini membawa dampak bagi desa atau masyarakat Jawa: terjadinya involusi pertanian dan kemiskinan bersama; semakin kuatnya kepemilikan tanah komunal, pengembangan produksi palawija, semakin sulitnya pembagian kerja serta untuk memperoleh pendapatan.

Kata kunci: Involusi, Pertanian, Jawa.

PENDAHULUAN

Sejarah pertanian di Indonesia adalah sejarah penyimpangan yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan structural di sector pertanian yang masih bertahan hingga saat ini. Ketika Negara-negara Barat, pertanian dimulai dengan membagi-bagikan lahan pertanian kepada rakyat (*land reform*), di Indonesia terjadi sebaliknya, tanah rakyat "dirampas" untuk dibagi-bagikan kepada pengusaha swasta. Pembangunan di sektor pertanian yang dilakukan oleh kaum penjajah seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis di negara-negara Asia Tenggara adalah upaya eksploitasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing. Menurut Koentjaraningrat (1979:343), kolonialisasi pada suatu bangsa pada hakekatnya ialah suatu usaha eksploitasi kekayaan dan penindasan terhadap bangsa lain. Tidak terkecuali praktek kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda yang dilakukan terhadap penduduk Hindia Belanda

dengan berbagai cara dan sistem yang diterapkan.

Pada awalnya istilah involusi dipakai oleh para antropolog dalam meneliti suatu bentuk kesenian. Konsep involusi ini diperoleh dari Alexander Goldenweiser, seorang ahli antropologi dari Maerika Serikat, yang telah menciptakannya untuk melukiskan pola-pola kebudayaan yang sudah mencapai bentuk yang nampaknya telah pasti tidak berhasil menstabilisasinya atau mengubahnya menjadi suatu pola baru, tetapi terus berkembang ke dalam sehingga menjadi semakin rumit (Geertz, 1976:88). Istilah involusi kemudian dipakai oleh Geertz dalam masalah pertanian. Menurut Geertz (1976:xxiii) involusi pertanian adalah kemandekan atau kemacetan pola pertanian yang ditunjukkan oleh tidak adanya kemajuan yang hakiki. Jika pun ada gerak misalnya orang berjalan, berlari atau menunjukkan gerakan yang lain di dalam lingkungan air, tak ada gerakan

yang menimbulkan kemajuan. Sedangkan dalam pertanian, involusi digambarkan oleh taraf produktivitas yang tak naik, dimana produktivitas perorangan (tenaga kerja) yang dipakai sebagai ukuran. Kenaikan hasil perhektar memang dicapai tapi hasil yang lebih tinggi itu hanya cukup untuk mempertahankan penyediaan pangan perorang, pemakan nasi.

Menurut Geertz involusi ialah perubahan yang hampir tidak terjadi perkembangan karena terbagi, maksudnya kenaikan jumlah produksi bersamaan dengan melonjaknya jumlah penduduk (produksi mengikuti deret ukur, jumlah penduduk mengikuti deret hitung). Pengertian dari Involusi yang lain ialah meningkatnya jumlah penduduk tanpa dibarengi penambahan lahan garapan sehingga mereka kemudian terpaksa membagi lahan pertanian sama-rata, sama-rasa. Arti involusi oleh Geertz disebabkan juga pada satuan usaha lain bukan hanya pertanian bahkan juga pada satuan-satuan sektor, misalnya perdagangan dan industri rumah tangga; karena amat banyaknya orang melakukan fungsi itu, keuntungan masing-masing hanya tipis (Geertz, 1976:xxvii). Menurut pengamatannya, Geertz tidak lepas dari periodisasinya terhadap penjajahan di Jawa yakni periode masa VOC, masa tanam paksa, dan masa sistem perkebunan swasta. Geertz menyimpulkan periode kedua-lah yang berperan penting dalam timbulnya involusi. Involusi ini ditandai dengan terjadinya dualisme ekonomi: (a) Kehidupan ekonomi kolonial yang bersifat kapitalis bejalan diatas sistem atau lembaga tradisional. Karena sistem ekonomi kolonial berjalan sendiri. Tidak akan mungkin akan bisa hidup; (b) Adanya hubungan sekaligus pertarungan antara sistem kapitalis dengan tradisional. Ekonomi barat yang bersifat kapitalistik menjalankan kegiatannya dengan menggunakan alat dalam bentuk kontrak, uang, jual beli dan lain-lain. (<http://historycommunity.blogspot.com/favicon.ico>, di akses, 10 Juni 2018). Geertz menggambarkan ciri involusi adalah "tumbuh ke dalam", bukan mekar atau merubah diri. Dalam hal ini, penduduk yang luar biasa besarnya diserap oleh sawah yang terlampau sempit terutama di daerah dimana

penanaman tebu. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya involusi pertanian di Jawa, bagaimakah proses terjadinya involusi pertanian dan terhadap desa di Jawa.

METODE PENELITIAN

Helius Sjamsuddin menjelaskan bahwa metode berarti cara, jalan, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang sistematis dalam suatu pendidikan ilmu tertentu untuk mendapatkan obyek (Sjamsuddin, 2007:24). Sedangkan J. Garragham menjelaskan metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Abdurrahman, 2007:53).

Berdasarkan pengertian di atas para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara meneliti sejarah. Gottschalk (1983) mensistematisasikan langkah-langkah dalam metodologi sejarah itu sebagai berikut; (a) mengumpulkan obyek yang berasal dari suatu zaman dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan; (b) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak autentik; (c) menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang autentik; (4) menyusun kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi kisah atau penyajian yang berarti (Abdurrahman (2007:54)

Langkah pertama adalah Heuristik, GJ. Renier menjelaskan teknik mengumpulkan sumber disebut *heuristik* yang berarti memperoleh (Abdurrahman, 2008:64). Selanjutnya dijelaskan bahwa heuristik adalah suatu teknik, suatu seni bukan suatu ilmu oleh karena itu heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Dalam mengumpulkan sumber peneliti melakukan studi pustaka. Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983:420).

Setelah peneliti mengumpulkan sumber-sumber sejarah tahap berikutnya adalah kritik sumber (verifikasi) untuk memperoleh keabsahan (Abdurrahman, 2008:68). Tahap ini dapat dilakukan baik kritik eksternal maupun kritik internal.

Setelah sumber tersebut terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber, baik itu kritik intern maupun ekstern. Kritik ekstern berupa menguji keaslian dari sumber berupa segi-segi luarnya misalnya mengujian dengan pertanyaan berupa kapan sumber itu dibuat, siapa pembuat sumber sejarah tersebut, dari bahan apa sumber itu dibuat, apakah sumber itu masih dalam bentuk asli? Setelah itu kita melakukan kritik intern yang menguji isi kandungan sumber tersebut dengan pertanyaan apa dan bagaimana isi kandungan sumber tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan kritik internal negatif dan kritik internal positif. Tahap selanjutnya adalah interpretasi atau analisis. Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah (Daliman, 2012:81). Tugas peneliti memberikan penafsiran dalam kerangka memugar suatu rekonstruksi masa lampau. Analisis sendiri bertujuan melakukan sintesis (menggabungkan) atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama teori disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 2007:73). Tahap terakhir adalah historiografi yaitu proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk tulisan sejarah (Sulasman, 2014:147). Model penjelasan yang digunakan adalah kausalitas untuk meneropong faktor-faktor penyebab sebuah peristiwa terjadi. Menurut Carr (1971), Dalam sejarah dapat dibedakan sebab umum (*general cause, fundamental cause*), dan sebab khusus (*direct cause, immediate cause*) atau yang menjadi pemicu (*trigger*). Kausalitas merupakan model penjelasan sejarah dengan merangkai fakta dalam hubungan sebab akibat (*cause and effect*). Hukum sebab akibat mengingatkan bahwa setiap fenomena merupakan akibat dari sebab sebelumnya (Pranoto, 2010:45).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebab-sebab terjadinya Involusi Pertanian di Jawa

Memahami bagaimana latarbelakang terjadi involusi pertanian di Jawa Wasino (2008:11) menjelaskan; Involusi ini sesungguhnya telah memiliki akar jauh sebelum kolonialisme, tetapi dipercepat dengan hadirnya perkebunan tebu pada masa tanam paksa dan semakin dipercepat lagi pada masa kolonial liberal". Hal ini bisa kita lihat, pertama, kebijakan kolonial Hindia Belanda (1619-1942) adalah membawa produk pertanian Indonesia yang subur ke pasar dunia, dimana pada saat itu produk dari Indonesia ini sangat dibutuhkan dan laku keras dalam pasaran, tanpa mengubah struktur ekonomi masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pada Maret 1602, perseroan-perseroan yang saling bersaing bergabung membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur, VOC (*Vereenigde Oost Compagnie*) yang bertujuan meningkatkan daya saing dengan pedagang-pedagang erapa lainnya seperti Inggris, Spanyol dan Portugis. Tahun 1619 setelah Inggris dihalau oleh tentara Banten, pasukan VOC di bawah Piter Coen merebut Jayakarta dan membangun markas VOC dan mengganti namanya menjadi Batavia. Menurut Wasiono (2008:23) "sejak tahun 1680, VOC berhasil menguasai semua jalur perniagaan rempah-rempah di Nusantara. Para pedagang sing di luar Belanda yang semula berdagang dengan penduduk Indonesia dihalau melalui "administrative trade". VOC menjadi pemain utama (monopoli) perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Namun, pemerintah kolonial tidak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia, seperti halnya Inggris pada masa yang sama, sehingga kepentingan utama Pemerintah Belanda tetaplah bertumpu pada koloninya, Hindia Belanda. Kedua, upaya pemerintah kolonial untuk meraih pasar internasional adalah mempertahankan pribumi tetap pribumi, dan terus mendorong mereka untuk memproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Pada tahun 1830-1870 pemerintah kolonial Belanda menjalankan *Cultuurstelsel* di

Indonesia, khususnya di Jawa. *Cultuurstelsel* adalah istilah resmi pengganti cara produksi yang tradisional dengan cara produksi yang rasional, disebut juga dengan istilah "tanam paksa" oleh kaum liberal yang anti cara itu karena dianggap sebagai usaha pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan cara-cara paksaan (Mudjanto,1987:17).

Pemerintah kolonial Belanda menjalankan tanam paksa tersebut karena kas negara kosong, akibat terjadinya revolusi Belgia tahun 1830 dan beberapa peperangan di Hindia Belanda. Sehingga timbullah gagasan untuk memeras tanah jajahan yang mempunyai latar belakang pertanian untuk mengisi kekosongan kas negara tersebut. Pencetus gagasan tanam paksa adalah Johannes van den Bosch, seorang penasehat raja Willem I yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Jendral di Indonesia. Dia sangat yakin akan keberhasilan gagasannya melihat keadaan tanah di Jawa yang subur dan banyak tenaga kerja yang diambil dari masyarakat desa yang cukup padat. Pada dasarnya tanam paksa itu berarti pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan wajib yang pernah dipraktekkan VOC sewaktu berkuasa dahulu.

Jenis tanaman yang terkena sistem tanam paksa terutama adalah kopi, tebu, dan nila (indigo). Sedangkan tanaman lain yaitu tembakau, lada, teh, dan kayu manis ditanam dalam skala kecil. Komoditi tersebut ditanam pada 1/5 bagian tanah penduduk, kecuali kopi yang ditanam di tanah-tanah yang belum digarap. Wilayah tanam paksa terutama di Jawa, khususnya di daerah gubernemen, dengan pengecualian daerah Batavia, Bogor, daerah tanah partikelir dan daerah *Vorstenlanden*. Di daerah *Vorstenlanden* ada aturan khusus yaitu dengan sistem sewa (Kartodirdjo, dkk., 1991:57). Kalau kita cermati, antara sistem eksploitasi VOC dengan pemerintah kolonial terdapat persamaan yaitu dalam hal penyerahan wajib hasil-hasil pertanian penduduk desa, meskipun cara pelaksanaannya agak berbeda, pemerintah kolonial Belanda secara langsung mengadakan hubungan dengan para petani yang secara efektif menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki tanpa harus menghubungi

terlebih dahulu para bupati dan kepala desa (Sartono,1976:75).

Tanam paksa lebih mengutamakan peningkatan hasil produksi tanaman ekspor yang sangat laku di pasaran Eropa. Untuk itu pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman ekspor kepada petani di Jawa. Maka dalam pelaksanaan tanam paksa itu dipergunakan desa sebagai organisme: yaitu tanah, pekerja dan pimpinan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ke tiga faktor itu apabila di organisasi dengan baik dapat memberikan hasil produksi ekspor yang tinggi. Menurut ketentuan Lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834 No. 22 ketentuan pelaksanaan sistem tanam paksa adalah sebagai berikut: 1) Persetujuan akan diadakan dengan penduduk di mana penduduk akan menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa; 2) Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa; 3) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi; 4) Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah; 5) Tanaman perdagangan yang dihasilkan di tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; jika nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat; 6) Panen tanaman perdagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikitnya jika kegagalan itu tidak disebabkan oleh kelalaian rakyat; 7) Penduduk desa akan mengerjakan tanah di bawah pengawasan kepala-kepala, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman agar bisa berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Fauzi, 1999:320).

Pelaksanaan tanam paksa dalam kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masa itu. Menurut ketentuan,

pemerintah kolonial seharusnya mengadakan perjanjian dengan rakyat terlebih dahulu, tetapi dalam prakteknya, dilakukan tanpa perjanjian dengan penduduk desa sebelumnya dan dengan cara paksaan. Sehingga, banyak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pegawai kolonial, bupati dan kepala desa itu sendiri mengakibatkan timbul penderitaan pada penduduk desa yang bersangkutan. Bupati dan kepala desa bekerja bukannya mengabdikan kepada kepentingan rakyat desa melainkan kepada pemerintah kolonial atau demi kepentingan pribadi, membuat merosotnya martabat dan kewibawaan pejabat-pejabat yang bersangkutan dan juga dianggap sebagai kaki tangan pemerintah kolonial (Elisabet, 1988:4).

Pada tahun 1840, *Cultuur Stelsel* sudah menghadapi berbagai masalah (Ricklefs, 2008:268). Tanda-tanda tentang penderitaan di kalangan orang Jawa dan Sunda mulai nampak, khususnya di daerah pertanian tebu. Pada tahun 1848, untuk pertama kali sebuah undang-undang yang liberal memberikan kepada parlemen Belanda peranan yang berpengaruh kepada daerah jajahan dan hasil perdebatan politik di Belanda adalah dihapuskannya tanam paksa. Oleh karena itu sejak tahun 1870 tanam paksa dihentikan, sebagai gantinya antara tahun 1970-1900 pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem liberalisme sebagai sistem ekonominya di Hindia Belanda (Kartodirdjo, dkk., 1977:97).

Pada tahun 1870 keluarlah Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang disusun oleh menteri de Waal. Undang-undang ini menerangkan bahwa: 1) Pemerintah berhak menyewakan tanah yang tidak dipergunakan penduduk asli selama 75 tahun, kepada bangsa asing. Peraturan ini disebut *erfpacht* artinya tanah yang dapat diwariskan; 2) Penduduk asli tidak boleh menjual tanahnya kepada orang asing, tetapi boleh menyewakannya (misalnya untuk tanaman tebu); 3) Tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, menjadi hak milik pemerintah.

Ada dua macam tanah, yaitu: 1) Tanah bebas: (*egendom* /milik sendiri), *recht van opstal* (untuk mendirikan bangunan, *erfpacht* (tanah sewa

selama 75 tahun), dan lain-lain; 2) Tanah tidak bebas: milik anak negeri, tanah swasta, yaitu tanah yang dijual kepada bangsa asing oleh pemerintah. Tanah tidak bebas tidak boleh pindah dari tangan anak negeri.

Dengan diterapkannya sistem ekonomi liberal ini, berarti tercipta kesempatan bagi kaum liberal Belanda untuk menginvestasikan modalnya di perkebunan-perkebunan besar di Hindia Belanda secara bebas. Produktivitas perkebunan dan volume perdagangan kemudian berkembang secara pesat, sehingga terjadi, penanaman modal secara besar-besaran (Kartodirdjo, 1972:15). Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dibuka seperti tebu, kopi, tembakau, teh, kina dan lain-lain. Ada tiga faktor yang menyebabkan perkembangan swasta Barat dalam perkebunan di Jawa; tersedianya tanah dan tenaga kerja, investasi modal dan jaringan pemasaran hasil produksi (Wasino, 2008:31).

Tujuan awal dikeluarkannya UU Agraria ini untuk melindungi tanah-tanah pribumi dari perkebunan besar milik swasta Barat, namun pada kenyataannya hanya melindungi para pemilik modal Eropa yang menanamkan modalnya di perkebunan dan tetap membuka kondisi-kondisi yang menguntungkan mereka, misalnya tenaga kerja yang sangat murah (Kartodirdjo, 1972:28-29). Oleh sebab itu kondisi Hindia Belanda mendapat kritikan dari kaum liberal, agar pemerintah Belanda tidak semata-mata memikirkan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan nasib penduduk pribumi. Pada tahun 1899, muncul ide mengenai politik etis yang diprakarsai Conrad Theodore van Deventer seorang ahli hukum. Ia menulis dalam majalah Belanda *De Gids*, dengan judul "*Een Ereschuld*" yang artinya utang budi. Di dalam majalah itu mengkritik pemerintah Belanda yang telah mendapat berjuta-juta gulden dari hasil penjajahan di Hindia Belanda. Kritikan juga datang dari partai Protestan yang memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum di Belanda, pada tahun 1891 mengkritik kebijakan kolonial yang mengakibatkan penderitaan penduduk Hindia Belanda (Wasino, 2008:33).

Pelaksanaan politik liberal membawa dampak sebagaimana hasil penelitian komisi *Mindere*

Welvaart Commissie yang dilakukan pada tahun 1900. Hasilnya; kondisi perekonomian daerah jajahan khususnya daerah pedesaan Jawa pada penghujung abad 19 menunjukkan ketimpangan. Salah satu indikator yang jelas adalah menurunnya konsumsi beras dari 120 kg/pertahun perkapita pada tahun 1800, menurun menjadi 1033 kg/ tahun pada tahun 1900. Hasil penyelidikan diumumkan oleh ratu Wilhelmina pada tahun 1901, sehingga sejak saat itu secara resmi politik Etis mulai dilaksanakan (Wasino, 2008:35).

Proses Terjadinya Involusi Pertanian di Jawa

Pemerintah kolonial dalam usaha meningkatkan produksi eksportnya menentukan tanaman yang memberikan keuntungan besar seperti tebu dan kopi. Tanaman tebu merupakan tanaman tahunan yang membutuhkan irigasi, dan dapat ditanam di sawah, sehingga memungkinkan dapat menanam tebu dan padi bergantian. Tanaman tebu juga tidak cukup kalau hanya mengandalkan pada tanah yang luas, tanpa diimbangi oleh irigasi jalan raya dan sebagainya. Penduduk desa pada dasarnya mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, hal inilah yang disalahgunakan oleh penguasa dan pemerintah kolonial untuk mempekerjakan mereka dan memberi upah yang minim (Boeke, 1983:25). Pendirian pabrik-pabrik gula berarti banyak tanah desa yang dipergunakan untuk menanam tebu. Hasil produksi tebu yang meningkat mengakibatkan harus memerlukan banyak tenaga penduduk desa.

Berdasarkan pengalaman dalam kerja paksa ini membuat para penguasa swasta mendapat keuntungan besar dari hasil kontrak gula dengan pemerintah kolonial. Para penguasa swasta mulai berani menggunakan "kerja bebas" yaitu upah yang tidak berdasarkan paksaan melainkan berdasarkan persetujuan sukarela. Jalan-jalan dan alat-alat pengangkutan diperbanyak karena itu penguasa Eropa di Jawa berusaha untuk mengadakan ekspansi (Burger, 1977:204).

Sistem tanam paksa sangat menentukan dalam pemusatan pertanian di Jawa. Sistem itu

telah memberikan bentuk terakhir pada perbedaan yang ekstrim antara Jawa dan luar Jawa dan semenjak itu perbedaan semakin besar. Sistem Tanam Paksa telah memantapkan pola ekonomi rangkap dengan sektor barat yang padat modal dan sektor timur yang padat karya. Sistem Tanam Paksa telah menyebabkan makin pesatnya perkembangan sektor barat dan membekukan sektor timur. Selain itu sistem ini telah mencegah pengaruh akibat makin mendalamnya penetrasi barat ke dalam kehidupan petani dan priyayi Jawa, sehingga modernisasi pertanian di kalangan pribumi pada saat yang sangat menguntungkan.

Pada masa tanam paksa itu, jenis tanaman dipisahkan dalam dua kategori yaitu: *tanaman tahunan*: tebu, nila, tembakau dan *tanaman keras*: kopi, teh, lada, kina, kayu manis (Greerts; 1983:56). Dua kategori tanaman ini menimbulkan berkembangnya dua gaya saling mempengaruhi: tanaman tahunan cenderung untuk membentuk hubungan mutualis (timbang balik) dengan komunitas, bersama-sama mempergunakan habitat tanpa menimbulkan ketegangan. Tanaman keras cenderung kearah hubungan insuler, menempati habitat yang belum dipergunakan dan menutup diri dari sistem-sistem pribumi sebagai kantong-kantong yang memang wajar.

Tanaman yang dapat mewakili dua jenis tanaman dari sistem tanam paksa adalah; tanaman tebu (termasuk tanaman tahunan) dan tanaman kopi (termasuk tanaman keras) keduanya adalah tanaman yang mempergunakan lahan yang luas, menyerap tenaga kerja yang cukup besar, menghasilkan keuntungan yang tinggi atau mempunyai pengaruh yang relatif lama terhadap struktur umum ekonomi rakyat petani.

Tebu merupakan tanaman yang butuh irigasi sehingga harus ditanam di sawah. Tebu memakai pajak berdasarkan 1/5 tanah petani. Sedangkan kopi merupakan tanaman yang cocok ditanam di daerah pegunungan dan tidak membutuhkan irigasi sehingga ditanam di daerah selain daerah tanaman padi. Pajak dari kopi berdasarkan padat karya, taksiran diambil dari segi jumlah pohon kopi yang harus dipelihara oleh orang yang

ditunjuk untuk menanamnya. Ironisnya yang terjadi ialah sebaliknya. Dalam 3 dasawarsa terakhir dari zaman penjajahan, kurang lebih hanya 6% produksi kopi Indonesia berasal dari pemilik lahan kecil, sedangkan lebih dari 95% produksi gula berasal dari perkebunan-perkebunan milik Belanda yang ada di Jawa.

Produksi kopi dengan cepat meningkat dalam waktu 10 tahun. Pada tahun 1813 di Jawa, terdapat lebih dari 100.000 batang pohon kopi, dua tahun kemudian 1835 berlipat menjadi 2 kali lipat, dan pada tahun 1840-1850 lebih dari 3 kali lipat jumlah tersebut. Selama periode sistem tanam paksa, kopi untuk Jawa sama dengan tekstil untuk Inggris. Berbeda dengan kopi, gula tidak meningkat dengan pesat saat pertama kali diadakan sistem tanam paksa. Justru ketika kopi mengalami stagnansi produksi dari gula semakin meningkat.

Peningkatan produksi ini ternyata hanya menguntungkan pihak Belanda. Sedangkan bagi pihak pribumi kurang diuntungkan karena pihak Belanda tidak melibatkannya dalam keuntungan yang diperoleh dari kedua tanaman ekspor tersebut. Hal ini kemudian diperparah dengan lahan yang dipakai sebagai lahan tanaman pangan tidak mengalami peningkatan sehingga produsen tidak mengalami peningkatan yang berarti bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Reinsma menjelaskan, pada tahun 1830 terdapat 7.000.000 jiwa penduduk di Jawa, tahun 1840 kemudian bertambah menjadi 8.700.000 jiwa, tahun 1850 menjadi 9.600.000 jiwa, 1860 menjadi kurang lebih 12.700.000 jiwa, 1870 menjadi 16.200.000 jiwa, 1880 berubah menjadi 19.500.000 jiwa, pada tahun 1890 mengalami penurunan akibat banyaknya wabah menjadi 13.600.000 jiwa, akan tetapi pada tahun 1900 jumlah ini telah menjadi 28.400.000 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk Jawa saat itu kurang lebih 2% selama 10 tahun (Geertz, 1976:76). Ketika peningkatan ini terjadi orang-orang Jawa khususnya petani memiliki dua posisi keadaan yang paling jelek yaitu ekonomi yang mandek atau stagnan dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Keadaan inilah yang kemudian sering disebut dengan involusi pertanian.

Memasuki tahun 1870 terjadi perubahan iklim politik di Belanda yang sekaligus mempengaruhi kebijakan di Hindia Belanda. Pada tahun 1870 Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria. Ditambah dengan berbagai peraturan tambahan undang-undang itu memungkinkan pemindahan tanggungjawab secara langsung agar pulau Jawa tetap menguntungkan bagi usaha-usaha swasta serta untuk mencegah agar usaha-usaha serupa tidak menghancurkan ekonomi desa yang menjadi landasan tempat mendapatkan keuntungan (Geertz, 1976:91).

Beberapa perusahaan perkebunan didirikan seperti *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang didirikan pada tahun 1824 yang kemudian menjadi firma penanaman modal swasta yang setengah bank dan setengah perkebunan. Pada tahun 1915 Maskapai ini telah memiliki enam belas buah pabrik gula dan secara efektif mengontrol dua puluh buah lainnya, empat buah perkebunan tembakau, dua belas perkebunan teh dan empat belas buah perkebunan karet. Pada tahun 1878 didirikan *Handels Vereeniging Amsterdam* (HVA). Perusahaan ini telah mengontrol empat belas pabrik gula dan mengelola satu pabrik tapioka, satu gabungan perkebunan kopi-karet dan dua puluh perusahaan perkebunan yang sudah berdiri sejak zaman tanam paksa. Sedangkan pabrik gula didirikan pada tahun 1913 yang bernama *Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden*. Perusahaan ini telah memiliki dua puluh pabrik gula, tiga perkebunan kopi, satu tembakau dan satu teh (Geertz, 1976:93).

Perusahaan-perusahaan perkebunan ini secara finansial didukung oleh bank-bank seperti *Handelsbank*, *Charteredbank* yang telah mendisferifikasi produksi perkebunan jauh dari produk utama dari abad sembilan belas, gula dan kopi serta meluaskannya ke bagian-bagian tertentu ke Indonesia luar dan luar Jawa. Perusahaan-perusahaan besar ini juga membangun jalan raya, irigasi modern, balai percobaan pertanian atau secara umum menciptakan sebuah argoindustri yang menyeluruh, yang dalam hal kerumitan,

efisiensi dan besarnya tiada bandingnya di seluruh dunia.

Pada masa perkebunan besar ini, gula tetap merupakan hasil bumi ekspor Indonesia yang paling penting sampai tahun tigapuluhan, terus menjalin hubungan yang timbal balik dengan padi, dengan samaran yang berbeda sedikit saja. Karena Jawa sudah sangat padat penduduknya maka dikembangkanlah suatu kompleks sewa menyewa tanah untuk memperoleh hak menggunakan tanah. Suatu *onderneming* mengadakan perjanjian penyewa tanah untuk jangka waktu 21,5 tahun yang kadang-kadang dilakukan dengan senang hati dan kadang-kadang dipaksa oleh orang terkemuka dan pejabat pamong praja setempat (Geertz, 1976:95).

Penanaman tebu di Jawa, distribusi sawah dan penduduknya yang tidak merata menyebabkan petani tidak memiliki pilihan lain untuk menanggulangi kenaikan jumlah petani kecuali dengan mengusahakan sawah mereka dengan lebih giat dan bahkan seluruh sumber daya pertanian mereka dengan cara yang seksama, karena tidak akan ada industri yang menampung mereka sedang lahan pertanian kosong sudah penuh oleh tanaman tebu.

Demikianlah secara lambat laun, petani terpaksa memasuki pula sawah yang makin lama makin sesak dengan pegawai, seperti yang terlihat dari tahun 1920. Penduduk luar biasa besarnya diserap ke sawah yang terlalu sempit, terutama di daerah tebu yang telah mempertinggi mutu irigasi. Kenaikan produktivitas perhektar sebagai akibat perbaikan irigasi tersebut dan dengan bantuan palawija merupakan standar hidup yang stabil atau stagnan. Mekanisme adaptasi petani Jawa yang digambarkan oleh Geertz adalah dengan melakukan intensifikasi dengan melibatkan sebanyak mungkin tenaga dalam setiap kegiatan produksi tanaman dalam kerangka membagi-bagikan rejeki yang ada hingga makin lama makin sedikit yang diterima. Namun bagaimanapun, akhirnya akan menimbulkan suatu kemerosotan (proses involusi pertanian).

Dampak Involusi Pertanian bagi desa di Jawa

Clifford Geertz, terjadinya involusi pertanian dan kemiskinan bersama yang telah melahirkan gejala tersendiri dalam masyarakat Jawa; sifat pasca tradisional dari struktur masyarakat pedesaan, semakin kuatnya pemilikan tanah komunal, pengembangan produksi palawija, semakin parahnya kemiskinan bersama dalam pembagian kesempatan kerja serta untuk memperoleh pendapatan (Wasino, 2008:11). 1) Sifat *Post-Tradisional* dari struktur masyarakat pedesaan. Pola dasar kehidupan desa dipertahankan dalam beberapa hal bahkan diperkuat dan penyesuaian pada kapitalisme dilakukan dengan cara lebih rumitkan berbagai pranata dan praktek yang sudah mapan. Dalam menghadapi persoalan-persoalan; meningkatnya jumlah penduduk meluasnya penggunaan uang, makin tergantungnya pada pasaran dan lain-lain, petani Jawa bukan melebur pola tradisional ke dalam anarki "proletar pedesaan" yang individualistis dan bukan pula dengan cara merubah bentuk pola itu menjadi komunitas pertanian-perdagangan yang modern (Geertz, 1976:99). Desa yang terkepung dari berbagai penjuru mempergunakan cara-cara sejenis keterampilan khusus dengan demikian dapat mempertahankan pola itu secara keseluruhan sambil mendorong unsur-unsurnya mencapai tingkat tertinggi; 2) Semakin kuatnya pemilikan tanah komunal. Dimana desa sebagai suatu badan hukum masih memiliki sisa-sisa hak kekuasaan atas sawah, nampaknya malahan diperkuat, sekurang-kurangnya secara relatif di desa-desa di daerah gula; 3) Pengembangan produksi Palawija. Krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia-belanda. Perkebunan-perkebunan besar tidak lagi milik perseorangan tetapi direorganisasi sebagai perseroan terbatas. Pejabat kolonial Belanda dengan giat menganjurkan pemanfaatan ubi kayu yang diimpor dari Suriname tahun 1852. Kondisi ini diperburuk dengan makin meningkatnya penduduk Jawa setelah tahun 1900 dimana produksi beras tidak dapat mengimbangnya oleh karena itu petani mulai

menanam apa yang secara kolektif di sebut Palawija; 4) Semakin parahnya kemiskinan bersama dalam pembagian kesempatan kerja serta untuk memperoleh pendapatan, beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia khususnya Jawa yaitu: (a) Kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah dan modal. Rakyat Jawa bermodal sangat sedikit sedangkan jumlah penduduk sangat besar; (b) Tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi, sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis; (c) Penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem *verschoot* (uang muka); (d) Sistem tanam paksa dihapus, namun diberlakukan sistem *batik saldo*; (e) Krisis tahun 1885 mengakibatkan terjadinya penciptaan dalam kegiatan pengusaha-pengusaha perkebunan gula yang berarti menurunnya upah kerja dan sewa tanah bagi penduduk.

KESIMPULAN

Involusi pertanian di Jawa dilatarbelakangi kebijakan kolonial Hindia Belanda (1619-1942) yang membawa produk pertanian Indonesia ke pasar dunia, dimana pada saat itu produk dari Indonesia ini sangat dibutuhkan dan laku keras dalam pasar dunia. Namun Belanda tidak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia. Untuk itu Belanda terus mendorong petani untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Untuk itu Belanda menerapkan sistem tanam paksa 1830-1870 dan sistem liberal 1870-1900.

Penerapan tanam paksa maupun sistem setelah itu menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor dan menyerap tenaga kerja, artinya lahan pertanian makin sempit. Tidak bertambahnya lahan tanam padi ini diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga petani harus memasukan tenaga kerja yang berlebih ke dalam sawah yang menyempit. Hal inilah yang disebut dengan proses involusi yang kemudian akan menyebabkan petani akan berfikir keras dalam mengelola sawahnya, karena

lapangan kerja di luar pertanian tidak tersedia. Kondisi ini membawa dampak bagi desa atau masyarakat Jawa; sifat pasca tradisional dari struktur masyarakat pedesaan, semakin kuatnya pemilikan tanah komunal, pengembangan produksi palawija, semakin parahnya kemiskinan bersama dalam pembagian kesempatan kerja serta untuk memperoleh pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Logos Wacana Ilmu:Jakarta.
- Basri, MS., 2006, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Restu Agung: Jakarta.
- Boeke, JH., 1983, *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta; Penerbit Suara Harapan.
- Burger, DH., 1977, *Perubahan-perubahan Struktur dalam masyarakat Jawa*, Jakarta; Bhartara.
- Daliman, 2012, *Metode Penelitian Sejarah*, Ombak: Yogyakarta.
- Elisabet Endang Sri Sulastri; 1988; *Pelaksanaan Cultuurstelsel di Jawa* (Skripsi Sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah; Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Fauzi, Noer, 1999. *Petani dan Penguasa*. Bandung : Insist.
- Gottschalk, Louis, terj. Nugroho Notosusanto, 1975, *Mengerti Sejarah*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Greets, C, 1976, *Involusi Pertanian*, Bhartara: Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono & Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia : Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media: Yogyakarta.
- _____, 1977, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*; Gramedia Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, 1972, *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada abad 19 dan 20*, Lembaran Sejarah UGM: Yogyakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk., 1976, *Sejarah Nasional Indonesia IV*; Debdikbud, Grafitas: Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1979, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta; Djambatan.

- _____, 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia: Jakarta.
- Moedjanto, G., 1987, *Indonesia Abad ke-20*, Jilid I; Kanisius; Yogyakarta
- Pranoto, Suhartono. W, 2010, *Teori dan Metodologi Sejarah*, cet.1, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ricklefs, M.C., 1999, *Sejarah Indonesi Modern*, Yogyakarta, Gajam Mada University Press.
- Sardiman, AM, 2004, *Memahami Sejarah*, Bilgraf Publishing: Bandung.
- Sjamsuddin, Helius, 2007, *Metodologi Sejarah*, Ombak: Yogyakarta.
- Sulasman, 2004, *Metodologi Penelitian Sejarah; teori, medode, contoh aplikasi*, Pustaka Setia: Bandung.
- Wasino, 2008, *Berjuang Menjadi Wirausahawan: Sejarah kehidupan kapitalis bumiputra Indonesia*, Semarang, Universitas Negeri Semarang Press.

Peran Lembaga Adat Donggo (Lasdo) dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Untuk *Ius Constituendum*

Suherman¹, Ady Irawan²

^{1,2}STKIP Taman Siswa Bima

²adyirawan652@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 1) peranan Lembaga Adat Donggo (Lasdo) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana; 2) tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat Donggo (Lasdo) di Kecamatan Donggo, dan 3) sinergisitas antara Lembaga Adat Donggo Lasdo dengan aparat kepolisian setempat dalam menangani tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, perekaman, dan catat. Subyek penelitian yakni Ketua Lembaga Adat Lasdo, tokoh masyarakat, dan penegak hukum setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Peranan Lembaga Adat Donggo (LASDO) dalam menyelesaikan tindak pidana di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sangat strategis. Peran itu terkristalisasi dari diberikan kewenangan LASDO dalam menetapkan jenis sanksi pidana (*strafsort*), bobot sanksi (*strafmaat*), serta pelaksanaan/eksekusi pidana (*strafmodus*) bagi pelaku tindak pidana. 2) Bahwa Lembaga adat dan Syari'at Donggo (LASDO) memiliki peranan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat Donggo, baik yang bersifat ringan hingga yang bersifat berat. 3) Sinergisitas antara Lembaga Adat LASDO dan aparat kepolisian setempat dalam menangani tindak pidana adalah berdasar asas saling menghormati dan menghargai serta asas musyawarah mufakat. Pihak Kepolisian akan memberikan kesempatan kepada LASDO terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara pidana. Apabila LASDO merasa perlu melimpahkan perkara tersebut ke Kepolisian karna alasan dampak tindak pidana yang dilakukan berpotensi meluas dan dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat Donggo, maka perkara tersebut akan diserahkan ke Kepolisian setempat.

Kata Kunci: *Lembaga Adat Donggo (Lasdo), Tindak Pidana, Ius Constituendum*

PENDAHULUAN

Tatanan-tatanan hukum telah ada di Indonesia jauh sebelum masyarakat mengenal hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup dengan aturan dan kebiasaan yang bersumber dari masyarakat ini selama beratus-ratus tahun yang lalu. Walaupun aturan-aturan hukum tidak berbentuk perundang-undangan yang kita kenal sekarang dengan segala ketentuan dan sanksi yang jelas dan tegas, tetapi tatanan hukum tersebut telah dapat memelihara keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap kejahatan yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap kejahatan dapat diselesaikan agar keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. (Sudarto, 1997)

Setiap kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu sebelum adanya ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dibuat oleh Negara, sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengatur agar kehidupan individu-individu di dalam kelompok tersebut berjalan tertib dan teratur. Cara-cara tersebut muncul dari nilai-nilai pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dikenal dengan adat istiadat. Hukum adat berurat dan berakar pada kebudayaan tradisional yang hidup dari perwujudan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat dan terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Pada masyarakat kecamatan Donggo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah lama direkat oleh kentalnya hubungan kebersamaan (*kasama weki*) di dalam tataran

budaya “berat sepikul ringan sejinjing” sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai adat, yang penyelesaian sengketa masih mempercayakan kepada Lembaga adat atau lebih dikenal dengan Lembaga Adat Donggo (LASDO), dimana pada proses penyelesaian sengketa salah satunya tindak pidana terlebih dahulu harus melalui Lembaga Adat tersebut.

Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 18B hasil amandemen mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal-hak tradisionalnya, namun fenomena adanya lembaga pidana adat LASDO tersebut apalagi untuk menyelesaikan tindak pidana belum ada payung hukumnya dalam sistem hukum pidana kita. Hal ini penting karena disamping untuk legalitasnya. juga yang mengatur seperti bagaimana beracara, serta prosedur-prosedur lain. Selain itu tidak ada yang menjamin apakah setelah dihukum berdasarkan hukum adat, apakah pelakunya akan dibebaskan dari jeratan hukum pidana nasional.

Sementara di satu sisi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan adanya lembaga adat yang berwenang untuk mengadili. Undang-Undang tersebut hanya membagi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun demikian, eksistensi lembaga adat Donggo yang dikenal dengan Lasdo ini tetap diakui baik oleh masyarakat setempat maupun oleh aparat penegak hukum disana, yang dalam hal ini adalah Kepolisian Sektor Donggo.

Penyelesaian tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana formal. Walaupun saat ini telah dirumuskan dalam Rancangan KUHP (R-KUHP), Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyebut pertemuan dua bentuk hukum yang berbeda tersebut sangat dramatis, karena bukan hanya persoalan format hukum yang berbeda namun juga pertemuan antara dua cara hidup atau kultur. Di lain sisi, R-KUHP belum menjadi hukum positif yang dapat diterapkan dalam

menyelesaikan tindak pidana. Oleh sebab itu secara yuridis pidana adat dan peradilan adat di Indonesia pun belum diakui secara tegas dan jelas oleh Undang-Undang.

Pada tataran implementasi, lembaga adat LASDO di kecamatan Donggo sangat berperan aktif dalam mengadili tindak pidana. Tokoh-tokoh adat setempat ditunjuk menjadi majelis dalam menentukan sanksi. Hilman Hadikusuma (2002 : 40) menyatakan biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga adat adalah tokoh-tokoh adat (Kepala Lembaga adat) dan Ulama. Menurut Moh Koeno (2007 : 44), dalam hukum adat perkara diselesaikan berdasarkan tiga asas kerja untuk menghadapi perkara-perkara adat, yaitu asas rukun, patut dan keselarasan.

Keberadaan Peradilan adat LASDO memang dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat Donggo sebelum masuk ke sistem peradilan pidana nasional. Konsep ini dikenal sebagai *restorative justice* yang dicanangkan dalam R-KUHP. Namun disatu sisi perlu adanya kepastian hukum, misalnya terkait sejauhmana peran lembaga adat LASDO ini, jenis pidana apa saja yang menjadi kewenangannya mengadili, serta interaksi atau hubungannya dengan institusi resmi negara dalam menangani masalah pidana seperti kepolisian setempat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kekuatan hukum putusan lembaga adat tersebut serta legitimasi publik Donggo terhadap putusan lembaga adat Lasdo.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Tahap Persiapan: a) Menentukan masalah yang akan dikaji dengan mencermati eksistensi Lembaga adat Donggo (Lasdo) dalam menyelesaikan tindak pidana di wilayah tersebut; b) Mendalami literatur untuk menentukan teori yang dianggap tepat dalam mengkaji permasalahan yang diangkat; c) Merancang proposal yang berisi permasalahan serta teori yang menjadi dasar sudut pandang hingga penganalisisan; Membuat instrumen pertanyaan untuk mencari serta menggali informasi sesuai rumusan masalah yang ditetapkan.

Tahap Pelaksanaan: a) Melaksanakan penelitian pada objek kajian yang menekankan pencarian informasi pada tokoh masyarakat Donggo yang menjadi bagian dari Lembaga adat Lasdo; b) Mengumpulkan informasi ke dalam format pengumpulan data wawancara.

Tahap Akhir: a) Menelaah data sesuai landasan teori melalui uraian secara deskriptif; b) Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Zainuddin Ali (2009: 105) mengatakan bahwa penelitian Yuridis Empiris sebagai penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Metode dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis, dan cermat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari objek yang ditelaah.

Sumber Data/Bahan Hukum

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat Donggo dan tokoh masyarakat Donggo yang dalam hal ini juga mencakup aparat kepolisian setempat.

Data Sekunder, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan, data ini dapat dibagi menjadi: a) Bahan Hukum Primer; b) Bahan Hukum Sekunder; c) Bahan Hukum Tersier

Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: a) Studi Kepustakaan (*library research*). Diperoleh

melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, khususnya yang terkait hukum pidana adat; b) Studi Lapangan (*field research*). Diperlukan sebagai data penunjang, diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai *informan* atau narasumber, yaitu Ketua Lembaga Adat Donggo (LASDO) serta Pihak-pihak terkait yang mengetahui bagaimakah pelaksanaan dan aplikasi dari Hukum Adat dan Peranan Lembaga adat di Kecamatan Donggo.

Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat analitis teori, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, serta menggunakan teori interpretasi, yaitu teori yang menyatakan kesesuaian antara bahan hukum dengan doktrin-doktrin dengan penelitian lapangan yaitu peran lembaga adat Donggo (Lasdo) dalam menangani perkara pidana serta teori argumentasi yang lebih banyak membahas tentang doktrin-doktrin dan bahan hukum yang sudah ada. Simpulan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode berfikir secara induktif.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Donggo merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Terdapat beberapa desa di Kecamatan Donggo, yaitu O'o, Bumi Pajo, Mpili, Ndano Na'E, Rora, Mbawa, Doridungga, Kala, dan Palama. Kecamatan Donggo beribukota di desa O'o. Kecamatan Donggo merupakan kecamatan yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 714 Mdpl yang merupakan tertinggi di Kabupaten Bima, dimana kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Bolo, Kecamatan Madapangga, dan Kabupaten

Dompu. Luas wilayah kecamatan Donggo adalah 123, 83 Km². Jumlah penduduk kecamatan Donggo berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima per tahun 2014 adalah sebanyak 18.584 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 17.432 jiwa, Katolik sebanyak 964 jiwa dan Protestan sebanyak 188 jiwa. Mayoritas penduduk Donggo bermata pencaharian sebagai petani. (BPS Kabupaten Bima).

Selintas Tentang Lembaga Adat Donggo (LASDO)

Lembaga Adat Donggo (LASDO) lahir sekitar tahun 1908 M. Hal ini dilatar belakangi oleh adat yang berlaku di Donggo dimana sangat diwarnai oleh hukum Islam. Ditambah lagi dengan faktor ketidaksukaan Ncuhi Kala (pimpinan masyarakat Donggo, sejak zaman kerajaan Mbojo-Bima) atas pemberlakuan hukum kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia, khususnya di Donggo. LASDO sebenarnya adalah singkatan dari Lembaga Adat dan Syari'at Donggo, namun masyarakat awam sekarang lebih mengenalnya dengan istilah Lembaga adat saja. Padahal kata Syari'at itu penting dimasukkan, mengingat hukum yang digunakan oleh LASDO salah satunya bersumber dari ajaran Islam, agama mayoritas masyarakat Donggo.

Struktur Lembaga adat Donggo (LASDO) dipimpin oleh ketua adat yang diberi gelar OMPU TUA. Kemudian dibawah ketua, yang bertugas sebagai sekretaris diberi gelar OMPU SAMPELA. Ompu Sampela bertugas sebagai administrasi dan mendata permasalahan hukum masyarakat. Untuk pendanaan dan kas ditunjuk seorang BENDAHARA. Kemudian ada satuan khusus yang diberi gelar NCUHI dan NCAWU. Ncuhi dan Ncawu ini bertugas menyerap aspirasi masyarakat Donggo yang dilaporkan ke anggota adat, untuk disampaikan kepada Ketua Adat. Menyerap aspirasi ini termasuk menerima laporan terkait permasalahan hukum. Untuk hukum pidana, diterima oleh Ncawu sedangkan untuk permasalahan hukum lain seperti perdata, perkawinan, waris dan sebagainya ditangani oleh Ncuhi. Struktur Lembaga adat Donggo ini memiliki garis koordinasi dengan DEWAN

SYURO. Dewan Syuro bertugas memberikan masukan kepada OMPU TUA terkait segala hal yang berkaitan dengan masyarakat adat Donggo. Dewan Syuro berisi para sesepuh Donggo dari beberapa tokoh, seperti tokoh agama dan tokoh pendidikan.

Tidak semua masyarakat Donggo berhak masuk dalam kepengurusan Lembaga Adat dan Syari'at Donggo (LASDO), ada beberapa kriteria khusus yang harus terpenuhi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ketua LASDO: "Yang berhak duduk dalam struktur Lembaga adat Donggo adalah penduduk asli Donggo yang dibuktikan dengan silsilah keluarga dan akta kelahiran. Selain itu, yang memiliki garis keturunan Ncuhi Kala dan berdomisili di Donggo. Faktor usia juga tidak bisa dikesampingkan. Minimal usia yang ingin menjadi bagian dari anggota LASDO adalah 40 (empat puluh tahun). Mengingat di usia itu manusia sudah masuk ke tahap kematangan berpikir dan penuh kebijaksanaan dalam bertindak."

Setelah memenuhi kriteria di atas, mekanisme selanjutnya adalah terkait masalah rekrutmen anggota Lembaga adat. Menurut Ketua Lembaga Adat dan Syari'at Donggo, rekrutmen pengurus Lembaga adat Donggo dilakukan secara musyawarah mufakat oleh tokoh-tokoh sesepuh adat dengan Ompu Tua. Hal ini penting karena para tokoh sesepuh paham mengenai asal-usul dan silsilah para anggota yang akan direkrut.

Pergantian kepengurusan Lembaga adat Donggo tidak dibatasi perodesasi sebagaimana masa jabatan Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Presiden dan jabatan politik lainnya. Misalnya masa kepemimpinan presiden dibatasi dalam kurun waktu lima tahun sekali, begitupun Bupati dan Gubernur. Lembaga adat dan syari'at Donggo lebih berpatokan pada sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan dalam Islam. Masa jabatan Ketua Adat ditentukan hingga Ompu tua tutup usia atau meninggal dunia, atau ada alasan lain yang membuat Ompu tua tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Ketua adat LASDO. Hal ini juga berlaku pada struktur keanggotaan lain, seperti Ompu Sampela,

Ncuhi, Ncawu, dan anggota lain. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua LASDO, yaitu sebagai berikut: “Berakhirnya status kepengurusan Lembaga Adat Donggo adalah ketika yang bersangkutan meninggal dunia, atau ada alasan lain yang bersifat pribadi seperti masalah kesehatan, tidak mampu lagi menjalankan tugas, atau pindah domisili ke luar Donggo”

Berdasar keterangan terkait masa jabatan di atas, disatu sisi perlu diapresiasi karena masih mempertahankan kearifan lokal masyarakat Donggo, namun disisi lain menurut penulis hal ini akan membahayakan soliditas masyarakat mengingat ketiadaan kaderisasi dari pengurus LASDO. Apalagi jika kita lihat fenomena demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat Donggo akan terdegradasi jika lembaga adat ini menjalankan kepengurusan yang tidak adil menurut mereka (masyarakat Donggo) sehingga akan bermuara pada terancamnya eksistensi lembaga LASDO ini.

Peran Lembaga Adat Donggo (LASDO) Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Sebagai lembaga adat, yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 eksistensi Lembaga adat dan Syari'at Donggo (LASDO) sangat melekat dengan masyarakat Donggo. Eksistensi itu terkristalisasi dari keterlibatan lembaga adat ini dalam segala aspek kehidupan masyarakat setempat, baik itu masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, hingga berkaitan dengan hubungan dengan ketuhanan dan lingkungan alam. Salah satu keterlibatan LASDO dalam sosial kemasyarakatan adalah terkait persoalan hukum, seperti masalah hukum pidana.

Eksistensi lembaga adat Donggo ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kapolsek Donggo, yaitu sebagai berikut: “Lembaga adat diakui oleh UU keberadaannya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kehadirannya, karena negara kita adalah negara hukum. Kepolisian Donggo sangat berterima kasih kepada LASDO karena mampu meringankan beban kepolisian. Saya harap terus

berkolaborasi. Karena jujur saja, masyarakat disini lebih segan dan lebih menghormati lembaga adat. Sehingga keputusannya sangat dihargai dan diikuti”

Hal senada juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat sekaligus tokoh pendidikan, bernama Makarau yang menyatakan bahwa LASDO terlibat semua dalam permasalahan yang ada di Donggo. Tidak hanya di Donggo timur, melainkan Donggo barat juga.

Permasalahan yang terkait pidana adalah permasalahan yang bersifat publik. Artinya dia bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sangat berpotensi menimbulkan benturan dan konflik ditengah masyarakat apabila masalah pidana ini dirasa merugikan pihak-pihak terkait, misalnya kebuntuan dalam akses menuju keadilan masyarakat ditemui. Oleh karena itu, kehadiran lembaga adat LASDO sangat strategis dalam penyelesaian perkara pidana, baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah Indonesia merdeka seperti sekarang ini. Banyak perkara pidana yang terjadi di lingkup masyarakat Donggo yang ditangani dan diselesaikan oleh lembaga adat LASDO. Namun, kelemahan dari segi administrasi khususnya terkait pendataan jumlah kasus pidana sejak LASDO terbentuk dirasa kurang mampu mendukung hal tersebut.

Segala permasalahan hukum yang terjadi dilingkup kecamatan Donggo, mulai dari masalah perdata, pidana, perkawinan hingga harta warisan hingga sengketa lahan tidak terlepas dari peranan lembaga adat LASDO dalam penyelesaiannya. Peranan tersebut terkristalisasi dari berbagai cara, namun umumnya dilakukan dengan cara mediasi. Lembaga adat LASDO lebih banyak menjadi fasilitator sekaligus *decision maker*, dan apa yang menjadi putusannya akan diterima dengan tangan terbuka oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Untuk perkara pidana, di kecamatan Donggo LASDO memiliki peran strategis dalam penyelesaian tindak pidana. Tindak pidana yang bisa ditangani oleh lembaga adat ini mulai dari kategori ringan hingga kategori berat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua

lembaga adat LASDO: “Jenis tindak pidana yang dapat ditangani LASDO adalah mulai yang bersifat ringan, hingga berat. Seperti pencurian, pemerasan hingga pembunuhan. Selama tindak pidana itu berpotensi menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat, maka LASDO tetap terlibat dalam penyelesaiannya”

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua adat LASDO di atas, peran lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana di kecamatan Donggo adalah lebih kepada menjadi fasilitator dan mediasi antar pihak pelaku dan korban atau keluarga korban. Dalam upaya mediasi dan fasilitator ini Lembaga adat akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Resort Donggo. Pihak LASDO akan memanggil pihak-pihak terkait dalam permasalahan pidana ini, dengan cara mendengarkan posisi kasus baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Pemanggilan ini akan dilakukan diwaktu yang berbeda antara dua pihak terkait.

Setelah mendengar posisi kasus dari kedua belah pihak dalam waktu yang berbeda tersebut, maka langkah selanjutnya dari lembaga adat LASDO adalah dengan melakukan konfrontasi antara pihak korban dan pelaku dalam satu waktu dimana tempatnya adalah di kediaman Ketua Adat LASDO. Hal ini dilakukan agar ditemukan kebenaran materiil sesuai dengan keterangan pihak terkait.

Peran lembaga adat LASDO ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Adat, yaitu sebagai berikut: “Peran Lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana adalah dengan melakukan investigasi serta menelaah posisi kasus serta semua yang terlibat. Misalnya korban, pelaku, serta saksi-saksi jika ada. Namun jika tidak ada saksi yang melihat, cukup dengan saksi korban. Baru kemudian dikonfrontasikan dengan pelaku. Setelah itu, perkara tersebut akan dibicarakan sanksi dan solusinya dalam sidang atau rapat lembaga adat yang dipimpin oleh Ketua LASDO. Biasanya sidang tersebut dilakukan di rumah Ketua adat yang dihadiri oleh Ompu Tua, Ompu Sampela dan Dewan Syuro dan kepala desa asal korban dan pelaku”

Dalam pengambilan keputusan terkait masalah pidana, lembaga adat LASDO dalam hal ini Ompu Tua, Ompu Sampela dan Dewan Syuro akan melakukan sidang tertutup yang dilaksanakan di kediaman Ompu Tua. Kediaman Ompu Tua merupakan tempat menyelesaikan segala persoalan yang bersentuhan dengan lembaga adat LASDO. Hal ini dilakukan secara turun-temurun sejak nenek moyang dulu.

Menurut Ketua Adat LASDO, penyelesaian perkara pidana oleh lembaga Adat ini menggunakan sumber hukum yang berasal dari hukum Islam dan kepercayaan nenek moyang dulu. Adapun mekanisme pengambilan keputusan oleh Lembaga Adat LASDO adalah jika posisi kasus telah ditelaah maka Lembaga adat dibawah Ketua Adat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan jajarannya yaitu Ompu Sampela dan Dewan Syuro. Jika tidak tercapai sebuah keputusan dalam musyawarah, maka diserahkan kepada Ompu Tua (Ketua adat) dalam menentukannya. Hal ini sesuai dengan keterangan Ketua Adat LASDO, yaitu sebagai berikut: “Mekanisme pengambilan keputusan adalah, setelah menelaah posisi kasus maka Lembaga adat dibawah Ketua Adat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan jajarannya yaitu Ompu Sampela dan dewan Syuro. Jika tidak tercapai sebuah keputusan dalam musyawarah, maka diserahkan kepada Ketua adat dalam menentukannya”.

Dalam hal perumusan sanksi pidananya, pihak lembaga adat LASDO akan mengkategorikannya sesuai dengan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Ada dua jenis sanksi pidana yang dikenakan oleh Lembaga Adat LASDO kepada pelaku tindak pidana. *Pertama* sanksinya adalah sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban, dan *kedua* pidana pengganti sesuai dengan kehendak pihak korban atau keluarga korban. Pidana kedua ini dilaksanakan jika pihak korban atau keluarga korban bersedia memberi ma'af kepada pelaku. Umumnya jika perbuatan pidana itu berkategori berat, seperti pembunuhan. Hal ini sebagaimana

yang dikemukakan oleh Ketua Adat LASDO, yakni sebagai berikut: “Jenis sanksi adalah sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Misalnya kalau berat seperti pembunuhan, maka pelaku akan dibunuh kembali kecuali ada pemaafan dari keluarga korban. Jika keluarga korban memberikan maaf, maka pelaku akan diwajibkan menanggung biaya hidup anak atau istri atau suami korban. Jika tindak pidana dikategorikan ringan, seperti pemukulan, penganiayaan maka jenis sanksinya adalah sesuai dengan perbuatan tersebut oleh korban atau pihak keluarga korban”.

Terkait penjatuhan sanksi pidana oleh Lembaga adat LASDO, salah satu tokoh masyarakat bernama Makarau memiliki pendapat yang sedikit berbeda, khususnya terkait masalah efek jera. Beliau menyatakan: “Masyarakat Donggo pada umumnya menaati hukum pidana yang dikenakan oleh lembaga adat LASDO. Tetapi menurut saya, itu tidak terlalu membuat efek jera di lingkup masyarakat. Polisi saya rasa lebih bagus turun tangan, semaksimalnya agar masyarakat yang melakukan pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat di atas, bisa dibenarkan. Mengingat Lembaga adat LASDO tidak memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memaksakan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Setelah dijatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, masalah selanjutnya adalah terkait dengan eksekusi sanksi pidana. Menurut Ketua Adat LASDO, eksekusi sanksi pidana dilakukan oleh korban terhadap pelaku. Namun bisa juga diserahkan kepada keluarga korban atau anggota Lembaga adat. Eksekusinya dilakukan di rumah ketua adat atau di kantor desa asal korban yang disaksikan oleh masyarakat setempat. Lebih lanjut menurut beliau, hal ini lembaga Adat LASDO menerapkan sesuai dengan hukum Islam, dimana eksekusi sanksi pidana disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang lain untuk mengikuti perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut ketua adat LASDO, selama ini belum pernah dijumpai masalah sengketa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, baik dari korban dan keluarganya maupun dari pelaku. Semuanya menerima sanksi yang dijatuhkan secara sukarela. Walaupun dikemudian hari terdapat sengketa penjatuhan sanksi pidana, maka Lembaga Adat LASDO memiliki kewenangan untuk memaksa agar sanksi tersebut diterima. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, yaitu sebagai berikut: “Sebenarnya sengketa pidana adat dalam masyarakat Donggo belum pernah dijumpai. Masyarakat terkait biasanya akan langsung menerima sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu tidak kita jumpai sengketa. Walaupun di kemudian hari ada sengketa, Lembaga adat punya kekuasaan memaksa agar masyarakat menerima sanksi yang dijatuhkan”

Berdasarkan keterangan di atas, tidak ditemukan perselisihan terkait dengan penjatuhan sanksi pidana oleh lembaga adat. Namun disayangkan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme jika terjadi perselisihan terhadap sengketa adat. Ketua adat LASDO hanya memberikan garis besar mengenai upaya pemaksaan yang dilakukan LASDO jika dikemudian hari terjadi perselisihan tersebut.

Tindak Pidana Yang Menjadi Kewenangan Penyelesaian Lembaga Adat Donggo

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana berkategori ringan (Tipiring), maupun tindak pidana yang berkategori berat. Adapun satu contoh tindak pidana ringan adalah pelanggaran lalu lintas, sedangkan tindak pidana berat seperti penganiayaan, pembunuhan, makar dan sebagainya.

Di Kecamatan Donggo, lembaga adat Donggo LASDO juga memiliki peran strategis dalam penyelesaian tindak pidana, baik itu yang bersifat ringan maupun bersifat berat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ketua Adat LASDO yaitu sebagai berikut: “Jenis tindak pidana yang dapat ditangani LASDO adalah mulai yang bersifat ringan, hingga berat. Seperti pencurian, pemerasan hingga pembunuhan. Selama tindak pidana itu berpotensi

menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat, maka LASDO tetap terlibat dalam penyelesaiannya”.

Dari keterangan di atas terlihat keterlibatan LASDO dalam penyelesaian tindak pidana, baik yang bersifat ringan maupun yang berat. LASDO akan terlibat dalam penanganan tindak pidana jika ada penilaian dari pihak LASDO terkait potensi konflik sosial ditengah masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Artinya, meskipun tindak pidana itu bersifat ringan tetapi jika berpotensi menimbulkan *chaos*, maka LASDO akan terlibat dalam penanganannya. Bukan berarti tindak pidana ringan jauh dari potensi konflik ditengah masyarakat. Sebaliknya, belum tentu tindak pidana berat dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial sehingga LASDO harus turun tangan dalam penyelesaiannya.

Menurut Ketua Adat LASDO, penanganan tindak pidana berat teraktual yang melibatkan LASDO adalah pada kasus pengeroyokan yang menyebabkan pembunuhan yang dilakukan beberapa pemuda desa Doridungga terhadap korban bernama Dewa Bakti Negara yang beralamat di dusun 2 desa O’o Kecamatan Donggo pada tahun 2017 lalu. (<http://www.metromini.co.id/2017/06/dewa-tewas-dititik-di-desa-kemunti-desa.html>)

Dalam kasus tersebut LASDO berperan sebagai mediator antara keluarga korban dan para pelaku. Setelah mediasi dilakukan, maka potensi kerusuhan yang semula besar terjadi bisa diminimalisir. Meskipun demikian proses hukum kemudian dilimpahkan kepada kepolisian setempat.

Meskipun LASDO diberi kewenangan untuk terlibat dalam penyelesaian tindak pidana, namun menurut salah satu tokoh masyarakat bernama Makarau, penanganan tindak pidana khususnya yang bersifat berat sebaiknya ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Hal ini berkaitan dengan efek jera yang ditimbulkan serta semakin tergerusnya generasi sekarang menghargai adat-istiadat masyarakat Donggo sebagai efek dari globalisasi. Menurutnya sanksi yang diberikan oleh lembaga Adat LASDO dirasa kurang efektif dalam mencegah dan

menanggulangi tindak pidana berat dikemudian hari. Berikut pernyataan tokoh masyarakat tersebut: “Menurut saya, tidak begitu efektif terutama dalam hal menimbulkan efek jera. Karena masyarakat sekarang kurang begitu menghargai adat-istiadat yang berlaku di masyarakat Donggo karena pengaruh perkembangan zaman. Apalagi jika dihadapkan pada anak-anak remaja sekarang. Hukum pidana Indonesia seperti penjara dan denda saya rasa lebih cocok dan itu bisa menimbulkan efek jera”

Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa penyelesaian tindak pidana sebaiknya diserahkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Donggo. LASDO cukup diberi tugas sebagai fasilitator dalam mempertemukan pihak korban (*victim*) dan (*offender*). Berikut apa yang disampaikan oleh beliau: “Untuk penyelesaian tindak pidana menurut saya lebih baik diserahkan saja ke kepolisian. Biarlah lembaga adat hanya menjadi penghubung antara pelaku dan korban, selebihnya kita serahkan ke kepolisian karena mereka diberi tugas untuk itu oleh negara”

Berangkat dari pendapat di atas, penulis lebih sepatutnya dengan apa yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan selain Kepolisian diberi kewenangan oleh UU, mereka juga dilengkapi dengan SDM yang profesional dan terlatih untuk penanganan tindak pidana. Disamping itu, instrumen hukum yang digunakan jelas, bersifat memaksa dan mengikat bagi siapapun pelanggar hukum. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan hukum itu bisa dengan mudah tercapai yaitu terciptanya *general prevention* dan *special prevention*, yaitu perlindungan bagi masyarakat agar tidak mengikuti tindak pidana yang dilakukan pelaku dan perlindungan dari pelaku tindak pidana agar jangan sampai mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Sinergisitas Lembaga Adat Donggo (LASDO) Dan Aparat Kepolisian Sektor Donggo Dalam Penanganan Tindak Pidana

Penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP melibatkan beberapa institusi penegak hukum, diantaranya Kepolisian. Dalam konteks perkara pidana yang

dilakukan di masyarakat Donggo, lembaga adat dan syari'at Donggo (LASDO) memiliki peran strategis dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan LASDO masih diakui eksistensinya, baik oleh masyarakat Donggo, institusi penegak hukum maupun pemerintahan setempat. Dengan kata lain, polisi sebagai aparat penegak hukum sebagaimana amanat KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum Nasional memang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menangani perkara pidana dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Namun disisi lain tidak bisa mengesampingkan Lembaga adat LASDO. Eksistensi lembaga adat Donggo ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kapolsek Donggo yaitu sebagai berikut: "Sebenarnya saya baru bertugas di Donggo. Tapi menurut keterangan anggota yang telah lama bertugas, memang disini LASDO sangat diakui keberadaannya. Termasuk dalam hal menangani masalah pidana yang dilakukan di Donggo".

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat sekaligus tokoh pendidikan bernama Makarau yang menyatakan bahwa eksistensi LASDO khususnya dalam penanganan perkara pidana masih diakui.

Berangkat dari adanya lembaga adat LASDO disatu sisi dan keberadaan Kepolisian disisi lain, perlu adanya kolaborasi dan sinergisitas antara dua lembaga tersebut khususnya dalam penanganan perkara pidana. Ketua Lembaga adat LASDO menyatakan bahwa: "Sinergisitas antara LASDO dan kepolisian biasanya dilakukan jika menyentuh keamanan pelaku tindak pidana. Biar bagaimanapun, pelaku juga perlu mendapat perlindungan. Namun, apabila korban atau keluarga korban dan pelaku sudah menerima sanksi yang diberikan oleh LASDO, maka perkaranya tidak akan dilanjutkan ke kepolisian. LASDO dengan pertimbangan tersebut akan memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk tidak melanjutkan kasus ke tahap berikutnya"

Meskipun tidak ada *Standart Operating Procedure* (SOP) yang tertulis mengenai pembagian ranah penanganan perkara pidana oleh LASDO dan Kepolisian Resort Donggo, namun antara kedua lembaga ini saling

menghormati dan menghargai satu sama lain. Hal ini sebagaimana menurut Ketua adat LASDO, yaitu sebagai berikut: "Tidak ada SOP yang tertulis. Hanya mengandalkan komunikasi dan musyawarah yang intens antara LASDO dan kepolisian. Dan Alhamdulillah, selama ini berjalan lancar. Karena antara LASDO dan kepolisian saling menghargai keberadaan dan fungsi satu sama lain"

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Kapolsek Donggo. Beliau menyatakan: "Sebetulnya tidak ada dasar hukum tertulis antara LASDO dan Polsek Donggo dalam pembagian penanganan kasusnya. Kedua lembaga ini saling mengisi satu dengan yang lain. Polsek Donggo menghormati lembaga adat dan begitupun lembaga adat Donggo menghormati Kepolisian Resort Donggo. Itulah modal dasar kami dalam berinteraksi. Artinya disini berlaku hukum yang tidak tertulis, yang notabene berlaku dalam masyarakat adat".

Sinergisitas dan kolaborasi antara Lembaga Adat LASDO dan Kepolisian Resort Donggo sebenarnya sering diimplementasikan dalam kasus-kasus tertentu khususnya kasus pidana. Teraktual adalah sinergisitas penanganan kasus yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Kasus tersebut bermula dari pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya korban atas nama Dewa Bakti Negara warga dusun 2 Desa O'o Kecamatan Donggo. Pada kasus tersebut pelaku sangat sulit ditemukan oleh pihak kepolisian karena dianggap melarikan diri atau terkesan disembunyikan oleh keluarga pelaku. Hal tersebut menyebabkan kemarah luar biasa dari pihak korban serta masyarakat O'o pada umumnya sehingga berpotensi menimbulkan konflik ditengah masyarakat. LASDO berbekal kedekatan emosional dengan masyarakat Donggo melakukan pendekatan khusus kepada pihak keluarga pelaku. Setelah melalui negosiasi yang panjang, akhirnya pelaku menyerahkan diri ke pihak LASDO dan Kepolisian setempat.

Pelaku yang berjumlah beberapa orang tersebut kemudian diamankan di kediaman ketua adat Donggo, sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian dan babinsa setempat. Hal ini dilakukan atas pertimbangan menghindari

konflik dan main hakim sendiri oleh masyarakat setempat terhadap pelaku. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kapolsek Donggo yaitu sebagai berikut: “Antara LASDO dan Kepolisian sektor Donggo pada prinsipnya saling menghormati satu sama lain. Kedua lembaga saling berkolaborasi. Terkadang pendekatan oleh LASDO kepada pelaku tindak pidana lebih diterima oleh masyarakat setempat, jika pelaku mencoba melarikan diri. Polisi memanfaatkan hal itu untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus. Mungkin masyarakat takut ditangani kepolisian, padahal hal tersebut bukan menjadi alasan yang dibenarkan. Karena tugas polisi itu adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Kolaborasi terakhir dari kami dan LASDO dalam perkara pidana adalah ketika kasus pembunuhan pemuda desa O’o atas nama Dewa Bakti. LASDO dengan perannya seperti mediasi dengan pihak keluarga pelaku agar tidak melarikan diri. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa terkadang pendekatan LASDO terhadap pelaku atau korban di Donggo ini lebih diterima oleh warga dibanding kita di kepolisian. Untuk menghindari amukan massa, maka pelaku kemudian diserahkan oleh pihak LASDO ke kami selaku kepolisian untuk diproses sebagaimana mestinya”

Sinergisitas antara Lembaga Adat Donggo dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana di Donggo terjalin sangat harmonis, meskipun tidak ada aturan tertulis mengenai hal itu. Tidak ada perselisihan atau sengketa dalam pembagian penanganan kasus pidana, tentunya dengan beberapa pertimbangan seperti eskalasi potensi konflik yang berpotensi terjadi dari tindak pidana yang telah dilakukan. Pernyataan ini diperkuat oleh Kapolsek Donggo, sebagaimana di bawah ini: “Sejauh saya menjadi Kapolsek disini belum dijumpai sengketa kewenangan. Jika terjadi tindak pidana seperti pemukulan dan penganiayaan akibat kenakalan remaja, biasanya itu cukup dibina oleh LASDO dan Babinsa setempat. Namun, upaya akan diamankan di polsek Donggo apabila ada kekhawatiran terjadinya aksi masa atau balas dendam dari pihak korban atau pelaku”

Lebih lanjut Kapolsek Donggo mengatakan bahwa: “Disini prinsip saling menghormati dan menghargai sangat kental. Jika dirasa Polisi perlu turun tangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, serta di P21 maka itu dilakukan. Tentunya harus mendengarkan pemaparan dan pertimbangan LASDO. Namun jika tidak, maka cukup diselesaikan oleh LASDO saja”.

Kehadiran Lembaga Adat LASDO dalam membantu kepolisian dalam penanganan perkara khususnya pidana sangat positif. Artinya disatu sisi penegakan hukum sesuai hukum positif Indonesia tetap berjalan, disisi lain tidak melupakan Lembaga adat yang merupakan kristalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) yang harus tetap dijaga eksistensinya. Apalagi ditengah upaya pembentukan Undang-Undang yang baru dalam ranah R-KUHP dan R-KUHAP sebagai *Ius Constituendum*. Kita tidak melupakan dari mana asal kita, tetap dimunculkan ke-Indonesiaan-an ditengah gempuran globalisasi, termasuk dalam dunia hukum kita.

Sinergisitas dan kolaborasi semacam ini layak dijaga dan dipertahankan, mengingat hukum adat merupakan hukum yang tetap hidup di masyarakat (*living law*). Ketua Lembaga adat LASDO, Kapolsek Donggo dan tokoh masyarakat Donggo masing-masing sepakat akan hal ini. Kapolsek Donggo berpendapat, sebagaimana hasil wawancara dengan peneliti, yaitu sebagai berikut: “Perlu harus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat Donggo adalah masyarakat yang sangat menghormati adat-istiadatnya, juga lembaga adatnya. Disinilah simbiosis mutualisme terwujud antara LASDO dan Polsek Donggo. Meskipun kelak KUHP dan KUHAP diperbaharui, agar pemerintah tidak melupakan eksistensi hukum adat atau hukum pidana adat dalam pasal-pasal nya. Karena jujur, kami disini sangat terbantu dengan keberadaan LASDO”

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Adat Donggo, yakni sebagai berikut: “Kami sebagai masyarakat adat, khususnya Donggo sangat berharap kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap mengakui keberadaan kami serta memberikan ruang yang seluas-

luasnya agar hukum adat kami bisa tetap berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Donggo khususnya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2007
Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 23 Tahun
2007
Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana;
memahami tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana sebagai syarat
pidanaaan*. Yogyakarta : Rangkang Offset.
Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam
Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan
Konsep Penyusunan KUHP Baru*, edisi
1, ctk-2, Jakarta: Kencana.
Hilman Hadikusuma. 2002. *Pengantar Hukum
Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum
Pidana Adat*, Bandung: PT Eresco.
Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-dasar Hukum
Pidana edisi 2*. Medan: USU Press.
Moh Koesno. 1974. *Catatan Terhadap Hukum
Adat Dewasa ini*. Surabaya: Erlangga
University Press.
P.A.F. Laminanting. 1996. *Dasar-dasar Hukum
Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya
Bhakti.
Rancangan KUHP Nasional edisi tahun 2008.
Saragih. 1994. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.
Bandung : Transito.
Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukuman Pidana*.
Bandung: Alumni.
Ter Haar Bzn. 2001. *Asas-asas dan Susunan
Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: Sinar Grafika.

Kajian Geo Homestay Kawasan Geopark Tambora

Zulharman¹, Ibnu Khaldun Sudirman², Asriyadin³

¹STKIP Taman Siswa Bima

¹zhul_one@yahoo.co.id

ABSTRAK

Homestay adalah sebuah rumah tinggal yang berada di dekat kawasan wisata yang berfungsi untuk penginapan sementara bagi wisatawan untuk melihat dari dekat kehidupan sehari-hari masyarakat, melihat pemandangan, dan bahkan menjalani kehidupan seperti penduduk lokal. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui model pengelolaan homestay yang ada di kawasan geopark Tambora Kabupaten Bima dan Dompu, Provinsi NTB. Penelitian dilaksanakan di kawasan Geopark Tambora yang terdiri dari wilayah Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai Juni 2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan rasionalistik dengan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara snowball, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang meliputi jurnal, buku dan media internet. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Geopark Tambora terdiri dari 10 geosite utama yang memiliki daya tarik wisata. Potensi wisata pada setiap geosite berbeda-beda sehingga memerlukan konsep geohomestay yang mencerminkan potensi pada setiap geosite. Terdapat 7 kawasan utama sebaran geo homestay yang akan dikelola berdasarkan criteria antara lain akses, jarak antar geosite, pemukiman dan fasilitas penunjang geo homestay. Perancangan kawasan geo *homestay* harus memperhatikan unsur-unsur kandungan lokal seperti rumah-rumah penduduk serta budaya dan tradisi yang ada untuk diterapkan dalam tema geo homestay.

Kata kunci : Homestay, Geopark, Tambora

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara *megabiodiversity* nomor dua di dunia setelah Brasil memiliki banyak kekayaan alam berupa flora, fauna maupun keindahan alam. Kondisi demikian menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata potensial bagi para wisatawan yang merupakan petualang-petualang yang ingin menikmati keindahan alam Indonesia dan ingin mengetahui lebih banyak tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Potensi ini harus dapat direspon dengan strategi pengembangan kawasan potensial sebagai daerah tujuan wisata yang dapat memberikan nilai ekonomi secara nasional maupun bagi masyarakat local dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem yang ada (Fandeli, 2005:3).

Salah satu upaya potensial yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya dan alam

dalam bingkai pariwisata adalah dengan membuat *geopark*. Konsep *geopark* ini berfungsi sebagai daerah tujuan wisata yang dapat mengakomodasi fenomena pariwisata yang berorientasi pada keanekaragaman atau keindahan alam dan budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dewi (2011) yang mengatakan, “Dengan keunggulan branding daya tarik wisata Indonesia yang berbasis alam dan budaya, maka pembangunan destinasi yang berkelanjutan menjadi pilihan yang strategis untuk membangun kepariwisataan Indonesia sekaligus merespon tren eco-wisatawan yang semakin menguat.”

Geopark, geotourism, geoconservation atau taman bumi adalah strategi manajemen geoheritage berbasis pada ide bahwa sumber geologi memiliki nilai tinggi terhadap keilmuan dan pariwisata serta resiko ancaman kerusakan dari aktivitas manusia (Gray, 2005). Konservasi

geopark yaitu pelestarian yang dinamis dan diyakini akan meningkatkan daya tarik turis untuk berkunjung dan 9 nilai geosaintifiknya yaitu meningkatnya fitur geologi dan morfologi, proses, situs dan specimen (Burek 2014).

Pengembangan dan pengelolaan geopark telah dibuktikan oleh Cina menghasilkan devisa Negara mencapai US\$ 90 juta pada tahun 2004 (Xun. 2007). Pendapatan ini bersumber dari pengembangan ekonomi berbasis wisata (lingkungan dan social budaya) dan membuka dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk 5000 orang. Pengembang geopark di NTB menjadi penting dikarenakan sesuai dengan misi Provinsi NTB menjadi tujuan wisata dunia. Amphitheater geopark Tambora, bukit serta padang savana dan lingkungan alam di kawasan Tambora menghasilkan pemandangan yang eksotis sehingga menjadikan kawasan ini berpotensi untuk dijadikan cagar alam geologi dan hayati. Saat ini keberadaan sumber daya alam hayati dikawasan geopark Tambora semakin terancam dengan meluasnya kerusakan hutan dan berpotensi berdampak pada kepunahan spesies prioritas. Aktivitas penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat juga menambah buruk kerusakan cagar alam geologi dikawasan ini dan kelestarian lingkungan. Dalam upaya kelestarian warisan alam amphitheater geopark Tambora mutlak diperlukan pola aktivitas konservasi geologi dan biologi (geoconservation) serta pemberdayaan masyarakat lokal meliputi bidang social, budaya, ekonomi yang mendorong terciptanya upaya pelestarian sumber daya alam yang berkesinambungan. Cara yang paling efisien untuk mencapai geoconservation adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang situs geoheritage (keilmuan, estetika, pendidikan, kebudayaan pariwisata, ekonomi dan intrisik) dikawasan geopark Tambora.

Untuk menunjang pemenuhan fasilitas pariwisata di kawasan geopark Tambora yang menarik dan ramah lingkungan, sehingga perlu dikembangkan pondok penginapan bagi wisatawan yang berkunjung dalam bentuk homestay. Minat wisatawan sekarang ini cenderung memilih wisata yang bernuansa alam.

Mereka lebih santai dengan menikmati pemandangan alam sekitar. Pemerintah sekarang lebih mengembangkan kegiatan pariwisata alam (UNESCO. 2009).

Pariwisata tinggal bersama atau homestay' semakin populer sekarang ini. bukan saja di kalangan rakyat setempat tetapi juga wisatawan mancanegara sehingga mampu mendorong jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata. Dalam konsep hamestay para wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan dipersembahkan dengan suasana kehidupan kampung yang damai yang jarang diperoleh oleh masyarakat yang sudah terbiasa hidup di kota atau negara-negara yang sudah maju. Untuk mewujudkan dan menampilkan konsep pariwisata agrowisata, setiap wisatawan yang menginap di situ bukan saja dapat menikmati keindahan alam yang natural tetapi juga dapat menimba pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di kawasan geopark Tambora untuk menganalisis sebaran dan pengelolaan homestay berdasarkan kondisi kekayaan geopark Tambora.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah kawasan Geopark Tambora yang meliputi 8 desa yang termasuk dalam kawasan inti Geopark Tambora yaitu desa Kadindi, desa Tambora, desa Oi Bura, desa Labuan Kananga, Desa Kawinda Toi, Kawinda Na,e dan Piong. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai Juni 2018. Alat dan bahan yang digunakan : alat tulis menulis,, *tally sheet*, panduan wawancara, meteran, sedangkan alat pelengkap lainnya *tape recorder*, komputer beserta perlengkapannya, peta, kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini : data-data dokumen pendukung penelitian seperti data demografi dan lahan. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode pembahasan dan perumusan konsep. Pemilihan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball* (bola salju) dengan

terlebih dahulu menentukan informan kunci (*Key Informan*) yang dianggap memiliki kecukupan informasi mengenai masyarakat dan kebudayaan di daerah penelitian (Singarimbun, 2010). Informan kunci bisa saja merupakan tokoh adat setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa pimpinan kelompok masyarakat seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun. Tokoh masyarakat yang telah hidup lama dan menjadi yang dituakan atau mengerti seluk beluk tradisi masyarakat secara umum maupun secara khusus. Setelah informan kunci ditentukan, sesuai dengan istilahnya, teknik *snowball* diterapkan dengan cara “menggulir” informasi yang ditemukan sehingga dapat menuntun peneliti menuju informan lainnya yang mampu memberikan informasi/data yang dicari. Untuk menganalisa data ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Menurut Maryaeni (2005:75) analisis merupakan kegiatan: (1). Pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh; (2). Pengorganisasian data dalam formasi, kategori, ataupun unit perian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti; (3). Interpretasi peneliti berkenaan dengan signifikansi butir-butir ataupun satuan data sejalan dengan pembahasan yang ingin diperoleh; (4). Penilaian ataupun satuan data sehingga membuahkan kesimpulan baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, signifikan atau tidak signifikan.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti sifat umum dalam tahapan penelitian kualitatif menurut Usman dan Akbar (2006) sebagai berikut : (1) Mereduksi data, yakni merumuskan secara singkat dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan informasi/data yang ditemukan di lapangan; (2) Penyajian data, yakni memaparkan informasi/data dalam sebuah tulisan sesuai dengan data yang telah direduksi pada tahap analisis pertama, dan tahap terakhir adalah; (3) Penarikan kesimpulan, yakni menentukan pokok jawaban sesuai dengan sajian data dilakukan pada tahap kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Potensi Geopark Tambora

Berdasarkan pengamatan langsung dari lapangan menggambarkan bahwa Taman Nasional Tambora sudah berarali fungsi menjadi wahana wisata. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan wisatawan yang selalu meningkatkan setiap tahunnya. Dilihat dari statusnya Taman Nasional Tambora pada dasarnya di jadikan Cagar Alam, Suka Margasatwa dan Taman Buru. Yang di mana pada tempat tersebut mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang keberadaanya perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang memiliki keunikan tersendiri dan dikelola melalui sistem zonasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam selain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Penetapan atau penunjukan suatu kawasan menjadi taman nasional harus memenuhi kriteria antara lain : memiliki luasan yang cukup, memiliki ekosistem asli/unik serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Potensi wisatawan yang menuju pendakian gunung tambora memiliki 4 jalur pendakian yaitu: Jalur Pancasila, Jalur Kawinda To'i, Jalur Kore, Jalur Doropeti. Menurut hasil survey yang telah dilakukan bahwa jalur pancasila merupakan jalur yang banyak dilewati oleh para pendaki Gunung Tambora. Sebelum mendaki melewati jalur ini, terlebih dahulu pendaki akan memasuki Dusun Pancasila, Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kondisi jalur pancasila cukup landai akan tetapi jarak dari desa pancasila tersebut ke puncak Gunung Tambora sekitar kurang lebih 20 km. Jalur pancasila memiliki 5 pos dan kondisi topografi yang sangat curam akan ditemui setelah melewati pos 5. Jenis vegetasi yang dapat dijumpai di jalur pancasila yaitu vegetasi hutan alam, hutan cemara, dan akan ditemukan bunga edelweiss di bibir kaldera. Jalur pancasila tidak terdapat savana seperti jalur-jalur lainnya. Hanya saja saat melewati pos, akan dijumpai bukit-bukit yang

ditumbuhi rumput dan bunga edelweiss. Hutan alam yang terdapat pada jalur ini memiliki tingkat kerapatan tajuk yang cukup tinggi mulai dari tumbuhan bawah sampai pohon. Sumber air yang ada di jalur ini yaitu berada di pos 1 dimana sumber air tersebut merupakan salah satu sumber air yang dapat digunakan untuk menghidupi kebutuhan desa pancasila. Selain itu sumber air juga ada di pos 2 yaitu berupa sungai yang tidak terlalu lebar, relatif dangkal dan jernih. Sumber air juga dapat ditemukan di pos 3 dengan intensitas yang sedikit karena air tersebut mengalir setetes demi setetes. Sumber air lainnya yaitu kumbangan yang ada disekitar pos 5 dan biasanya digunakan untuk minum satwa liar yang ada di sekitarnya. Jalur pancasila sangat terkenal dengan kopi kopi tambora, dikarenakan terdapat kebun kopi di perbatasan antara desa dengan jalur menuju puncak gunung Tambora (Maksim. 2015).

Potensi Produk Wisata Kawasan Geopark Tambora

Didasarkan atas perbedaan morfografi, morfogenesis dan morfokronologi, dipisahkan menjadi : Morfologi Vulkanik Tua, terdapat di sekitar Gunung Labumbum, dicirikan dengan tingkat erosi sedang-kuat, batuan pembentuk berupa lava dan endapan aliran piroklastik yang sudah mengalami pelapukan tingkat lanjut; Morfologi Perbukitan Sedimen, terdapat di sebelah utara Gunung Tambora, dicirikan dengan pola aliran sungai relatif paralel dengan tingkat erosi sedang-kuat, batuan penutup berupa batu gamping; Morfologi Tambora, menempati bagian tengah daerah penelitian, memperlihatkan bentuk kerucut terpancung. Pada bagian puncaknya terdapat kaldera berdiameter 6 x 7 km dengan kedalaman kaldera sekitar 900-1.100 meter. Dasar kaldera merupakan daerah datar yang terkadang digenangi air dan dibagian selatan tenggaranya terdapat kerucut kecil Doro Api Toi (Zulharman, 2017).

Wisata Alam

Karakteristik bentang lahan yang umumnya berupa areal pengunungan dengan tutupan vegetasi rapat memiliki kelerengan sedang

sampai curam serta adanya peninggalan sejarah akibat letusan yang terjadi pada tahun 1815, maka objek daya tarik wisata alam yang dapat dikembangkan di kawasan Gunung Tambora antara lain : **Kaldera** : Gunung Tambora merupakan salah satu dari tiga gunung api aktif selain Gunung Rinjani dan Gunung Sangiang. Gunung Tambora terbentuk awalnya pada 200 juta tahun yang lalu dimana gunung ini hanya berupa aliran lava kawah pusat yang membentuk gunung api perisai dengan ketinggian + 1.800 mdpl dengan volume 200 m³. **Jungle Tracking** : Menjelajah hutan merupakan salah satu bentuk wisata berbasis alam. Kegiatan menjelajah hutan atau sering dikenal dengan nama jungle tracking dapat dilakukan di kawasan Gunung Tambora. Kegiatan ini didukung kondisi tutupan vegetasi yang masih cukup rapat dengan kondisi sekitar jalur penjelajahan yang cukup sejuk dan nyaman. Kegiatan jungle tracking tersebut dapat dilakukan pada empat pintu pendakian yaitu Piong (Kore), Kawinda toi, Doroncanga dan Pancasila. **Wisata Tirta** : Kawasan Gunung Tambora memiliki tutupan vegetasi yang cukup rapat dan merupakan daerah tangkapan air bagi daerah sekitarnya. Karena merupakan daerah tangkapan air maka di kawasan Gunung Tambora terdapat beberapa alur sungai salah satunya adalah sungai Oi Marai yang ada di Desa Kawinda Toi. **Wisata Minat Khusus** : Kondisi kawasan dengan potensi alam yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai objek daya tarik wisata membuat kawasan yang saat ini berstatus sebagai Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Buru ini memiliki peluang pengembangan pariwisata yang sangat menjanjikan (Seubsamarn, 2009). **Wisata Ilmiah** : Selain wisata alam, wisata alam dan wisata minat khusus, kawasan Gunung Tambora juga bisa dikembangkan sebagai pusat wisata ilmiah seperti interpretasi jenis tumbuhan dan atau satwa yang ada di kawasan Gunung Tambora.

Adapun matrik kegiatan wisata yang dapat dikembangkan di kawasan Gunung Tambora sebagai berikut :

Tabel 1. Matrik Kegiatan Wisata Yang Dapat Dikembangkan di Kawasan Gunung Tambora

No	Jenis Wisata	Bentuk Kegiatan	Sarana
1	Wisata alam	Jungle Treking Berkemah Photo Hunting Rekreasi Bersepeda Outbond Animal watching Atraksi Rusa	Jalan trail wisata, jalan setapak, MCK, bangku, Lapangan terbuka, arena bermain, shelter, menara pengawas, fasilitas outbond, mushola, sepeda, binokuler, tenda
2	Wisata tirta	Mandi di sungai Susur sungai Bird watching	Shelter, MCK
3	Wisata minat khusus	Spritual keagamaan Acara adat lokal Pentas seni dan budaya	Shelter, menara pengawas, aula, teater terbuka
4	Wisata ilmiah	Studi tour Studi banding Penelitian	Pustaka konservasi, stasiun penelitian, perlengkapan audio visual
5	Wisata budaya	Terdapat 2 jenis Rimpu, yaitu Rimpu Pida (digunakan oleh gadis) dan Rimpu Ampe (digunakan oleh wanita yang sudah menikah) Ritual budaya dan upacara	Situs budaya

Sumber: Hasil Identifikasi tahun 2018

Kajian Geohomestay

Homestay merupakan fasilitas yang harus disediakan pada kawasan wisata geopark karena pengunjung ingin menikmati serta berbaur dengan kondisi alam, budaya dan sosial masyarakat di kawasan geopark. Oleh Karena itu pola persebaran homestay harus mendukung

Sebaran Homestay Di Geopark Tambora

Sebaran homestay yang ada di kawasan Geopark Tambora yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Sebaran Homestay Yang Ada

No	Nama Homestay	Jumlah	Bentuk	Letak	Pemilik
1	Homestay Pribadi	3	Kost-kostan	Doro Peti	
	Homestay Pribadi	4	Kost-kostan	Kadindi	
2	Calabai	4	Kost-kostan	Calabai	
3	Homestay Kamsul	1	Rumah Gazebo	Desa Tambora	Kamsul
4	Homestay Pondok Petualang	1	Rumah Gazebo	Desa Tambora	Saiful
5	Homestay pribadi	1	Rumah Gazebo	Labuan Kananga	H. Suaeb
6	Homestay pribadi	1	Rumah Gazebo	Kawasan KTM	H. Suaeb
7	Homestay Pondok Konservasi	1	Rumah Gazebo	Kawinda To.i	TNT
8	Homestay Dole	1	Rumah Tinggal	Piong	Dole

Secara umum fasilitas yang ada pada beberapa homestay yang ada masih standart dan masih belum mencerminkan homestay yang berbasis Geopark. Kebanyakan homestay masih dikelola secara konvensional dan ala kadarnya dengan manajemen tunggal oleh masing-masing pemilik

setiap geosite yang ada yaitu disetiap geosite harus ada homestay yang tersedia dan terdapat informasi mengenai geosite tersebut sehingga pengunjung yang menginap dapat memperoleh informasi keseluruhan geosite yang dikunjungi pada homestay yang ditinggali.

homestay. Rata-rata biaya sewa homestay berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 250.000 per hari dengan fasilitas kamar mandi, ruang tidur seta makanan yang berbayar. Berdasarkan beberapa konsep dapat disimpulkan bahwa menurut Lashley dan Morrison pada akomodasi *homestay*

terdapat akomodasi *farmstay*, beberapa fasilitas hotel kecil, keluarga pemilik serta tempat tidur dan makanan di mana wisatawan atau tamu membayar langsung atau tidak langsung untuk tinggal di rumah-rumah pribadi tersebut. Menurut Lynch pada akomodasi *homestay*, ruang privat dalam rumah dibuka menjadi ruang publik, berbeda dari akomodasi lain yang ruang privatnya hanya terbuka bagi staf saja. Rivers menyatakan bahwa pada akomodasi *homestay* utilitas dan makanan biasanya disertakan, lama menginap bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tidak terbatas kecuali ditentukan oleh pemilik rumah.

Letak dan sebaran *homestay* belum berbasis geosite geopark yang ada sehingga belum memperhitungkan jarak dengan atraksi wisata dan antar atraksi serta konektivitas antar atraksi serta fasilitas umum. Sebaran *homestay* masih bersifat acak serta masih sangat minim informasi tentang keberadaannya baik di media internet maupun papan reklame.

Pola Sebaran dan Profil kawasan Geohomestay Berbasis Geosite

Fenomena geologi di kawasan Gunungapi Tambora cukup beragam, mulai dari bukti aktivitas vulkanik baik pra ataupun pasca letusan 1815, singkapan batuan dan fosil, pulau kecil, danau, pantai dan air terjun. Sebaran *homestay* mengikuti potensi dan sebaran geosite yang ada

Adapun berikut ini merupakan tabel analisis pemilihan *site* perancangan kawasan:

Tabel 3. Pertimbangan Pemilihan *Site* Perancangan *homestay*

Sebaran <i>homestay</i> pada kawasan geosite utama	Kelebihan
1	+ Keseluruhan lahan adalah lahan kosong berupa kebun + Sumber air berlimpah dan dan tidak pernah kering di kawasan
2	+ Banyak terdapat lahan adalah lahan kosong berupa kebun + Sumber air berlimpah dan dan tidak pernah kering di kawasan + Terdapat permukiman penduduk + Dekat dengan perkampungan + Terdapat akses dermaga
3	+ Terdapat beberapa area lahan kosong pada area pinggir permukiman + Sumber air berlimpah dan dan tidak pernah kering di kawasan + Terdapat permukiman + Terdapat sirkulasi jalan + Terdapat sumber aliran listrik PLN
4	+ Banyak terdapat lahan adalah lahan kosong berupa kebun + Terdapat sirkulasi jalan + Terdapat sumber aliran listrik PLN

sehingga aksesibilitas setiap geosite dengan *homestay* yang ada masih terjangkau serta informasi atau model *homestay* disesuaikan dengan geosite yang berada di dekatnya.

Pembahasan eksternal merupakan analisis terkait hubungan bangunan terhadap lokasi dan lingkungan sekitar. Analisis eksternal terdiri atas beberapa sub bagian analisis yaitu berupa analisis lokasi, perletakan, orientasi, sirkulasi, vegetasi dan *zoning* pada kawasan. *Site* perancangan berada di seluruh geosite Geopark Tambora. Lokasi perancangan kawasan *homestay* dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai. Berdasarkan tinjauan teori tentang *homestay*, adapun kriteria lokasi perancangan adalah sebagai berikut: 1) Umumnya berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai potensi wisata, misalnya tempat-tempat dengan pemandangan alam yang indah seperti pantai, pegunungan, tepi sungai, tepi danau; 2) Berada di tempat-tempat yang jauh dari pusat kota khususnya tidak dirusak oleh keramaian kota, lalu lintas padat dan bising serta polusi udara; 3) Berdekatan dengan daerah yang memiliki atraksi wisata dan kegiatan rekreasi karena merupakan tuntutan utama pasar dan berpengaruh pada harganya; 4) Perancangan *homestay* terletak di lokasi dengan potensi-potensi alam yang menarik dan kondisi lingkungan khas agar potensi tersebut dapat lebih dioptimalkan pada rancangan.

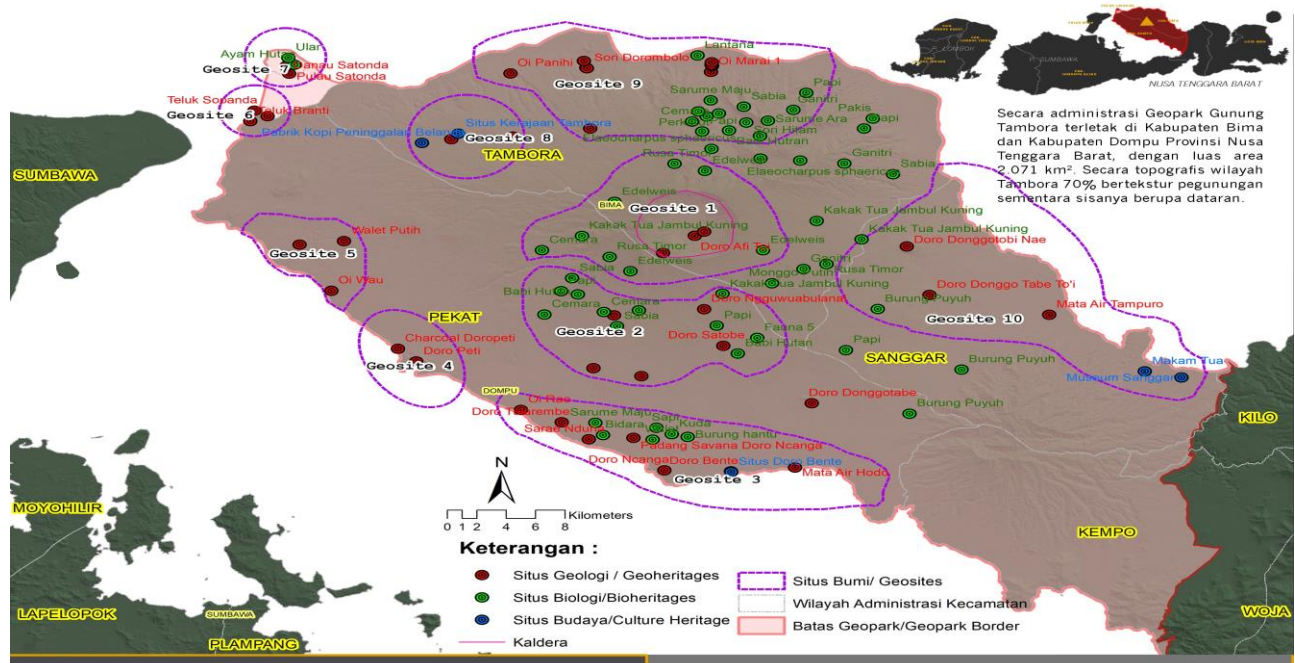
5	+ Terdapat permukiman penduduk + Terdapat sirkulasi jalan beton + Terdapat sumber aliran listrik PLN
6	+ Banyak terdapat lahan adalah lahan kosong berupa kebun + Terdapat sirkulasi jalan + Terdapat sumber aliran listrik PLN
7	+ Banyak terdapat lahan adalah lahan kosong berupa kebun + Terdapat sirkulasi jalan + Terdapat sumber aliran listrik PLN

Sumber: Penulis, 2018

Berdasarkan pertimbangan lokasi tersebut maka perancangan kawasan *homestay* lebih di tempatkan pada kawasan 7 Geosite utama. Hal ini dikarenakan 7 geosite merupakan daerah potensial yang memilikikases baik dan berdekatan dengan geosite pendukung disekitarnya dan dapat dimanfaatkan untuk perancangan akomodasi ,selain itu lokasi berbatasan langsung dengan perkampungan serta terdapat akses jalan raya dan air bersih yang sangat diperlukan dalam pertimbangan perancangan bangunan komersial (Nabillah, 2018).

Pada setiap *homestay* memuat informasi yang berkaitan dengan antara lain sebagai berikut : 1) Tema geologi sesuai dengan potensi geosite yang

ada di sekitarnya. Tema geologi ini disesuaikan dengan potensi atraksi geosite dapat yang menjadi basis *homestay* yaitu terdapat 7 basis *homestay* berdasaran aksesibilitas dan jarak antar geosite; 2) Informasi geologi setiap geosite yang ada pada sekitar *homestay*. Informasi yang terdapat pada setiap *homestay* harus berbasis potnsi geosite yang ada di sekitarnya; 3) Bentuk penyajian informasi geologi pada setiap *homestay* berbasis geosite. Bentuk penyajian informasi dapat berupa peta titik geosite, foto-foto geosite serta majalah atau poster yang mendeskripsikan potensi geosite yang ada.



Gambar 1. Peta sebaran geosite geopark tambora sebagai referensi sebaran geohomestay



Gambar 2. Peta sebaran atraksi wisata geopark tambora sebagai referensi sebaran geohomestay
Sebaran homestay berdasarkan akses terhadap geosite antara lain:

Deskripsi dan Profil kawasan Geohomestay Pada Geosite 1 (Doro Peti)

GEOSITE 1

Kaldera

Gunung Tambora dengan kaldera hasil letusan mahadasyat tahun 1815 merupakan warisan geologi yang menjadi inti kawasan Geopark Gunung Tambora. Letusan dahsyat tersebut mengeluarkan material vulkanik yang menutupi langit sehingga mengakibatkan kegelapan sepanjang tahun di penjuru dunia. Tahun ini dikenal sebagai "*year without summer*". Letusan ini juga memusnahkan dan mengubur dua Kerajaan berbudaya tinggi di lereng Gunung Tambora yaitu Kerajaan Pekat dan Kerajaan Tambora serta menyisakan setengah penduduk Kerajaan Sanggar.

Pada dasar kawah muncul gunung api baru Doro Afi Toi (Gunung Api kecil) yang terus tumbuh, dan adakalanya memuntahkan material hingga tahun 1913. Kebanyakan aktivitas setelah itu adalah letusan *phreatic*/uap air. Selain itu, pada dasar kaldera Gunung Tambora juga terdapat danau hijau kekunginan, yang disebut sebagai Moti Lahalo. Pada tahun 2013 danau bertambah luas, mencapai panjang 1.200 m, lebar 500 m dan kedalaman 10 m. Warisan hayati di sekitar kawasan ini didominasi oleh Edelweis, Pohon Cemara, Rusa Timor, dan Burung Kakak Tua Jambul Kuning.



KALDERA



DORO AFI TO'I



DANAU KAWAH



EDELWEIS



POHON CEMARA



RUSA TIMOR



BURUNG KAKAK TUA JAMBUL KUNING

Gambar 3. Potensi atraksi wisata pada geosite 1



Gambar 4. Potensi atraksi wisata pada geosite 2

Berdasarkan gambar 3 dan 4 di atas bahwa potensi yang ada pada geosite 1 dan 2 merupakan potensi primer kawasan geopark tambora, oleh karena itu harus didukung dengan fasilitas homestay agar wisatawan dapat menikmati atraksi pada geosite tersebut dalam waktu beberapa hari karena sangat luas. Letak homestay pada geosite 1 ini harus berada pada setiap jalur pendakian gunung Tambora karena atraksi wisata pada geosite 1 ini antara lain Kaldera, Doro Api Toi, Danau Kawah, Bunga Edhelweuis, Pohon Cemara sepanjang jalur pendakian Pancasila dan Kawinda Toi dan

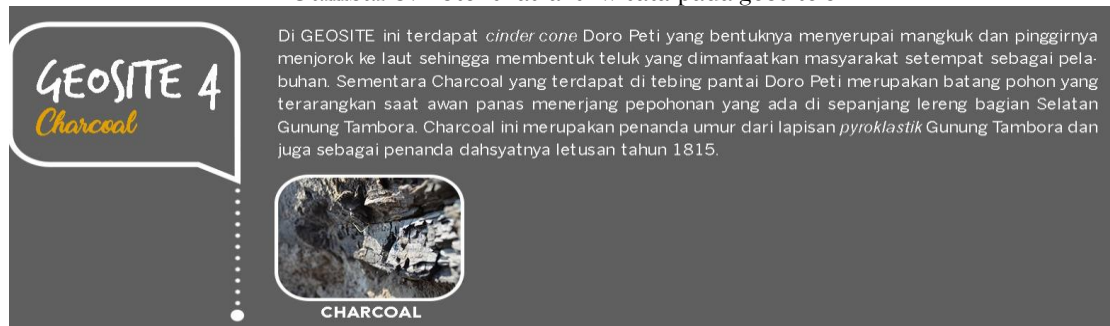
Atraksi Fauna. Pada geosite 2 tersebar pada sisi selatan gunung tambora yang terdiri dari padang savanna doro ncanga, doro satobe, atraksi fauna dan pemandangan sepanjang jalur pendakian Doro Ncanga

Oleh karena itu konsep hoestay yang ditampilkan harus memuat informasi-informasi mengenai kekhasan dari setiap atraksi yang ada pada geosite 1 dan geosite 2 tersebut sehingga para pengunjung yang menginap dapat mengetahui seluk beluk geosite 1 secara keseluruhan.

Deskripsi dan Profil kawasan Geohomestay Pada Geosite 3, 4 dan Geosite 5 (DORO NCANGA)



Gambar 5. Potensi atraksi wisata pada geosite 3



Gambar 6. Potensi atraksi wisata pada geosite 4



Gambar 7. Potensi atraksi wisata pada geosite 5

Kabupaten Dompu memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi wisatawan. Salah satunya Pantai Sarae Nduha atau biasa disebut sebagai Pantai Ombo. Pantai ini tidak jauh dari Doro Ncanga atau Gunung Tambora. Banyak wisatawan lokal yang berkunjung, terutama pada saat akhir pekan. Pantai ini terletak di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan belakangan menjadi destinasi utama

wisatawan lokal. Lokasinya pun sangat mudah dijangkau. Apalagi pemandangannya sangat indah dan akan memanjakan siapa saja yang datang. Pantai ini juga dikelilingi oleh tebing. Di atasnya wisatawan dapat mendirikan tenda. Sangat cocok dijadikan sebagai destinasi untuk berlibur bersama keluarga. Pantai ini memiliki panorama yang indah dan sangat cocok dijadikan sebagai spot swafoto.

Deskripsi dan Profil kawasan Geohomestay Pada Geosite 6 (CALABAI)



Gambar 8. Potensi atraksi wisata pada geosite 6

Deskripsi dan Profil Kawasan Geohomestay Pada Geosite 7 (Pulau Satonda)



Gambar 9. Potensi atraksi wisata pada geosite 7

Berbagai pemandangan di Danau Pulau Satonda adalah terumbu karang, serta ikan kecil. Beberapa kegiatan wisata yang bisa dilakukan seperti *snorkeling*, *scuba diving* serta keadaan lingkungan laut yang masih alami. Motivasi Pengunjung Terhadap Pengembangan Ekowisata di Danau Pulau Satonda sebagian besar dari

pengunjung menyatakan bahwa motivasi yang mendorong untuk mengunjungi Danau Pulau Satonda yaitu dengan keindahan alam seperti danau air asin, menyelam yang dapat mengapung keatas ketika mandi di Danau Pulau Satonda dan keindahan terumbu karang serta keunikan dari danau satonda (yaitu pohon ritual).

Deskripsi dan Profil kawasan Geohomestay Pada Geosite 8 (Pancasila)



Gambar 10. Potensi atraksi wisata geosite 8

Geosite 8 merupakan kawasan bekas kerajaan tambora masa lampau. Kawasan geosite 8 ini terdapat berbagai macam situs sejarah peradaban kerajaan tambora serta menjadi salah satu jalur pendakian yaitu jalur pendakian pancasila. Home stay pada jalur pendakian pancasila ini terdapat 2 homestay yang sudah ada dan sudah terkonsep dengan baik. Fasilitas yang disediakan cukup memenuhi standar homestay, dimana pengunjung langsung tinggal pada kamar-kamar rumah gazebo yang berada dipekarangan rumah

pemilik homestay. Namun homestay ini belum memiliki konsep pengelolaan yang baik sesuai dengan tema geopark atau geosite yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan konsep pengelolaan yang berbasis geosite sehingga tersedia berbagai macam informasi yang berkaitan dengan geosite yang berada di sekitarnya serta penyiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan para pengunjung.



Gambar 11. Homestay pondok petualang geosite 8 (Dusun Pancasila)

Deskripsi dan Profil kawasan Geohomestay Pada Geosite 9 (Kawinda To.i)



Gambar 12. Potensi atraksi wisata geosite 9

Pada geosite 9 merupakan kawasan utara gunung tambora yang berada pada kecamatan tambora kabupaten bima. Potensi atraksi wisata yang ada antara lain air terjun oi oanihi, oi marai dan terdapat jalur pendakian Kawinda Toi. Leleh karena itu ada geosite 9 memerlukan homestay sebagai tempat transit dan menginap bagi pengunjung yang akan menikmati atraksi wisasat pada geosite 9 ini. Lokasi penginapan atau homestay dapat ditempatkan pada beberapa titik sesuai dengan aksesibilitasnya terhadap atraksi wisata tersebut yaitu di kawinda na,e dan kawasan KTM Tambora serta di kawinda toi. Kawinda toi merupakan salah satu jalur pendakian tambora terdapat pula pos Taman Nasional Gunung Tambora. Homestay pada kawasan geosite 9 ini dapat dibuat sesuaikan

dengan ciri khas masyarakat setempat, dimana masyarakat banyak berprofesi sebgai pencari madu di hutan serta pengembala ternak. Oleh karena itu cirri khas informasi yang harus ada pada homestay adalah berbagai macam tentang kondisi mayarakat baik budaya maupun sosial ekonomi serta aspek sejarah dan interaksi masyarakat dengan alam sekitar.

Deskripsi Kawasan Utama geosite 9 (Kawinda To,i) sebagai konsep tema/informasi homestay

Desa Kawinda To'i memiliki 5 dusun yang sudah di tetapkan dan 1 dusun yang belum tapi akan di tetapkan. 5 dusun yang disebutkan tersebut yaitu dusun Kawinda, dusun Labau, dusun Katupa, dusun Dana kala, dusun Oi marai dan dusun Sori na'e.

Deskripsi dan Profil kawasan Geohomestay Pada Geosite 10 (PIONG)



Gambar 13. Potensi atraksi wisata pada geosite 10 (Sanggar)

Potensi Atraksi Pendukung Homestay Dan Tema Homestay Geosite 10

Tabel 4. Objek/Destinasai Potensial di Sanggar

No	Obyek Wisata	Lokasi	Potensi atraksi wisata
1	Pantai Piong	Desa Kore	Wisata Bahari, Pantai Pasir putih, Camping Ground, Wisata Kuliner
2	Savana Piong	Desa Kore	Wisata Adventure
3	Pantai Boro	Desa Boro	Wisata Bahari, Pantai Pasir putih, Wisata Kuliner
4	So Loka	Desa Boro	Wisata Bahari, Pantai Pasir putih
5	Dermaga Kore	Desa Kore	Dermaga transportasi laut
6	Benteng Lainomos	Desa Boro	Bangunan kuno, Wisata Sejarah
7	Mata Air Puntti Moro	Desa Kore	Wisata alam, Wisata budaya
8	Mata Air Tampuro	Desa Piong	Wisata alam, Wisata budaya
9	Mata Air Kalero	Desa Boro	Wisata alam, Wisata budaya
10	Mata Air Towan	Desa Boro	Wisata alam, Wisata budaya
11	Rade Nae	Desa Boro	Cagar Budaya, Wisata Sejarah
12	Istana Kore	Desa Kore	Cagar Budaya, Wisata Sejarah
13	Makam Raja Sanggar	Desa Kore	Cagar Budaya, Wisata Sejarah
14	Mata Air Campa Rimpu	Desa Kore	Wisata alam, Wisata budaya

15	Pasar Sanggar	Desa Kore	Pasar tradisional
16	Labu Bili	Desa Piong	Pantai, Wisata Alam
17	Doro Sagolo	Desa Boro	Wisata Alam, Spot photo
18	Museum Kerajaan Sanggar	Desa Kore	Wisata Sejarah, Edukasi
19	Pacuan Kuda Pantai	Desa Sandue	Wisata Adrenaline, Olahraga
20	Dermaga Kore	Desa Kore	Wisata Alam, Pantai

Kerangka Teknis Model Bangunan Dan Tata Kelola Geohomestay Di Geopark Tambora

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas terdapat 7 sebaran kawasan homestay yang layak dikembangkan pada geopark tambora. pengembangan geohomestay pada kawasan geopark Tambora setidaknya haru ememnuhi standar bangunan homestay yang layak dan mengutamakan kenyamanan. adapun kerangka teknis model bangunan dan tata kelola geohomestay tambora diuraikan sebagai berikut:

Rumah :

Memiliki paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar yang khusus untuk disewakan. Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. Kondisi yang bersih dan terawat dilengkapi dengan Kunci kamar, Kaca rias, kursi, dan meja kecil, Lemari atau tempat meletakkan pakaian, Lampu penerangan, Tempat sampah, Kipas angin, Wifi, Informasi geologi (hiasan dinding), Alat ibadah, Kelambu, Menu sarapan pagi. Tempat tidur tertata dengan rapi dilengkapi dengan Bantal dengan sarungnya, Sprei, Selimut/bed cover, Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan desain yang seragam, Terdapat informasi contact person dan alamat, Lampu pada papan nama, Kamar mandi dilengkapi dengan: Gantungan handuk, Tempat sampah, Kloset duduk, Tempat penampungan air, Saluran pembuangan air yang lancar, Air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau tamu yang menginap, Sabun cair dan tempat sabun yang menempel di tembok, Papan peta/informasi geologi di teras rumah, Booklet/leaflet informasi geosite/geopark Tambora. Dalam hal tersedia peralatan makan dan minum maka berada dalam kondisi bersih dan aman bagi tamu, sebagian terbuat dari bahan alam. Tersedia air minum, Kondisi dalam keadaan bersih dan terawatt, Dilengkapi peralatan dapur yang bersih, terawat, dan

berfungsi dengan baik., Dilengkapi bak tempat cuci yang bersih dan terawatt, Dilengkapi dengan saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik, Dilengkapi sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan, Dilengkapi tempat sampah tertutup ramah lingkungan, Tersedia air bersih yang diperlukan untuk membersihkan peralatan dapur serta peralatan makan dan minum.

Pelayanan:

Online (situs web, aplikasi online), Telepon, Pesan langsung/datang langsung, Buku tamu yang berisi informasi: Nama tamu, Alamat tamu, No KTP/Passport/SIM, Status perkawinan, Tujuan kunjungan, Datang dari mana, tempat tujuan kunjungan, Lama kunjungan. Sistem pembayaran tunai, Pembersihan lingkungan rumah tinggal dilakukan satu hari dua kali (pagi dan sore), Sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan terpadu (lingkungan). Pembersihan kamar tamu: Dilakukan setiap pagi hari (merapikan, menyapu, mengepel), Mengganti perlengkapan tempat tidur sesuai permintaan tamu, Tersedia informasi no telp penting: kantor polisi, pemadam kebakaran, rumah sakit/ambulans, puskesmas, no kontak pemilik homestay.

Dilakukan pengecekan terhadap peralatan dan fasilitas dalam homestay yang akan digunakan oleh tamu 1 (satu) jam sebelum tamu datang.

Tata tertib tamu selama tinggal di homestay, tersedia di setiap kamar, Tata cara penggunaan alat-alat dalam homestay, Mekanisme kompensasi yang diberikan atas keluhan tamu, Kertas kesan dan saran, dilengkapi informasi: 1) Nama tamu; 2) Alamat dan kontak email/telepon; 3) Kesan; 4) Saran

Pengelolaan:

Area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana, Pengadministrasian

pencatatan data identitas tamu terdokumentasi secara komputerisasi, Tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya.

Memiliki peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Menerapkan unsur Sapta Pesona meliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah, Mampu menjelaskan informasi geologis di wilayahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, adapun beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu: 1) Kawasan geopark tambora terdiri dari 10 geosite utama yang memiliki daya tarik wisata; 2) Potensi wisata pada setiap geosite berbeda-beda sehingga memerlukan konsep geohomestay yang mencerminkan potensi pada setiap geosite; 3) Terdapat 7 kawasan utama sebaran geo homestay yang akan dikelola berdasarkan criteria antara lain akses, jarak antar geosite, pemukiman dan fasilitas penunjang geo homestay; 4) Perancangan kawasan geo homestay harus memperhatikan unsur-unsur kandungan lokal seperti rumah-rumah penduduk serta budaya dan tradisi yang ada untuk diterapkan dalam tema geo homestay.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2017. Deskripsi Taman Nasional Tambora. Balai Taman Nasional Tambora
- Burek, 2014. Geoheritage in Europe and its Conservation, W.A.P. Wimbledon, S. Meyer-Smith (Eds.) . Proceedings of the Geologists' Association. Volume 125, Issue 3, July 2014, Pages 362-363
- Fandeli, C. 2002. "Perencanaan Pariwisata Alam" Penerbit Kerjasama PT Perhutani dan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.
- Gray Murray. 2005. Geodiversity: developing the paradigm. Proceedings of the Geologists' Association Volume 119, Issues 3-4, 2008, Pages 287-298
- Home Enterprise and Host : a United Kingdom Perspective. International Jurnal of Hospitality Management 24 (533-553). Edinburgh : Elsevier.*
- Keli, Maksimus. 2015. *Potensi Gunung Tambora*. Online. <http://forest-maxs.blogspot.co.id/2015/06/potensi-gunung-tambora.html>. Akses 23 September 2017.
- Maryaeni.2005. *Op.cit* Hlm.75
- Meliono, I. (2011). Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education. *International Journal for Historical Studies*, Vol. 2(2), hal. 221-234.
- Nabillah, G. (2018). Perancangan Homestay di Desa Wisata Nglinggo dengan Pendekatan Arsitektur Tropis dan Penerapan Konsep Edukatif dan Komunikatif SKRIPSI. UII JOGJAKARTA.
- Singarimbun, M dan Effendi. 2010. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Yogyakarta.
- Seubsamarn, K. 2009. *Tourist Motivation to Use Homestay in Thailand and Their Satisfaction Based on The Destination's*
- UNESCO. 2009. UHJAK/2009/PI/H/9. *Ekowisata : Panduaan Dasar Pelaksanaan*. Jakarta : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Usman, H dan Akbar, P.S. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Zulharman, 2017. Kearifan Lokal dan Strategi Pengembangan Ekowisata Tambora. Penelitian tidak dipublikasikan.

Penerapan Metode *Problem Solving* dalam Meningkatkan Hasil Belajar PPKn

Andriana¹, Nunung Nugrahawati², Huriah Rachmah³

¹Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pabuaran Subang

²Sekolah Dasar Negeri 4 Ciharashas Bandung Barat

³STKIP Pasundan Cimahi

¹andriana100481@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan penggunaan metode *problem solving* pada pembelajaran PPKn di kelas VIII E SMP Negeri 1 Pabuaran Subang. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII E yang berjumlah 40 orang siswa, yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi dan refleksi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn dengan penggunaan metode *problem solving* pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Pabuaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada siklus I adalah rata-rata 74,98 ada di bawah KKM yang ditetapkan sekolah dengan nilai 75. Sedangkan hasil belajar pada siklus II sebesar 80,03 ada di atas KKM. Jadi hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Pabuaran Subang dengan metode *problem solving* dari siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan

Kata kunci: Metode *problem solving*, hasil belajar, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Pada kehidupan yang modern dan serba canggih seperti saat ini, pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat mencetak manusia-manusia berkualitas yang akan mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dalam pasal 20 UU tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Dalam mencapai tujuan pendidikan ini, pemerintah menggagas diberlakukannya kurikulum baru yaitu kurikulum 2013.

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrument untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warganegara yang demokratis, bertanggung jawab. (Kemdikbud, 2014, p. 4)

Seorang pendidik harus mampu memahami makna pendidikan dan mengaplikasikannya dalam dunia pendidikan. Kemampuan peserta didik dalam proses belajar mengajar mempengaruhi tujuan dan hasil belajar peserta didik. Sehingga model pembelajaran yang digunakan juga harus mengacu pada standar

kompetensi yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Kojong, 2017)

Hasil belajar mengajar dikelas mempunyai tujuan yang bersifat transaksional, artinya diketahui secara jelas oleh guru dan peserta didik. Tujuan tercapai jika peserta didik memperoleh hasil belajar seperti yang diharapkan di dalam proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan gambaran tingkat penguasaan peserta didik terhadap sasaran belajar pada topik bahasan yang dipelajari, kemudian diukur dengan berdasarkan jumlah skor jawaban benar pada soal yang disusun sesuai dengan sasaran belajar. Hasil belajar menurut Nawari (Placeholder1p. 5), diartikan sebagai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Keberhasilan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri peserta didik maupun faktor dari luar diri peserta didik. Berkenaan dengan ini menurut Wasliman (Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 2013, p. 13) hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi Antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal.

Masih rendahnya hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) disebabkan oleh masih dominannya skill menghafal dari pada skill memproses sendiri pemahaman suatu materi. Selama ini, minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran PPKn masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada sikap peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran tidak focus dan ramai sendiri. Bahkan ada sebagian peserta didik yang menganggap mata pelajaran PPKn tidak begitu penting dikarenakan tidak masuk pada mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional (UN). Faktor minat itu juga dipengaruhi oleh adanya metode mengajar yang digunakan guru dalam menyampaikan materi. Metode yang konvensional seperti menjelaskan materi secara abstrak, hafalan materi dan ceramah dengan komunikasi satu arah, yang

aktif masih didominasi oleh pengajar, sedangkan peserta didik biasanya hanya memfokuskan penglihatan dan pendengaran. Kondisi pembelajaran seperti inilah yang mengakibatkan peserta didik kurang aktif dan pembelajaran yang dilakukan kurang efektif. Disini guru dituntut untuk pandai menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga peserta didik kembali berminat mengikuti kegiatan belajar.

Setiap proses belajar dan mengajar ditandai dengan adanya beberapa unsur Antara lain tujuan, bahan, alat, dan metode, serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang tidak bias dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mengantarkan bahan pelajaran agar sampai kepada tujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, metode pembelajaran sangat penting sebab dengan adanya metode pembelajaran, bahan dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. (Putra, Putra, & Suara, 2014)

Selain itu penggunaan metode pembelajaran yang mengajarkan peserta didik dalam pemecahan masalah, terutama pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari masih kurang. Pengembangan metode pembelajaran tersebut sangat perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan keterampilan pemecahan permasalahan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Metode pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah kegunaannya adalah untuk merangsang berfikir dalam situasi masalah yang kompleks. Dalam hal ini akan menjawab permasalahan yang menganggap sekolah kurang bias bermakna dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Penggunaan metode dalam pembelajaran sangat diutamakan guna menimbulkan gairah belajar, motivasi belajar, merangsang peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Melalui metode problem solving diharapkan dapat lebih mempermudah pemahaman materi pelajaran yang diberikan dan nantinya dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang selanjutnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*) kolaborasi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIII E SMP Negeri 1 Pabuaran pada bulan April - Mei 2018. Subjek Penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII E SMP Negeri I Pabuaran Subang dengan jumlah 40 peserta didik.

Proses tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dijelaskan Sebagai berikut: a) Tahap Perencanaan, pada tahap ini dimulai dari mengajukan surat ijin observasi kepada kepala sekolah. Kemudian peneliti bekerjasama dengan guru Mapel PPKn menemukan masalah dan kemudian merancang tindakan yang dilakukan; b) Tahap Pelaksanaan Tindakan, tahap kedua penelitian ini adalah implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat. Kegiatan guru pada tahap ini yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah direncanakan dalam beberapa siklus; c) Tahap Pengamatan, tahap ketiga penelitian adalah observasi, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh peneliti. Peneliti melakukan pengamatan ketika tindakan berlangsung, mencatat apa yang terjadi dalam proses pembelajaran agar memperoleh data yang akurat serta hasil dari kegiatan pengamatan dapat dijadikan masukan ketika guru melakukan refleksi untuk penyusunan rencana ulang untuk memasuki siklus berikutnya; d) Tahap Refleksi, kegiatan yang dilakukan pada saat refleksi adalah melakukan analisis, dan mengevaluasi atau mendiskusikan data yang diperoleh selama proses pelaksanaan. Jika belum sesuai dengan indikator dan hasil yang diinginkan, maka peneliti melanjutkan siklus berikutnya sehingga dapat mencapai hasil optimal dalam rangka meningkatkan hasil belajar PPKn.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan, observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi guru, tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar peserta didik, terutama hasil kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan

pengajaran. Sedangkan dokumentasi terkait dengan penelitian beserta pengambilan foto saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tes hasil belajar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data awal yang diperoleh peneliti adalah melakukan penelitian dengan menggunakan hasil tes. Data tersebut digunakan sebagai patokan awal sebelum dilakukan tindakan. Adapun data awal sebelum tindakan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data Awal Pra Siklus

No	Nama	Nilai
1	Amelia	80
2	Ani Aprilia	80
3	Asep Saepul Rohman	68
4	Astri Wulandari	72
5	Bunga Rismayanti	80
6	Darsih	70
7	Dede Shepiyadi	70
8	Fajar Salim	70
9	Febrian Reihan Falerian	72
10	Indra Ar Maulana	66
11	Kartika Putri	78
12	Lelasari	74
13	Lilis Marwati	81
14	Maya Apriliani	82
15	Maya Ismayanti	80
16	Mira Rahayu	74
17	Mohamad Irpan Maulana	70
18	Muh Jaini Ikhsan	72
19	Muhamad Ardiansyah	70
20	Muhamad Haikal Zein	72
21	Muhamad Mansur Habibi	70
22	Muhamad Pebri	70
23	Muhamad Rian Tiarno	68
24	Noviyatul Salwa	80
25	Putri Nadila Ramadhani	80
26	Putri Solehatul Badriah	80
27	Ratih Nurmalasari	80
28	Rendi Maulana	68
29	Rendi Surya Arwansyah	70
30	Rico Dharma Rahayu	70
31	Riki Purnama	70
32	Riza Puadi	66

33	Rudi Julian	70
34	Ryan Rahmat Hidayat	68
35	Saepul Mahri	68
36	Selawati	80
37	Shifa Sakinah	80
38	Suresih	78
39	Wahyu	70
40	Yanti Rahmawati	74

Kriteria	Nilai Prasiklus	
	Jumlah	%
Tuntas	16	35
Belum Tuntas	24	65
Rata-rata	73,53	

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan dengan waktu 3 jam pelajaran. Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 16 April 2018 dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. Pelaksanaan penelitian ini adalah guru.

Tabel 2. Nilai Hasil Belajar Siklus I

No	Nama	Nilai
1	Amelia	81
2	Ani Aprilia	81
3	Asep Saepul Rohman	72
4	Astri Wulandari	73
5	Bunga Rismayanti	81
6	Darsih	72
7	Dede Shepiyadi	72
8	Fajar Salim	70
9	Febrian Reihan Falerian	72
10	Indra Ar Maulana	68
11	Kartika Putri	80
12	Lelasari	78
13	Lilis Marwati	81
14	Maya Apriliani	81
15	Maya Ismayanti	81
16	Mira Rahayu	78
17	Mohamad Irpan Maulana	72
18	Muh Jaini Ikhsan	72
19	Muhamad Ardiansyah	72
20	Muhamad Haikal Zein	72
21	Muhamad Mansur Habibi	72
22	Muhamad Pebri	72
23	Muhamad Rian Tiarno	70
24	Noviyatul Salwa	81
25	Putri Nadila Ramadhani	81

26	Putri Solehatul Badriah	81
27	Ratih Nurmalasari	80
28	Rendi Maulana	70
29	Rendi Surya Arwansyah	70
30	Rico Dharma Rahayu	70
31	Riki Purnama	70
32	Riza Puadi	70
33	Rudi Julian	75
34	Ryan Rahmat Hidayat	70
35	Saepul Mahri	70
36	Selawati	81
37	Shifa Sakinah	81
38	Suresih	79
39	Wahyu	71
40	Yanti Rahmawati	76

Kriteria	Nilai siklus 1	
	Jumlah	%
Tuntas	18	45
Belum Tuntas	22	55
Rata-rata	74,98	

Dari hasil belajar tersebut dapat dilihat peserta didik yang tuntas sebanyak 18 peserta didik sebesar 45 % dan yang belum tuntas sebanyak 22 peserta didik atau sebesar 55 % dengan rata-rata sebesar 74,98. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PPKn peserta didik kelas VIII E yaitu masih rendah dan belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Tabel 3. Perbandingan Nilai Pra Siklus dan Siklus I

Kriteria	Nilai Pra Siklus		Nilai siklus 1	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Tuntas	14	35	18	45
Belum Tuntas	26	64	22	55
Rata-rata	73,53		74,98	

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa terjadi peningkatan dari nilai pra siklus ke siklus I. Peserta didik yang tuntas pada pra siklus sebanyak 14 peserta didik atau sebesar 35 % menjadi 18 peserta didik atau sebesar 45 % pada siklus I. peserta didik yang belum tuntas pada pra siklus sebanyak 26 peserta didik atau sebesar 64 % menjadi 22 peserta didik atau sebesar 55

% pada siklus I, sedangkan nilai rata-rata pada pra siklus 73,53 menjadi 74,98 pada siklus I.

Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin, 14 Mei 2018 dengan alokasi waktu 3 x 35 menit.

Tabel 4. Nilai Hasil Belajar Siklus II

No	Nama	Nilai
1	Amelia	85
2	Ani Aprilia	81
3	Asep Saepul Rohman	76
4	Astri Wulandari	77
5	Bunga Rismayanti	85
6	Darsih	78
7	Dede Shepiyadi	78
8	Fajar Salim	73
9	Febrian Reihan Falerian	78
10	Indra Ar Maulana	75
11	Kartika Putri	84
12	Lelasari	83
13	Lilis Marwati	85
14	Maya Apriliani	85
15	Maya Ismayanti	85
16	Mira Rahayu	83
17	Mohamad Irpan Maulana	77
18	Muh Jaini Ikhsan	78
19	Muhamad Ardiansyah	78
20	Muhamad Haikal Zein	78
21	Muhamad Mansur Habibi	80
22	Muhamad Pebri	80
23	Muhamad Rian Tiarno	76
24	Noviyatul Salwa	84
25	Putri Nadila Ramadhani	82

26	Putri Solehatul Badriah	84
27	Ratih Nurmalasari	85
28	Rendi Maulana	78
29	Rendi Surya Arwansyah	80
30	Rico Dharma Rahayu	78
31	Riki Purnama	76
32	Riza Puadi	76
33	Rudi Julian	80
34	Ryan Rahmat Hidayat	78
35	Saepul Mahri	76
36	Selawati	84
37	Shifa Sakinah	84
38	Suresih	82
39	Wahyu	76
40	Yanti Rahmawati	80

Kriteria	Nilai siklus II	
	Jumlah	%
Tuntas	39	97,5
Belum Tuntas	1	2,5
Rata-rata	80,03	

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa peserta didik yang tuntas sebanyak 39 peserta didik atau sebesar 97,25% peserta didik yang belum tuntas sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 2,50 % dengan nilai rata-rata 80,03. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PPKn peserta didik kelas VIII E pada siklus II sudah mengalami peningkatan dari nilai rata-rata pra siklus dan siklus I. peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus II sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Tabel 5. Perbandingan Hasil Belajar Nilai Pra siklus, Siklus I dan Siklus II

Kriteria	Nilai Pra siklus		Nilai Siklus 1		Nilai Siklus 2	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tuntas	14	35	18	45	39	97,5
Belum Tuntas	26	55	22	65	1	2,5
Rata-rata	73,53		74,98		80,03	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai hasil belajar peserta didik meningkat dari nilai pra siklus ke siklus I dan siklus II. Peserta didik yang tuntas pada nilai pra siklus sebanyak 14 peserta didik atau sebesar 35 % menjadi 18 peserta didik atau sebesar 45 % pada siklus I dan mencapai 39 peserta didik atau sebesar 97,5 % pada siklus II. Peserta didik yang belum tuntas

pada nilai pra siklus sebanyak 26 peserta didik atau sebesar 55 % menjadi 22 peserta didik atau 65 % pada siklus I dan mencapai 1 peserta didik atau sebesar 2,5 % pada siklus II. Sedangkan nilai rata-rata pada nilai pra siklus sebesar 73,53 menjadi 74,98 pada siklus I dan mencapai 80,03 pada siklus II.

Pembahasan

Model pembelajaran *problem solving* adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dalam usaha mencari pemecahan/jawaban oleh peserta didik (Mbulu, 2001, p. 52) Penyelesaian masalah menurut Johnson dan Johnson dalam Thobrani dan Musthofa dilakukan melalui kelompok. (Musthofa & Thobrani, 2011). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *problem solving* adalah suatu metode yang merangsang peserta didik agar berfikir kritis, mampu menganalisa suatu persoalan sehingga sampai menemukan pemecahannya. Oleh karena itu, metode *problem solving* ini merupakan metode yang dapat membantu peserta didik untuk dapat membedakan masalah, untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat dan membantu peserta didik untuk membuat, memberikan dan mengambil keputusan dilihat dari hasil pengamatan ataupun observasi yang telah peneliti lakukan pada siklus I dan siklus II dapat diketahui tingkat aktivitas belajar peserta didik mengalami perubahan. Suasana kelas lebih baik dari sebelumnya., aktivitas peserta didik mengalami kemajuan terlihat dari semakin banyaknya peserta didik yang turut aktif dalam proses pembelajaran.

Model pembelajaran *problem solving* ini dilaksanakan di kelas VIII E SMP Negeri I Pabuaran Subang yang berjumlah 40 siswa. Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai tahapan pelaksanaan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian yang dilakukan ini memfokuskan pada pembelajaran PPKn dengan menggunakan model *problem solving* sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Materi pembahasan yaitu tentang Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI.

Pada Siklus I hasil belajar belum mencapai KKM, dikarenakan sebagian siswa masih belum berpartisipasi pada kerja kelompok, sebagian siswa belum bertanggungjawab pada kerja kelompok, siswa masih belum aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, waktu yang diberikan oleh guru untuk melakukan diskusi, presentasi

dan evaluasi terlalu singkat. Sehingga langkah selanjutnya peneliti dan guru menyusun rencana perbaikan pada siklus II, adapun perbaikan pada siklus II ini berpedoman pada hasil refleksi pada siklus I. Sehingga pada pertemuan pertama guru kembali membentuk kelompok. Hal ini penting dilakukan untuk membuat siswa terbiasa bekerja kelompok dan mau bekerja sama dengan siswa lain, setiap siswa dalam kelompok diberi soal wajib harus dikerjakan sehingga siswa akan berpartisipasi dalam kelompok, peneliti dan guru

menentukan waktu pelaksanaan tindakan siklus II yaitu dengan mengubah presentasi kelompok. Pertemuan pertama lima kelompok yang presentasi dan dilanjutkan dengan penjelasan guru. Tiga kelompok berikutnya presentasi pada pertemuan kedua. Pada observasi terhadap guru dalam melaksanakan penerapan strategi *problem solving* menunjukkan bahwa guru telah menerapkan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah *problem solving*. Dengan menggunakan model *problem solving* dalam pembelajaran PPKn selama 2 siklus telah menunjukkan peningkatan hasil belajar PPKn di kelas VII E SMP Negeri I Pabuaran Subang

Ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran siklus I ke siklus II. Hal diatas dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa yaitu nilai rata-rata kelas pada nilai pra siklus sebesar 73,53. Kemudian pada siklus I menjadi 74,98 dan pada siklus II menjadi 80,03. Jumlah siswa mampu mencapai KKM 75 pada nilai pra siklus ada 14 siswa, pada siklus I ada 18 siswa, dan pada siklus II ada 39 siswa. Berdasarkan hasil observasi pada nilai pra siklus siswa masih kurang atau masih rendah hal ini di karenakan sebagian besar siswa belum menguasai atau memahami materi pembelajaran yang ada. Sehingga siklus I hasil belajar siswa mulai terlihat meskipun yang terlibat aktif dalam mengerjakan diskusi kelompok hanya beberapa siswa. Namun pada siklus II guru merencanakan lebih memotivasi agar siswa yang belum berani, belum aktif, dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Sehingga hasil belajar siswa lebih meningkat.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari siklus I sampai siklus II dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model *problem solving* dapat meningkatkan hasil belajar PPKn siswa kelas VIII E SMP Negeri I Pabuaran Subang.

KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu simpulan yaitu penggunaan metode *problem solving* dapat meningkatkan hasil belajar PPKn siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Pabuaran Subang. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada siklus I dengan rata-rata sebesar 74,98 dan ketuntasan individual sebanyak 18 orang. Pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa sebesar 80,03 dan ketuntasan individu sebanyak 39 orang. Jadi hasil belajar siswa dari siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 Pabuaran Subang adalah masih melekatnya kebiasaan siswa menerima pelajaran dari guru dengan metode ceramah, dan mengerjakan tugas-tugas yang berpatokan pada Lembar Kerja Siswa/Modul.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemdikbud. (2014). *Modul Pelatihan Kurikulum 2013*. Jakarta: Puskur Kemdikbud.
- Kojong, T. K. (2017). Peningkatan Hasil Belajar PKN Melalui Penerapan Model Problem Solving. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Mbulu, J. (2001). *Pengajaran Individual Pendekatan Metode Dan Media Pedoman Mengajar Bagi Guru Dan Calon Guru*. Malang: Yayasan Elang Emas.
- Musthofa, A., & Thobrani, M. (2011). *Belajar dan Pembelajaran Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putra, M. D., Putra, I. M., & Suara, I. M. (2014). Model Pembelajaran Problem Solving Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar PKN Kelas V SD Gugus Srikandi Denpasar. *e-*

Journal Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha.

Susanto, A. (2013). *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Penada Media Grup.

Tradisi *Nika Leka* Pasa Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Tati Haryati¹, A. Gafar Hidayat²

^{1,2}STKIP Taman Siswa Bima

¹tatiharyati031@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *nika leka* di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan fenomena yang berkaitan dengan tradisi *Nikah Leka* sebagai salah satu tradisi kultural dalam adat perkawinan masyarakat Bima. Teknik pengumpulan data meliputi: wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *nika leka* adalah tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai upacara perkawinan yang mewah dikarenakan alasan ekonomi. Proses pelaksanaannya antara lain: a) Pada proses lamaran *nika leka*, dilaksanakan hanya oleh kalangan keluarga dekat yang terdiri dari kedua orang tua dengan disaksikan oleh ketua RT dilingkungan tempat tinggal mereka; b) jumlah mahar diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga calon mempelai laki, jadi pihak mempelai perempuan tidak memaksakan mahar yang tinggi pada keluarga laki-laki; c) *Mbolo Weki*, adalah salah satu acara yang tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh keluarga pasangan *nika leka*. Acara ini merupakan acara pemberian sumbangan oleh keluarga dan warga masyarakat setempat untuk telesenggaranya sebuah acara pernikahan. Jumlah dana *mbolo weki* yang terkumpul biasanya tidak terlalu banyak, dana tersebut dipergunakan untuk menambah biaya pernikahan; d) Ritual pernikahan ini diawali dengan acara *dende*, acara *dende* ini dilakukan di malam hari yaitu dimana pengantin laki-laki diarak menuju rumah mempelai wanita dengan berjalan kaki diringi dengan musik rebana dan juga zikir. Pengantin laki-laki mengenakan baju adat Bima demikian pula pengantin wanitanya. Acara *nika leka* dilakukan setelah pelaksanaan sholat Isya dan waktu berakhirnya acara tersebut tidak ditentukan kapan berakhirnya. Karena lama atau sebetulnya acara tersebut itu tergantung sungguh pada tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Apabila tamunya sudah tidak ada maka acara *nika leka* pun berakhir dengan sendirinya.

Kata Kunci: Tradisi *Nika Leka*, Masyarakat Kurang Mampu

PENDAHULUAN

Manusia pada keseluruhannya mempunyai kesamaan naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Hidup bersama dan berkerabat merupakan naluri dan kodrat manusia sebagai homopluralis. Manusia sebagai pribadi, mendorong dirinya untuk berjuang dan berkeinginan mempertahankan hidupnya. Sedangkan sifatnya sebagai unsur sosial manusia terdorong oleh keinginan hidup bersama dengan orang lain. Oleh karena itulah manusia diciptakan oleh Tuhan dalam berjenis-jenis untuk saling mengadakan hubungan antar sesama manusia dengan manusia lainnya. Manusia tanpa adanya orang lain tidak dapat hidup serta tidak mampu mempertahankan

hidupnya. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling membantu dan saling membutuhkan karena adanya dorongan seksual yang merupakan kebutuhan psikologis untuk mengembangkan keturunan.

Pernikahan atau *Nika ro Neku* dalam tradisi Bima memiliki aturan baku. Aturan itu cukup ketat sehingga satu kesalahan bisa membuat rencana pernikahan (*nika*) menjadi tertunda bahkan batal. Dulu, seorang calon mempelai laki-laki tidak diperkenankan berpapasan dengan calon mertua. Dia harus menghindari jalan berpapasan. Jika kebetulan berpapasan, maka calon dianggap tidak sopan. Untuk itu, harus dihukum dengan menolaknya menjadi menantu. Aturan yang ketat itu tentu menjadi bermakna

karena ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Kini, tentu saja aturan tersebut sudah ditinggalkan. Misalnya “ngge’e” *nuru* atau tinggal bersama calon mertua untuk mengabdikan di sana. Pengertian *nika ro neku* adalah serangkaian upacara adat yang dilakukan sebelum dan sesudah upacara akad (*lafa*). Bagi semua orang tua, akan merasa berbahagia bila bisa melaksanakan sunah Rasul yang menganjurkan muslim dewasa untuk menikah. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila pelaksanaan pernikahan diawali serta diakhiri dengan berbagai upacara adat sebagai luapan rasa bahagia dan syukur kehadiran Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT. Bagi masyarakat Bima, upacara *nika ro neku*, merupakan upacara daur hidup yang sangat menentukan masa depan putra-putri mereka. Keluarga, sanak saudara, karib kerabat, dan warga terlibat dalam upacara ini. Karena itu upacara *nika ro neku* termasuk “*Rawi Rasa*” (upacara yang harus melibatkan seluruh warga kampung).

Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dalam melaksanakan upacara perkawinan. Perkawinan mengandung banyak manfaat bagi setiap individu dan masyarakat, karena perkawinan merupakan kebutuhan individu dan masyarakat. Keluarga merupakan pabrik utama dalam membangun masyarakat, jika bangunan ini ditegakkan di atas fondasi yang kuat, akan lahir perkawinan yang sukses (Khair, 2006:8)

Pada tradisi masyarakat Bima, upacara perkawinan memegang peranan penting yang sangat menentukan. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bima memiliki perbedaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Dalam tradisi masyarakat Bima, perkawinan selalu diawali dengan tahapan *palinga* (mencari tau) Yang merupakan proses awal dari keseluruhan rangkaian tata cara adat di mana seorang jejaka melakukan penjajakan untuk mencari seorang gadis yang akan dijadikan pasangan hidup. Bila dalam tahapan *Palinga* ini ternyata si jejaka menyukai gadis tersebut dan ingin memperistrinya maka dia akan memberitahukan hal ini kepada orang tuanya. Untuk mewujudkan keinginan sang

anak, maka pihak keluarga pria mengirimkan utusan keluarga yang di beri tugas mencari tahu apakah gadis yang di inginkan anak lelakinya tersebut sudah ada yang punya atau belum. Bila belum ada yang punya dan si gadis bersedia menerima maksud hati sang jejaka yang disampaikan oleh utusan nya maka akan dilakukan kesepakatan untuk menentukan saat yang tepat keluarga pihak pria akan datang ke rumah gadis itu untuk melakukan peminangan resmi pada hari yang disepakati, keluarga pihak pria beserta rombongannya akan mendatangi rumah sang gadis untuk meminang, kedua belah pihak keluarga akan mengadakan pembicaraan lebih lanjut untuk dapat berbesan bila ternyata dalam pertemuan sebelumnya tidak ditemukan kata sepakat, kemudian kedua belah pihak menentukan hari, tanggal dan berbagai syarat keperluan adat yang harus di penuhi oleh pihak keluarga pria menjelang pernikahan (Suntea, 2011).

Upacara melamar atau meminang dalam adat Bima di sebut “*Panati*” sedangkan orang yang di utus untuk melakukan peminangan di sebut “*Ompu panati*”. Bila pinangan di terima, resmilah gadis dan jejaka tersebut berada dalam ikatan pertunangan atau dalam bahasa Bima di sebut “*Dou Sodi*” (Ompundaru/ Khaerul Muslimin, 2010). Yang unik pada tradisi perkawinan masyarakat Bima yaitu upacara adat yang dilakukan sehari sebelum hari H, tepatnya pada malam hari sebelum akad nikah, di rumah calon pengantin wanita akan dilakukan acara yang di sebut dengan “*Upacara Kapanca*” atau biasa di sebut dengan malam “*Kapanca*” yaitu acara penempean daun pacar atau inai untuk calon pengantin wanita, tidak hanya di bagian kuku, tetapi juga di telapak tangan yang jumlahnya harus ganjil (Suntea, 2011).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ternyata urusan derajat atau status sosial dalam adat perkawinan masyarakat Bima memegang peranan yang sangat penting. Derajat serta pekerjaan seorang pemuda sangat menentukan berhasil tidaknya ia meminang seorang gadis yang diidamkannya. Sedangkan kemampuan ekonomi atau kesanggupan untuk membayar maskawin seringkali dikesampingkan

jika ternyata pemuda yang meminang tersebut tergolong orang yang berstatus sosial yang lebih tinggi.

Perbedaan status sosial juga sangat terlihat pada penyelenggaraan upacara perkawinan di Desa Tangga kecamatan Monta, mulai dari proses persiapan, penyelenggaraan, maupun pada proses akhir upacara perkawinan. Biasanya, upacara perkawinan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berstatus sosial tinggi dituntut harus sempurna dari awal sampai akhir dan dilaksanakan dengan penuh kemeriahan. Sedangkan upacara perkawinan masyarakat yang status sosialnya rendah dilaksanakan secara sederhana dan apa adanya.

Nika leka menjadi salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang berekonomi menengah kebawah di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima dalam meresmikan sebuah ikatan pernikahan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Tahap Persiapan: a) melakukan observasi dan menentukan masalah yang akan dikaji terkait tradisi *nika leka* di Desa Tangga Kecamatan Monta; b) menentukan informan kunci yang akan memberikan informasi terkait masalah yang diteliti; c) Mendalami literatur untuk menentukan teori yang dianggap tepat dalam mengkaji permasalahan yang diangkat; d) menyusun instrumen pertanyaan untuk mencari serta menggali informasi sesuai rumusan masalah yang ditetapkan.

Tahap Pelaksanaan: a) Melaksanakan penelitian pada objek kajian yang menekankan pencarian informasi pada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pelaku *nika leka* di Desa Tangga; b) Mengumpulkan informasi ke dalam format pengumpulan data wawancara.

Tahap Akhir: a) Menelaah data sesuai landasan teori melalui uraian secara deskriptif; b) Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa

Tenggara Barat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosial dan budaya. Dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskriptif. Selain itu pendekatan ini juga digunakan untuk mengungkapkan fenomena yang berkaitan dengan tradisi *Nikah Leka* sebagai tradisi kultural dalam adat perkawinan masyarakat Bima.

Metode dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis, dan cermat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari objek yang ditelaah.

Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, pasangan suami istri yang melakukan *Nika Leka*, dan pemuda-pemudi Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen dapat berupa buku-buku, literatur lainnya ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: a) studi lapangan (*field Research*), diperoleh melalui proses wawancara dengan berbagai pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber, yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama, pasangan yang melaksanakan tradisi *nika leka* serta pihak-pihak terkait lainnya. b). Studi kepustakaan (*library research*). Diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen, publikasi dan hasil penelitian terkait tradisi pernikahan adat Bima. c). Observasi, diperoleh melalui hasil pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tangga merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan luas wilayah yaitu 1295 Ha, dengan struktur tanah yang datar terletak pada ketinggian 50 mil dari permukaan laut dan luas tanah sekitar 86,735 Ha. Desa ini termasuk desa yang subur dan cocok untuk daerah perkebunan, pertanian dan peternakan.

Wilayah Desa Tangga dipengaruhi oleh iklim tropis, panas dan hujan yang saling bergantian setiap tahunnya yakni musim hujan yang berlangsung pada bulan November sampai bulan Maret dan musim kemarau berlangsung pada bulan April sampai bulan Oktober dengan temperatur 23-35°C dan curah hujan 250 Mm/tahun yang bervariasi (Data Monografi Desa Tangga Tahun 2016).

Penduduk Desa Tangga terdiri dari suku-suku yang berbeda dan beragam pula Mata 4.313 orang, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.193 KK, maka jumlah laki-laki lebih besar yakni 2.202 jiwa dan perempuan 2.111 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam berjumlah 4.309 Jiwa dan yang beragama lain atau pemeluk Agama Hindu hanya 4 Jiwa, ke empat pemeluk Agama Hindu tersebut merupakan pendatang yang berasal dari Bali dan berdomisili di Desa Tangga.

Prosedur Pernikahan adat masyarakat Mbojo

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Seperti adat sudah menyatu bagi masyarakat yang juga ikut berperan aktif dalam mengatur tentang perkawinan. Secara spesifik, praktis adat ini dapat ditemukan dalam perkawinan.

Pernikahan atau *nika ra neku* dalam tradisi Suku Mbojo di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima memiliki aturan baku. Aturan itu cukup ketat sehingga satu kesalahan bisa membuat rencana pernikahan (*nika*) menjadi tertunda bahkan batal. Dulu, seorang calon mempelai laki-laki tidak diperkenankan berpapasan dengan calon mertua. Dia harus menghindari jalan berpapasan. Jika kebetulan

berpapasan maka calon dianggap tidak sopan. Untuk itu harus dihukum dengan menolaknya menjadi menantu. Aturan yang ketat itu tentu menjadi bermakna karena ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Kini, tentu saja aturan tersebut mulai ditinggalkan. Misalnya *ngge'e nuru* atau tinggal bersama calon mertua untuk mengabdikan di sana.

Dalam pelaksanaan perkawinan setiap daerah memiliki tata cara atau prosedur tertentu yang membedakan satu dengan yang lainnya. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut antara lain : *dou sodi* (pendekatan/ pacaran), *panati* (meminang), *mbolo weki* (musyawarah menentukan hari), *wa'a co'i* (antar mahar), *teka ra ne'e* (sokongan), *kanpanca* (penempelan daun pacar secara simbolik pada calon pengantin wanita), *lafa* (akad nikah), *jambuta* (resepsi/ pesta), *boho oi ndeu* (mandi kembang).

Dou Sodi

Upacara melamar atau meminang dalam bahasa daerah Bima disebut *panati*. Orang yang diutus untuk melakukan pinangan disebut *Ompu Panati*. Bila pinangan itu diterima, resmiah kedua remaja berada dalam ikatan pacaran. Satu dengan yang lain disebut *dou sodi* (*dou* artinya orang, *sodi* artinya tanya, maksudnya orang yang sudah ditanya isi hatinya dan sepakat untuk dinikahkan). Karena sudah saling diikat, yang seorang sudah menjadi *dou sodi* yang lain, kedua remaja itu tak bebas lagi untuk mencari pacar lain (Khaerul, 2001:15).

Jika kedua remaja itu sudah mengikat janji, biasanya perempuan meminta sang pria agar mengirim orang tuanya. Biasanya *sodi angi* tidak berlangsung lama melainkan langsung diikuti dengan melamar sang gadis. Tujuannya, antara lain, untuk menghindari fitnah dan hal-hal lain yang tidak terpuji.

Panati

Dalam tradisi Suku Mbojo, *panati* menjadi pintu gerbang menuju ke jenjang pernikahan. *Panati* adalah melamar atau meminang perempuan. *Panati* diawali dengan datangnya utusan pihak laki-laki ke orang tua perempuan. Utusan datang untuk menanyakan apakah sang gadis sudah memiliki kumbang atau calon

suami. Bila memperoleh jawaban bahwa sang perempuan berstatus bebas, kembali dilakukan pendekatan untuk mengetahui apakah perempuan itu dapat dilamar. Jika lamaran itu diterima oleh pihak perempuan, si pria melakukan apa yang disebut *wi'i nggahi*. Pada hari yang ditetapkan, pertunangan diresmikan dalam upacara *pita nggahi*.

Setelah terjadi acara pertunangan, pada zaman dulu ada acara *ngge'e nuru*. Akan tetapi adat ini sudah jarang dilaksanakan pada zaman sekarang. *Ngge'e nuru* maksudnya calon suami tinggal bersama di rumah calon mertua. *ngge'e* artinya tinggal, *nuru* artinya ikut. Pria sudah diterima lamarannya, bila kedua belah pihak menghendaki, sang pria diperkenankan tinggal bersama calon mertua di rumah calon mertua. Dia akan menanti bulan baik dan hari baik untuk melaksanakan upacara pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Isra A.Wahab selaku Kepala Desa Tangga, maka dapat peneliti uraikan bahwa datangnya sang pria untuk tinggal di rumah calon mertua inilah yang disebut dengan *ngge'e nuru*. Selama terjadinya *ngge'e nuru*, sang pria harus memperlihatkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang baik kepada calon mertuanya. Bila selama *ngge'e nuru* ini sang pria memperlihatkan sikap, tingkah laku dan tutur kata yang tidak sopan, malas dan sebagainya, atau tak pernah melakukan shalat, lamaran bisa dibatalkan secara sepihak oleh keluarga perempuan. Ini berarti ikatan *sodi angi* diantara dua remaja tadi putus. Tujuan utama *ngge'e nuru* ini adalah proses adaptasi antara sang pria dengan kehidupan calon mertua. Selama *ngge'e nuru*, pria tidak diperkenankan bergaul bebas dengan perempuan calon istrinya. Akan tetapi tradisi *ngge'e nuru* ini sudah tidak lagi dilaksanakan/ diberlakukan dalam masyarakat pada zaman sekarang.

Mbolo Weki

Mbolo weki adalah upacara musyawarah dan mufakat seluruh keluarga maupun handai taulan dalam masyarakat untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hajatan/ rencana perkawinan yang akan dilaksanakan. Dalam tradisi khitanan juga

demikian. Hal-hal yang dimufakatkan dalam acara *mbolo weki* meliputi penentuan hari baik, bulan baik untuk melaksanakan hajatan tersebut serta pembagian tugas kepada keluarga dan handai taulan. Bila ada hajatan pernikahan, masyarakat dengan sendirinya bergotong royong membantu keluarga melaksanakan hajatan. Bantuan berupa uang, hewan ternak, padi/ beras dan lainnya. Adapun jumlah bantuan yang diberikan ada yang bersifat ditetapkan dan ada pula bersifat sukarela. Jumlah bantuan *mbolo weki* ini akan dicatat dalam buku dan sebagai bahan pertimbangan kembali mana kala orang yang memberi bantuan tersebut mengadakan acara *mbolo weki*. Dengan demikian acara *mbolo weki* ini dapat dikatakan bantuan secara bergantian.

Wa'a Co'i

Wa'a co'i maksudnya adalah upacara menghantar mahar atau mas kawin, dari keluarga pria kepada keluarga sang gadis. Dengan adanya upacara ini, berarti beberapa hari lagi kedua remaja tadi akan segera dinikahkan. Banyaknya barang dan besarnya nilai mahar, tergantung hasil mufakat antara kedua orang tua remaja tersebut. Pada umumnya mahar berupa rumah, perabotan rumah tangga, perlengkapan tidur dan sebagainya. Tapi semuanya itu harus dijelaskan berapa nilai nominalnya.

Upacara mengantar mahar ini biasanya dihadiri dan disaksikan oleh seluruh anggota masyarakat di sekitarnya. Digelar pula arak-arakan yang meriah dari rumah orang tua sang pria menuju rumah orang tua perempuan. Dengan diiringi seni/ musik hadrah, sholawatan, maupun kesenian *Mbojo* lainnya, semua perlengkapan mahar dan kebutuhan lain untuk upacara pernikahan seperti beras, kayu api, hewan ternak, jajan dan sebagainya ikut dibawa dan diarak.

Teka Ra Ne'e

Teka ra ne'e ke keluarga yang melaksanakan hajatan merupakan kebiasaan di kalangan Suku *Mbojo*. *Teka ra ne'e* berupa pemberian bantuan pada keluarga yang mengawinkan putra putrinya. Bila upacara *teka ra ne'e* dimulai, berduyun-duyunlah masyarakat (umumnya kaum

wanita) datang ke rumah keluarga berhajat dengan membawa uang, bahan pakaian, beras dan sebagainya.

Kapanca

Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum calon pengantin wanita dinikahkan. Setiba di *uma ruka*, calon pengantin wanita akan melaksanakan acara adat yang disebut *kapanca*, yaitu acara penempelan *kapanca* (inai) di atas telapak tangan calon pengantin wanita. Dilakukan secara bergiliran oleh ibu-ibu pemuka adat. *Kapanca* merupakan peringatan bagi si calon pengantin wanita bahwa dalam waktu yang tak lama lagi akan melakukan tugas sebagai istri atau ibu rumah tangga. Seiring dengan kegiatan *kapanca*, akan disuguhkan juga sejenis kesenian rakyat yang bernafaskan ajaran Islam yang disebut *Zikir Kapanca* yang dilakukan oleh grup hadrah yang telah diundang khusus oleh yang berhajat. Mereka akan membawakan syair bernuansa Islam yang liriknya berisi pujian dan sanjungan pada Allah dan Rasul.

Seusai acara *Zikir Kapanca* dilanjutkan dengan pertunjukan hiburan berupa kesenian dan musik *Mbojo Bima* seperti malam hadrah, biola/ketipung semalam suntuk. Ada pula olahraga seperti *Guntaw* atau tarian seperti *Buja Kadanda*. Acara hiburan ini biasanya dihadiri oleh kaum laki-laki dan anak-anak muda untuk memeriahkan suasana perkawinan.

Lafa

Lafa atau akad nikah merupakan puncak acara. Sebelum akad berlangsung, malamnya dilakukan upacara *kapanca* (memberi atau menghias daun pacar yang digiling halus pada jari-jari tangan dan kaki pengantin). Acara ini disebut *londo dende*, dimana pengantin pria diantar ramai-ramai oleh keluarga dan handai taulan dengan diiringi kesenian hadrah ke tempat pengantin wanita. Pengantin pria mengenakan pakaian adat pengantin. Kadang-kadang kedua pengantin diarak bersama-sama menuju tempat upacara. Seringkali pula hanya pengantin pria yang diarak. Pengantin wanita cukup menunggu di tempat upacara (Muslimin, 2004:9-10).

Di tempat pengantin wanita dipersiapkan berpakaian adat pengantin dan duduk di atas

pelaminan yang dihias ornamen-ornamen tradisional. Duduknya di bawah (di atas kasur berhias) dengan bersimpuh menurut adat (*doho tuku tatu'u*). Ia didampingi seorang inang pengasuh dan dua remaja putri dari keluarga dekat yang bertugas mengipas, selain itu duduk pula dua orang laki-laki atau perempuan yang membawa alat penginang.

Di muka pelaminan duduk berbaris berhadap-hadapan putri-putri remaja yang membawa lilin berhias. Di belakang dan di samping mereka duduk para tamu ibu-ibu dan bapak-bapak. Orang tua pengantin wanita duduk di sebelah pelaminan. Ruangan tersebut dibatasi dengan tirai adat yang disebut *dindi ra-lara* berwarna-warni. Biasanya dipakai warna merah, hijau, kuning dan putih.

Saat pengantin dan rombongan naik atau masuk ke ruangan, mereka berhenti di depan tirai. Terjadilah semacam dialog pendek antara pengantar (bapak-bapak) pengantin pria dengan penjaga tirai (bapak-bapak) pihak wanita. Setelah diserahkan uang pelumas dan sirih pinang, barulah tirai dibuka oleh ibu-ibu dari pihak wanita dari dalam tirai dan disambung dengan taburan beras kuning, dan menancapkan setangkai kembang ke atas gelung penganting wanita yang duduk membelakangi. Pengantin wanita mencabut kembangnya dan membuangnya (ini dilakukan tiga kali). Acara ini disebut *nenggu*. Setelah *nenggu*, pengantin wanita berbalik dan sama-sama duduk berhadapan kemudian pengantin wanita sujud atau salaman dengan pengantin pria. Selanjutnya mereka duduk bersanding untuk disaksikan oleh undangan dan handai taulan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan H. Abdullah selaku tokoh masyarakat, maka dapat peneliti uraikan bahwa pada acara ini seluruh masyarakat, pemuka agama, laki perempuan diundang untuk menyaksikan dan memberi do'a restu. Pelaksanaan upacara ini bermacam-macam. Kadang-kadang hanya dengan selamatan biasa yang disebut *do'a jama*. Kadang-kadang dengan pesta yang cukup meriah dengan diiringi orkes atau band. Dengan disaksikan oleh seluruh tamu, dihadapan petugas agama, saksi khusus, pengantin pria duduk berhadapan

dengan calon mertuanya, berpegangan tangan dalam posisi dua ibu jari kanan mereka saling dirapatkan. Dalam posisi demikian, diadakanlah akad nikah atau ijab kabul yang dalam bahasa daerah disebut *lafa*. Akad nikah atau ijab kabul atau *lafa* harus didahului dengan mengucapkan kalimat syahadat yang diucapkan oleh calon mertua atau wali dengan diikuti oleh mempelai pria.

Selesai mengucapkan akad nikah, resmiah si pria menjadi suami si wanita. Proses selanjutnya adalah mengantar pengantin laki-laki menuju tempat duduk pengantin wanita dengan diantar oleh penghulu atau siapa saja yang ada di sekitar itu untuk melakukan upacara *caka* (jengkal) yaitu ibu jari kanan pengantin pria diletakkan di atas ubun-ubun pengantin wanita yang disusul dengan saling berjabat tangan antar kedua pengantin yang selanjutnya mereka duduk bersanding. *Caka* dimaksudkan sebagai pertanda permulaan sang suami menyentuh istrinya dan mulai saat itu mereka sudah halal untuk bergaul sebagai suami istri.

Jambuta

Ada sebuah acara yang menjadi bagian dari prosesi perkawinan yaitu *jambuta*. Semula acara ini hanya berlaku di kalangan etnis Arab, namun akhirnya menjadi bagian dari tradisi Suku Mbojo pada umumnya maupun masyarakat Desa Tangga pada khususnya. *Jambuta* hampir sama tujuannya dengan *teka ra ne'e* namun pelaksanaannya cukup satu hari. Sedang *teka ra ne'e* berkisar antara dua hingga tiga hari (Khaerul, 2001:18).

Boho Oi Ndeu

Boho oi ndeu adalah mandi sebagai pertanda ucapan selamat tinggal atas masa remaja. *Boho oi ndeu* ini dilakukan sehari setelah akad nikah, dilangsungkan tapi sebelum pengantin bergaul sebagai suami istri. Pada upacara ini kedua pengantin duduk bersama pada tempat tertentu yang telah disediakan. Kemudian dari atas kepalanya oleh dukun dituangkan air yang sudah disiapkan dalam periuk tanah yang baru (*roa bou*; *roa* artinya periuk; *bou* berarti baru). Leher periuk dilingkari dengan segulung benang putih. *Boho oi ndeu* biasanya dilakukan pagi hari yang disusul dengan do'a selamat pada sore

harinya. Kedua pengantin duduk berdampingan, menduduki suatu alat tenun yang disebut *lira*, sedangkan badan mereka dililit dengan untaian benang tenun dari kapas putih sebagai lambang ikatan suci kemudian dilakukan siraman dengan air wangi-wangian. Inilah akhir dari upacara *nika ra neku* (Muslimin, 2004:13).

Acara mandi untuk calon pengantin wanita dilakukan juga sebelum upacara perkawinan, yakni pada pagi hari sebelum acara *kapanca*. Mandi ini disebut *boho oi mbaru* yang artinya memandikan atau menghapus masa kegadisan bagi calon pengantin wanita. Setelah mandi dilanjutkan dengan *boru* atau cukuran yaitu mencukur dahi calon mempelai wanita menurut bentuk dandanan yang diperlukan.

Pada hari ketiga, pengantin wanita diboyong ke rumah pengantin pria dalam acara yang disebut *lao keka*. Di tempat pengantin pria, diadakan acara *pamaco*, dimana kedua pengantin diperkenalkan pada para undangan yang satu per satu menyampaikan sumbangan, entah uang atau barang, bahkan secara simbolis menyerahkan seuntai tali apabila hadiahnya hanya merupakan seekor kerbau.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan perkawinan Suku Mbojo di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima meliputi: *dou sodi* (pendekatan/ pacaran), *panati* (meminang), *mbolo weki* (musyawarah menentukan hari), *wa'a co'i* (antar mahar), *teka ra ne'e* (sokongan), *kapanca* (penempelan daun pacar secara simbolik pada calon pengantin wanita), *lafa* (akad nikah), *jambuta* (resepsi/ pesta), *boho oi ndeu* (mandi kembang). Banyaknya acara prosesi perkawinan yang harus dilaksanakan tersebut, secara otomatis memerlukan biaya perkawinan yang cukup besar. Karena itulah, sebagian biaya pelaksanaan perkawinan tersebut dibebankan pada penentuan mahar (*wa'a co'i*).

Proses pelaksanaan Tradisi Nika Leka di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Tradisi *nika leka* adalah tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai upacara perkawinan yang mewah dikarenakan alasan

ekonomi. Tradisi *nika leka* ini prosesnya hampir sama dengan pernikahan biasa yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Bima. Yang membedakannya hanyalah pada pesta perayaannya saja. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh bapak Isra A. Wahab selaku Kepala Desa Tangga: “bahwa *nika leka* ini sudah ada sejak dahulu, dan biasanya dilaksanakan oleh masyarakat yang rata-rata tidak memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi/ masyarakat miskin. Lain halnya dengan upacara perkawinan masyarakat yang tingkat ekonomi dan status sosialnya tinggi. Masyarakat yang berstatus sosial tinggi dalam melaksanakan upacara perkawinan selalu ingin terlihat sempurna, oleh karena itu sebelum pelaksanaan upacara perkawinan mereka membentuk panitia yang khusus bertugas untuk mempersiapkan hajatan besar tersebut, mulai dari konsep upacara pernikahan, undangan, gedung sebagai tempat pelaksanaan upacara pernikahan, busana yang dikenakan mulai dari busana pengantin sampai pada busana yang akan dikenakan oleh pagar ayu (pengiring pengantin), tukang rias, hiburan, konsumsi para tamu, dan lain sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh Imran salah satu warga Desa Tangga, “bahwa: bagi saya pernikahan adalah sekali seumur hidup, oleh karenanya saya ingin pesta pernikahan saya harus terlihat mewah dan sempurna. Maka dari itu dari proses persiapan sampai pelaksanaannya sebisa mungkin saya kontrol sendiri, agar saya mengetahui langsung kekurangan-kekurangannya.

Upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berstatus social tinggi di Desa Tangga umumnya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bima yaitu diawali dengan pacaran, pertunangan, mengutus panati, pengantaran mahar, sokongan, resepsi, akad nikah dan mandi kembang.

Terkait dengan *nika leka* di Desa Tangga Kecamatan Monta, pada umumnya prosesi yang dilewati hampir sama dengan pernikahan yang seperti biasanya hanya saja dilakukan secara lebih sederhana, mulai dari proses lamaran, akad nikah dan resepsi pernikahan.

Proses Lamaran

Pada proses lamaran *nika leka*, dilaksanakan hanya oleh kalangan keluarga dekat yang terdiri dari kedua orang tua dengan disaksikan oleh ketua RT dilingkungan tempat tinggal mereka. Pada proses lamaran ini pihak laki-laki menanyakan kesiapan dari pihak perempuan apakah bersedia untuk menikah dan kira-kira berapa jumlah mahar yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Pada umumnya, apabila ditanyakan tentang jumlah mahar yang akan dibawa, jawaban dari pihak perempuan adalah seberapa saja kemampuannya. Dengan kata lain pihak perempuan menyerahkan sepenuhnya tentang mahar itu sekemampuan pihak laki-laki, jadi pihak perempuan disini tidak memaksakan mahar yang tinggi pada keluarga laki-laki.

Hal ini seperti dijelaskan oleh bapak usman selaku ketua RT 04, beliau mengatakan bahwa keluarga yang melaksanakan *nika leka* pada saat melakukan acara lamaran biasanya tidak melibatkan orang lain melainkan kedua orang tuanya langsung dan hanya melibatkan ketua RT sebagai saksi lamarannya. Dan pada saat proses lamaran itu juga langsung dibicarakan masalah maharnya, sebagai pihak yang dilamar, pihak perempuan biasanya tidak memaksakan mahar pada laki-laki yang penting bagi mereka pernikahan tersebut jadi dilaksanakan.

Hasil wawancara di atas diperkuat lagi dari hasil wawancara peneliti dengan Sahidah, yaitu pelaku *nika leka*. Mengatakan bahwa “saya dan suami saya adalah orang tidak berada, pada saat dulu suami saya melamar saya, saya tidak membebaninya dengan masalah mahar karena saya tau sekali bagaimana kondisi ekonominya. Yang penting bagi saya pernikahan itu tetap berlangsung meskipun dengan mahar yang sedikit.

Dari beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses lamaran pasangan yang melaksanakan *nika leka* sedikit berbeda dengan proses lamaran yang dilakukan oleh keluarga yang melaksanakan pernikahan yang biasa. Dan terkait dengan urusan pembayaran maharpun tidak sesulit dan semahal dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan biasa.

Mbolo Weki

Mbolo Weki, adalah salah satu acara yang tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh keluarga pasangan *nika leka*. Acara ini merupakan acara pemberian sumbangan oleh keluarga dan warga masyarakat setempat untuk telesenggaranya sebuah acara pernikahan. Jumlah dana *mbolo weki* yang terkumpul biasanya tidak terlalu banyak, dana tersebut dipergunakan untuk menambah biaya pernikahan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Samsudin kepada peneliti, “bahwa acara *mbolo weki* bagi masyarakat yang tidak mampu sangat membantu dalam penyelenggaraan pernikahan, meskipun yang dilakukan adalah *nika leka* tetapi tetap juga membutuhkan biaya.

Undangan Pelaksanaan *mbolo weki* bagi masyarakat yang tidak mampu berbeda dengan masyarakat yang mampu. Masyarakat yang tidak mampu biasanya menyampaikan undangan *mbolo weki* kepada masyarakat lewat pengeras suara (mikrofon) dari masjid atau musholah. Sedangkan undangan *mbolo weki* masyarakat yang mampu itu dilakukan lewat kartu undangan yang disampaikan langsung dari rumah ke rumah.

Akad Nikah

Acara Akad Nikah, acara akad nikah yang dilakukan oleh pasangan *nika leka* dilaksanakan dalam suasana yang penuh kesederhanaan, yaitu dilaksanakan di kantor Urusan Agama. Tamu undangan biasanya tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari kedua keluarga, teman-teman kedua pasangan dan tetangga-tetangga terdekat. Si pengantin wanita dirias sealakadarnya saja, sama sekali tidak terlihat kemewahan karena hanya di balut dengan kebaya biasa. Baju yang dikenakanpun bukan baju khusus yang disiapkan oleh inang pengasuh (tukang rias) melainkan baju pengantin wanita itu sendiri.

Seperti yang disampaikan oleh Nurjanah kepada peneliti, bahwa pada saat akad nikah dulunya ia mengenakan baju kebaya sendiri yang saat muda biasa dipakai untuk ke pesta pernikahan karena kalau memakai baju yang disiapkan oleh inang pengasuh (tukang rias) berarti harus keluar biaya lagi, sedangkan untuk menyewanya tidak memiliki uang lebih.

Kemeriahan acara akad nikah pasangan *nika leka* terlihat pada saat pengantin laki-laki berjalan kaki ke kediaman pengantin wanita yang diiringin oleh musik rebana dan rombongan yang membawa hasil bumi, kayu bakar dan bumbu-bumbu masakan, juga hewan sebelihan seperti ayam dan yang paling besar adalah seekor kambing.

Sangat berbeda dengan akad nikah yang dilaksanakan oleh pasangan yang berasal dari keluarga berada dan memiliki derajat yang tinggi di masyarakat. Suasannya penuh dengan kemeriahan dan juga kemewahan, mulai dari tamu undangan, kostum yang dikenakan oleh pasangan pengantin, dekorasi ruangan tempat akad nikah berlangsung, dan juga hidangan-hidangan yang disiapkan pada acara akad nikah tersebut.

Resepsi Pernikahan

Resepsi pernikahan merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan yang biasanya dilaksanakan pada sore hari. Resepsi ini merupakan acara pemberian ucapan selamat oleh para undangan kepada pasangan pengantin beserta kedua keluarganya. Resepsi pernikahan di Desa Tangga Kecamatan Monta biasanya hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki status social yang tinggi dan tentu saja memiliki kemampuan dalam membiayai pesta tersebut, mulai dari biaya tenda/gedung, biaya penyewaan kursi, penyewaan piring/terop, penyewaan pelaminan, penyewaan organ, sampai pada penyewaan Inang Pengasuh (tukang rias).

Sedangkan pasangan yang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya rendah tidak mampu melaksanakan resepsi pernikahan ini dikarenakan masalah biaya. Agar pernikahan tetap berlangsung meskipun dengan suasana yang sederhana maka pasangan ini melakukan *nika leka*, yaitu pernikahan yang dilakukan pada malam hari.

Ritual pernikahan ini diawali dengan acara *dende*, acara *dende* ini dilakukan di malam hari yaitu dimana pengantin laki-laki di arak menuju rumah mempelai wanita dengan berjalan kaki diringi dengan musik rebana dan juga zikir. Pengantin laki-laki mengenakan baju adat Bima demikian pula pengantin wanitanya.

Sesampainya di rumah pengantin wanita kedua pengantin ini dipertemukan, disana terjadi dialog antara antara pengantin laki-laki dan pengantin wanita.

Dialog tersebut berisi si pengantin laki-laki mempertanyakan ke pada si wanita “apakah si wanita ini sudah siap berjalan bersamanya dalam suka maupun duka”? si wanitapun menjawab Iya. Setelah dialog ini berakhir maka pasangan pengantin tersebut kembali di arak jalan kaki mengelilingi kampung sambil diringi musik rebana dan zikir.

Menurut bapak Abdullah tokoh masyarakat Desa Tangga, bahwa tujuan dari diarak-araknya pengantin ini keliling kampung adalah sebagai ungkapan rasa gembira pasangan pengantin dan keluarga serta secara langsung memberitahukan kepada masyarakat Desa Tangga bahwa malam ini akan berlangsung acara *nika leka*.

Setelah selesai diarak-arak keliling kampung, pasangan pengantin tersebut kemudian disandingkan pada pelaminan sederhana yang lokasinya bisa di lapangan ataupun halaman rumah pengantin wanita. Pada acara *nika leka* ini, tidak ada susunan acara yang resmi. Tamu-tamu yang hadir memberikan ucapan selamatpun tidak mengenakan pakaian resmi. Mereka hanya mengenakan pakaian sehari-hari bahkan juga ada yang mengenakan *rimpu* (kerudung sarung).

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan ibu nur yang mengatakan bahwa “ pada acara *nika leka* kami tidak perlu menggunakan pakaian pesta yang biasanya kami kenakan pada acara pernikahan yang umumnya biasa dilakukan masyarakat Bima, kami cukup mengenakan pakaian sehari-hari. Bahkan orang-orang tua di desa kami ini perginya hanya dengan mengenakan sarung dan juga *rimpu* (kerudung sarung).

Pada lokasi pestapun tidak disediakan kursi untuk para tamu undangan, mereka yang hadir langsung memberikan ucapan selamat dan setelah selesai memberikan ucapan selamat mereka bisa langsung pulang atau berdiri untuk menonton. Kado yang diberikanpun tidak dibungkus dengan kertas kado demikian juga tamu yang memberikan uang, Uang tersebut

tidak dimasukkan didalam amplop melainkan langsung diberikan begitu saja.

Acara *nika leka* dilakukan setelah pelaksanaan sholat Isya dan waktu berakhirnya acara tersebut tidak ditentukan kapan berakhirnya. Karena lama atau sebetulnya acara tersebut itu tergantung sungguh pada tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Apabila tamunya sudah tidak ada maka acara *nika leka* pun berakhir dengan sendirinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muslim, S.Pd beliau mengatakan bahwa *nika leka* ini benar-benar dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu di desa kami, mereka tidak mampu mebiayai pesta pernikahan yang memakan biaya puluhan juta. Menyadari kekurangan inilah maka masyarakat melaksanakan *nika leka* dengan prinsip yang penting syah menjadi pasangan suami istri dimata Allah dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa salah satu solusi bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi tidak mampu membiayai pelaksanaan upacara pernikahan di Desa Tangga Kecamatan Monta ialah dengan cara melakukan *Nika leka*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Syahroni. (1971). *Mahar dalam Tradisi dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ayyub, Hasan. (2004). *Figh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Efendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali. (1995). *Menyikap Hakekat Perkawinan*. Bandung: PT. Karisma.
- Huaidi, Fahmi. (2002). *Majmu Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kartohadiprojo, Soediman. (1984). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Khaerul, Muslim. (2001). *Adat Pernikahan Bima*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.

- Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi.
- Murtiningdyah. (2005). *Kedudukan Wanita dalam Mahar (Studi Kasus di Kabupaten Pare-Pare)*. Tersedia pada <http://etd.eprints.uny.ac.id/pdf>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2011.
- Muslimin, Hamzah. (2004). *Ensiklopedi Bima*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, Amiur. (2004). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peter, B. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prasada. (2010). *Penentuan Mahar dan Pengaruhnya terhadap Kedudukan Wanita dalam Masyarakat di Desa Mura Kabupaten Sumbawa Barat*. Tersedia pada <http://etd.eprints.ums.ac.id/4853/1/G000060086.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2011.
- Prodjohamidjojo, Soetojo. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Widjono. (1960). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT. Sumur.
- Rahman, Abdullah. (2006). *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rasyid, Sulaiman. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soemiyati. (1981). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Syarifudin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wantjik, Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Identifikasi Pola Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Kelas X IPS SMAN 2 Wera

Roni Irawan¹, Zuriatin²
STKIP Taman Siswa Bima
roniirawanstkip@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pola pendidikan karakter yang diterapkan pada pembelajaran sejarah di Kelas X IPS SMA Negeri 2 Wera, (2) kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam penerapan pola pendidikan karakter pada pembelajaran sejarah di kelas X SMA Negeri 2 Wera. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Wera menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus tunggal terpancang. Sumber data terdiri atas informan (guru sejarah dan peserta didik), tempat dan peristiwa (aktivitas belajar sejarah di kelas), dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Validitas data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi data, triangulasi peneliti dan triangulasi teori. Analisis data menggunakan analisis interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pola pendidikan karakter yang diterapkan di SMA Negeri 2 Wera, melalui media-media tertentu yang ditempel di dinding sekolah maupun media yang secara langsung. Pola karakter yang ada di sekolah menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah pada siswa kelas X IPS. Pada RPP pembelajaran guru mencantumkan nilai karakter, dan nilai karakter yang dicantumkan akan di evaluasi pada tahap evaluasi pembelajaran. (2) terdapat kendala-kendala yang di hadapai guru maupun siswa dalam penerapan pola pendidikan karakter di kelas X IPS. Kendala-kendala yang menghambat dalam penerapan pola pendidikan karakter yaitu kendala pada waktu, kemampuan siswa dan materi pembelajaran yang pada, serta minimnya media pembelajaran yang dijadikan sebagai contoh dalam menumbuhkan karakter siswa.

Kata Kunci: Pola, Pendidikan Karakter, Pembelajaran Sejarah

PENDAHULUAN

Perkembangan Globalisasi dan industri digital akan memberikan ancaman dan tantangan bagi pembentukan karakter anak bangsa, dimana anak bangsa semakin hari semakin terpengaruh oleh perkembangan globalisasi, perkembangan arus globalisasi ini tentu memberikan ancaman-ancaman yang secara serius terhadap pembentukan karakter anak bangsa yang sesuai dengan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana nilai-nilai karakter anak bangsa dalam kehidupan sosial budaya disuatu negara dan bangsa sangat penting. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki karakter. Dalam membentuk karakter anak bangsa, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak bangsa, untuk membentuk karakter yang baik, maka diperluka

pola-pola pendidikan untuk mengimplementasi pendidikan karakter.

Pendidikan karakter merupakan salah satu bentuk perwujudan hasil program nasional yang diselenggarakan oleh Kemendiknas para tanggal 14 Januari 2010 tentang “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional dalam pembentukan karakter bangsa. Gerakan nasional ini didasarkan pada beberapa hal yang menyebabkan tergesernya karakter dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia yang dimana sikap kebhinekaan dan kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat indonesia sebagai bentuk degradasi moral, ahlak, bergotong royong dan nilai-nilai kearifan lohal bangsa Indonesia. Pada dasarnya pendidikan karakter merupakan usaha ddari pemerintah untuk mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas, baik dari segi softskill maupun hardskillnya. (Yuliana, 2013.1).

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani *charassein* dan “*kharax*” yang maknanya *tools for making* atau *to engrave* yang artinya mengukir, kata ini mulai banyak digunakan kembali dalam bahasa Prancis “*character*” pada abad ke 14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi “*character*” sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia menjadi “karakter” (Alfred Jhon, 2010:VII).

Wacana ini memang sedang hangat dibicarakan pada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, karena ini merupakan terobosan baru dalam perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia yang mengusung generasi muda menjadi pribadi yang unggul tidak hanya dalam bidang akademik saja maupun dari segi moral juga yang dianggap perlu di era globalisasi sekarang. Pada penerapan kurikulum 2013 pendidikan karakter di terapkan secara eksplisit melalui KI 1 yang mengandung nilai agama dan KI 2 yang lebih menitik pada nilai sosial sedangkan pada KTSP pendidikan karakter diberikan secara Implisit dalam proses belajar mengajar.

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat (Kemendiknas, 2010: 1).

Mata pelajaran Sejarah di sekolah, senantiasa memiliki persepsi yang kurang baik. Minat siswa

terhadap mata pelajaran sejarah selalu dianggap rendah. Bahkan, Sejarah dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang membosankan dan terkesan tidak menarik dikarenakan pelajaran sejarah dianggap hanya menghafal fakta semata padahal hal ini bertolak belakang dengan tujuan pelajaran sejarah yang banyak mengandung muatan pendidikan karakter. Pembelajaran sejarah bukan sekadar *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*, bukan sekadar mengajarkan siswa menjadi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Pembelajaran sejarah, selain bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, juga mempunyai fungsi didaktis yang dapat memberikan pelajaran dari pengalaman generasi sebelumnya. Substansi nilai yang diamanatkan pada mata pelajaran sejarah adalah sebagai “Pelajaran yang mengemban misi positif” (Sanusi, 1992: 3).

Alasan perlunya dilakukan identifikasi penerapan pendidikan karakter bangsa yakni keberadaan karakter dalam bangsa merupakan pondasi. Bangsa yang memiliki karakter kuat, mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter adalah keinginan kita semua dan selain itu juga didorong oleh kondisi degradasi moral bangsa Indonesia yang pada saat ini tidak terkendali (Kemendiknas, 2010: 1).

Terhadap kondisi tersebut, seharusnya harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan pencetak calon pemimpin bangsa harus ikut bertanggung jawab mengatasi masalah-masalah tersebut. Dari peserta didik inilah, dua puluh lima tahun ke depan mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penanaman Pendidikan Karakter bagi peserta didik di sekolah tidak bisa ditawar lagi.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan pendidikan karakter pada tanggal 2 Mei 2010 (Jamil: 2012). Dalam implementasinya, pemerintah membuat rencana aksi nasional pendidikan karakter. Dalam rencana tersebut, Kemdiknas membuat

tingkatan, yakni tahap I: 2010-2014; Tahap II: 2014-2020; Tahap III: 2020-2025.

Jika dikaji lebih jauh sudah ada sekolah yang sudah menerapkan pola pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah. Terobosan ini diterapkan oleh SMA Negeri 2 Wera. Dengan diterapkannya pola pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Wera diharapkan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain yang belum menerapkan pola pendidikan karakter dalam proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran sejarah.

Penelitian ini dilakukan atas dasar dorongan moral sebagai salah satu Dosen Sejarah STKIP Taman Siswa Bima. Hal ini semakin diperkuat dengan wacana pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang banyak terjadi belakangan ini. Diakui atau tidak diakui saat ini terjadi krisis yang nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat yang melibatkan milik kita yang paling berharga yaitu anak-anak.

Penelitian lainnya yang mengkaji lebih mendalam mengenai pendidikan karakter yaitu Budiana (2014) dalam bentuk skripsi berjudul "*Pengintegrasian Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Penerapan Model STAD Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Nasionalisme Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Wera*". Walaupun telah ada penulisan yang terkait dengan pendidikan karakter namun terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis kaji pada penelitian ini. Persamaannya terdapat pada kedua peneliti sama-sama meneliti pendidikan karakter dalam proses pembelajaran sejarah.

Peneliti sebelumnya mencoba mengintegrasikan nilai-nilai tersebut pada saat proses pembelajaran sejarah berlangsung, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, peneliti sebelumnya hanya menfokuskan pada pengintegrasian karakter pada pembelajaran sejarah sedangkan penelitian ini menfokuskan pada pola pendidikan karakter pada proses pembelajaran sejarah dengan mengidentifikasi RPP yang dibuat oleh Guru, kemudian proses pelaksanaan pendidikan karakter di kelas pada saat proses belajar

mengajar berlangsung, berapa banyak nilai-nilai karakter yang disampaikan oleh guru serta bagaimana respon siswa terhadap pendidikan karakter yang diberikan oleh guru.

Ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social dan tanggung jawab. Peneliti mencoba untuk mengali semua nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang diterapkan di SMA Negeri 2 Wera, sehingga nanti muncul suatu kajian yang bisa menjelaskan semua unsur-unsur pendidikan karakter dalam pembelajaran

Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian antara lain: 1) Pengertian/Konsep Pola, (2) Hakekat karakter dan pendidikan karakter, (3) Konsep pembelajaran, (4) pembelajaran Sejarah dan (5) Nilai karakter dalam pembelajaran sejarah

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini kualitatif deskriptif, penelitian yang menyajikan temuan dalam bentuk deskriptif kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dari pada sekedar sajian angka atau frekuensi (H.B Sutopo, 2006:40). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah di Kelas X IPS SMAN 2 Wera dan kendala-kendala yang di alami oleh guru maupun siswa itu sendiri.

HASIL PENELITIAN

Pola Pendidikan Karakter di SMA Negeri 2 Wera

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMA Negeri 2 Wera pada bulan Agustus sampai Oktober. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pola pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Wera dilakukan secara menyelur ke semua

peserta didik di sekolah. pendidikan karakter yang dilakukan secara komprehensif yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara menyeluruh di dalam kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan, dalam upacara bendera dan semua aspek kegiatan di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Wera.

Pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Wera dilakukan melalui media-media tertentu dalam proses sosialisasinya di lingkungan sekolah baik pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas maupun pada kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya terbatas pada kegiatan pembelajaran kelas maupun di lingkungan sekolah saja. Pendidikan karakter di sekolah dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di kelas. sekolah tetap menjadi panyung besar dalam memberikan pembelajaran dan pendidikan yang berkaitan karakter dan sekolah sebagai ujung tombak sebagai ruang pembentukan karakter anak bangsa, selain dari itu sekolah memiliki peran yang sangat vital dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Wera. Salah satu media yang ditampilkan dalam menanamkan pendidikan karakter di sekolah yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diprogram oleh sekolah tersebut antara lain kegiatan pramuka sebagai wahana melatih siswa menjadi disiplin, tanggung jawab, kekompakan kelompok, toleransi.

Pola penerapan karakter di tidak saja melalui kegiatan pramuka tetapi banyak kegiatan yang lain yang akan menjadi wahana dalam pembentukan karakter anak bangsa seperti kegiatan olahraga yang menjadi wahana untuk melatih bakat dalam bidang olahraga. Pola penerapan pendidikan karakter melalui media sekolah membuat madang sebagai wahana melatih siswa yang memiliki kreatifitas pada dunia jurnalistik, melatih siswa dalam rasa ingin tahu, gemar membaca, peduli lingkungan dan meningkatkan kesadaran siswa dalam berliterasi.

Sedangkan dalam kelas X IPS guru dalam menerapkan pola pendidikan karakter melalui media pendidikan guru sejarah pada awalnya menyiapkan berbagai perangkat dalam pembelajaran seperti Silabus, RPP, media dan

instrumen evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang di dapat dilapangan peneliti mendapatkan bahwa guru sejarah merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum menetapkan isi dan metode pembelajaran yang dituangkan dalam Silabus dan RPP. Pendidikan karakter menjadi sangat penting bagi anak bangsa, karena bangsa indonesia adalah bangsa yang beragam, lembaga pendidikan sebagai wahana yang memiliki perang yang sangat penting dalam setiap pembelajaran untuk mengimplementasi pola pendidikan yang berkarakter. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran lebih menekankan pada pendidikan karakter seperti membangun kompetensi spritual, intelektual dan kompetensi sosial. Tujuan pembelajaran ini merupakan penjabaran dari Kompetensi yang akan dikuasai oleh setiap peserta didik dan hal ini sudah dirumuskan dalam RPP yang akan diterapkan dalam setiap pembelajaran. metode yang digunakan guru dalam menerapkan pola pendidikan karakter sangat beragam. Dalam materi Tradisi sejarah dalam masyarakat indonesia pada masa pra-aksara dan masa aksara, guru menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah dan diskusi, dan model pembelajaran adalah model pembelajaran *kooperatif tipe STAD*.

Data yang dipaparkan dalam penelitian ini meliputi proses pelaksanaan pendidikan karakter oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa, kemudian selain dari itu data yang dihimpun berupa kendala-kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa dalam proses pelaksanaan pendidikan karakter di kelas. oleh karena itu, deskripsi data temuan pada penelitian ini terkait dengan bagaimana cara guru serta respon siswa dalam proses pelaksanaan yang meliputi: a) perencanaan pembelajaran, b) pelaksanaan pembelajaran dan c) evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian di kelas X IPS, guru merancang perangkat pembelajaran sebelum proses pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan atau jauh-jauh hari sebelum kegiatan mengajar berlangsung. Pembuatan

perangkat pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama kemudian guru melakukan perubahan seperlunya RPP yang telah dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan materi ajar yang akan diberikan. Pada setiap RPP yang dibuat oleh guru harus disisipkan unsur-unsur pendidikan karakter di dalamnya.

Pada RPP yang pertama tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia pada Pra-aksara dan masa Aksara guru menyisipkan nilai-nilai karakter didalamnya. Nilai yang disampaikan yaitu dari strategi pembelajaran dan dari materi pelajaran contohnya Dari strategi pembelajaran nilai yang disampaikan yaitu merangsang rasa ingin tahu peserta didik, toleransi, kerja sama, kekompakan dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain. Sedangkan dari materi pembelajaran nilai karakter yang dicantumkan yaitu persatuan dan kesatuan, kerja keras, cinta tanah air, bela Negara.

Secara keseluruhan RPP yang pertama sudah tersusun secara sistematis. dalam pembuatan komponen RPP di susun secara sistematis, mulai dari identitas pembelajaran sampai sumber belajar. Sesuai dengan permen diknas nomor 41 tahun 2007 bahwa didalam RPP harus memuat komponen-komponen seperti identitas pembelajaran, SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi dan sumber belajar.

Pada tahap pelaksanaan pendidikan karakter di kelas X IPS SMA Negeri 2 Wera peneliti langsung melakukan observasi di kelas X IPS, Peneliti mengobservasi seluruh kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dikelas. Berdasarkan hasil temuan peneliti, pelaksanaan pendidikan karakter di kelas X IPS SMA Negeri 2 Wera dilakukan dengan melihat keseluruhan proses pembelajaran berlangsung mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup pelajaran serta evaluasi pada pelaksanaan pembelajaran. Pada setiap kegiatan pembelajaran guru terlihat menyampaikan nilai-nilai karakter.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, pada proses pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Wera khususnya pada kelas X IPS masih terdapat kendala baik yang

dialami oleh guru maupun siswa itu sendiri. Kendala ini akan berpengaruh pada proses penanaman nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan karakter di kelas, namun seperti yang narasumber paparkan bahwa di kelas X IPS pelaksanaan pendidikan karakter sudah berjalan dengan baik.

Kendala-Kendala dalam proses pelaksanaan pola pendidikan karakter

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pola pendidikan karakter di kelas. Salah satu kendala yang paling berpengaruh adalah kendala waktu, hal ini diakui sendiri oleh guru Sejarah di SMA Negeri 2 Wera, pada penerapan kurikulum 2013 waktu pelajaran sejarah yakni 2 jam namun berhubung SMA Negeri 2 Wera kembali menerapkan KTSP maka jam pelajaran sejarah hanya satu jam saja. Menurut Guru sejarah kendala ini yang menjadi masalah, kalau dikurikulum 2006 (KTSP) pelajaran sejarah mendapat porsi 1 jam pelajaran, pada hari Selasa sam Sejarah Kamis waktu mengajar selama 45 menit masih bisa dipergunakan dengan baik, sedangkan Senin dan Sabtu waktunya pelajaran terkadang hanya 35-40 menit sehingga waktu tidak dapat dioptimalkan semaksimal mungkin.

Kemudian kendala materi pelajaran yang padat dengan waktu yang terbatas Pada penerapatan KTSP guru sejarah bisa menyampaikan materi dengan tuntas melalui diskusi kelompok. Pada dasarnya yang dilakukan oleh guru sejarah yaitu untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dan mengeksplorasi lebih kemampuan belajar siswa dengan melakukan diskusi kelompok namun hal ini sulit diterapkan di kelas lain namun secara keseluruhan di kelas X IPS kegiatan diskusi berjalan dengan baik seperti yang diakui oleh guru sejarah. Kemudian kendala yang terakhir yaitu dari siswa juga dapat berpengaruh pada optimalnya pelaksanaan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara membuktikan bahwa kemampuan siswa secara kognitif masih dikatakan kurang. Seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwa kemampuan siswa kelas X IPS

beragam ada yang rendah memiliki kemampuan yang sudah bagus. Namun untuk mengatasi masalah tersebut guru memiliki strategi khusus walaupun diakui sendiri oleh guru sejarah sulit diterapkan dengan maksimal, guru sering memberikan persoalan kemudian didiskusikan oleh siswa sehingga metode ini bisa merangsang kemampuan belajar siswa menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Wera dilakukan secara menyeluruh ke semua warga sekolah; 2) Pelaksanaan pendidikan karakter di kelas X IPS secara keseluruhan terencana dengan baik, guru sejarah membuat perencanaan dengan matang dengan menyisipkan nilai-nilai karakter dalam RPP kemudian menerapkannya didalam kelas sehingga penyampain nilai-nilai karakter bisa terlaksana; 3) Dalam pelaksanaan pola pendidikan karakter di kelas X IPS terdapat banyak kendala yang dihadapi baik oleh guru maupun siswa. Kendala ini dapat menghambat dan menimbulkan dampak kepada penerapan pola pendidikan karakter dalam proses pembelajaran sejarah berlangsung; 4) Kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa berupa kendala waktu, materi pelajaran yang padat serta kemampuan siswa yang kurang baik menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru; 5) Pengembangan nilai-nilai karakter yang diharapkan oleh pihak sekolah dan guru hendaknya tidak hanya dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah saja, tetapi juga dilingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui komite sekolah dan pertemuan wali murid; 6) Diharapkan kedepanya guru bisa mengatasi dengan baik kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa berupa kendala waktu, materi pelajaran yang padat serta kemampuan siswa yang kurang baik menyerap pelajaran sehingga pelaksanaan pendidikan karakter bisa berjalan dengan maksimal; 7) Guru harus lebih kreatif dan inovatif memadu padankan metode pembelajaran yang sudah ada dan berusaha

menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran. Karena pendidikan karakter adalah berpusat kepada kegiatan bukan hanya materi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, 2011. *Model Evaluasi pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Abd Rahman Hamid, 2014. *Pembelajaran Sejarah*. Penerbit Ombak.
- H. B Sutopo, 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Luk Alfi Hidayah, 2010. Upayah Guru dalam mengatasi Hambatan Pembelajaran Sejarah pda KTSP DI SMP Negeri 39 Semarang. *Jurnal Paramita*. Volume 20 No.2. Halama 220.
- Lexy J. Moloeng, 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Made Pidarta, 2009. *Landasan Pendidikan*. PT. Rineka Cipta.
- M. Hosnan, 2014. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam pembelajaran abad 21*. Penerbit. Ghalia Indonesia.
- Oka A Yanti, 1985. *Budaya Tradisional Yang Nyaris Punah Bacaan Popular Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Depertemen pendidikan dan kebudayaan.
- Oemar Hamalik, 1986. *Media Pendidikan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Poppha James W, 2008. *Transformative Asses Stment USA*. Associotion Forr Supervisio and Curriculum Development.
- S. K. Kochar, 2008. *Teacing of History*. Pembelajaran Sejarah. Jakarta: Grasindo.
- Suharto, 2009. Museum Kretek Sebagai Media dan Sumber Pembelajaran Sejarah di SMA 1 Gebog Kudus. *Tesis*. PPs UNS Surakarta.
- Tri Widodo, 2011. Memahami Makna Praksis Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kontroversial. *Jurnal Paramita*. Volume. 21. No. 2.
- Widarto, 2007. *Prespektif Global*. Salatiga: Widya Sari.

Proses Penambangan Pasir Pantai dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

Syafruddin¹, Ihsan²

^{1,2}STKIP Taman Siswa Bima
syafruddin83@gmail.com

ABSTRAK

Bukti Ketergantungan bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa melihat kelanjutan fungsinya. sentralisasi pemerintahan, kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan masih terbatas pada pemanfaatan wilayah-wilayah yang strategis saja, namun dewasa ini setiap daerah saling belomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam masing-masing. Penambangan pasir di pantai memang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya aktivitas penggalian pasir di pantai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Kegiatan penambangan pasir pantai sering dikotakan sebagai salah satu kegiatan yang merusak lingkungan, hal itu dapat terjadi apabila kegiatan penambangan tidak terkendali pasti akan menimbulkan dampak lingkungan, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Meskipun demikian besarnya permintaan pasar terhadap pasir turut mendorong berkembangnya kegiatan ini dengan pesat. Akibatnya, munculah berbagai masalah terhadap lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah proses penambangan pasir pantai yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima? 2) Bagaimanakah dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya eksploitasi pasir pantai di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima?. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui proses penambangan pasir pantai yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. 2) Untuk mengetahui dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya eksploitasi pasir pantai di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Kesimpulan Kegiatan eksploitasi pasir pantai yang berlebihan akan berdampak pada rusaknya kelangkaan sumber daya alam dan rusaknya fungsi lingkungan pantai. Eksploitasi pasir pantai yang terus mengalami peningkatan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kegiatan penambangan yang dilakukan secara kelompok terus-menerus dan dilakukan secara ilegal atau tidak berizin. Kerusakan pantai karena eksploitasi yang terus terjadi di sepanjang pantai di kecamatan ambalawi. Dengan bertambahnya Jumlah penduduk yang terus meningkat dan ketersediaan lahan pertanian dan ketersediaan lapangan kerja yang sedikit menyebabkan masyarakat banyak yang alih profesi menjadi penambang pasir pantai. Hal ini yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan ambalawi kabupaten Bima. Ada berbagai alasan yang menyebabkan kegiatan eksploitasi pasir pantai terus dilakukan di Kecamatan ambalawi kabupaten Bima antara lain: 1) Pengetahuan masyarakat tentang dampak kerusakan lingkungan pantai. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kegiatan eksploitasi pasir pantai. Masyarakat hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat menganggap bahwa lingkungan itu milik umum, sehingga masyarakat berhak mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. 2) Pengetahuan masyarakat tentang ilegal. Bagi masyarakat ilegal diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di perbolehkan. Masyarakat yang melakukan penambangan akan dianggap legal sehingga masyarakat melakukan kegiatan penambangan tersebut. Dalam hal ini Peran pemerintah daerah dalam menyikapi aktivitas penambangan pasir pantai secara illegal sangat diperlukan Peraturan.

Kata kunci: *Proses penambang pasir pantai.*

PENDAHULUAN

Bukti Ketergantungan bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa melihat kelanjutan fungsinya. sentralisasi pemerintahan, kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan masih terbatas pada pemanfaatan wilayah-wilayah yang strategis saja, namun dewasa ini setiap daerah saling belomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam masing-masing.

Penambangan pasir di pantai memang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya aktivitas penggalian pasir di pantai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Kegiatan penambangan pasir pantai sering dikonotasikan sebagai salah satu kegiatan yang merusak lingkungan, hal itu dapat terjadi apabila kegiatan penambangan tidak terkendali pasti akan menimbulkan dampak lingkungan, baik bersifat positif maupun bersifat negatif.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui proses penambangan pasir pantai yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. 2) Untuk mengetahui dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya eksploitasi pasir pantai di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Penelitian yang dilakukan diasumsikan akan membantu pelestarian lingkungan dan Untuk menambah wawasan dan konsep keilmuan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

Proses Penambangan Pasir

Proses penambangan pasir di kecamatan ambalawi kabuapten bima yaitu dilakukan dengan cara tradisional. Penambangan pasir yang dilakukan hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, pengeruk pasir, apabila penggalian dengan jumlah pasir yang cukup besar, biasanya kendaraan pengangkut pasir

ini langsung di angkut ke lokasi penambangan, guna mempermudah pengangkutan

Tinjauan tentang Eksploitasi

Eksploitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan sesuatu untuk keuntungan sendiri. Kegiatan Eksploitasi ini dapat menciptakan kerusakan. Penambangan dalam skala besar dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sering disampingkan dengan kegiatan pertambangan.

Eksploitasi adalah usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Kegiatan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat bahan galiannya yaitu, galian padat dan bahan galian cair serta gas. Eksploitasi merupakan pengambilan sumberdaya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya (Nurkartika, 2001).

Tinjauan Tentang Kegiatan Penambang

Tanah merupakan salah satu faktor yang penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa pada umumnya setelah manusia berhasil menguasai sebidang atau seluas tanah, mereka mengabaikan fungsi tanah, bahkan merusak dan selanjutnya dan menelantarkan tanah itu sendiri (Karta sapoetra dkk, 2005)

Usaha penambangan merupakan usaha melakukan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan penjual. Menurut Rahmi (1995), penggolongan bahan-bahan galian adalah sebagai berikut: 1) Golongan a, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian Negara serta pertahanan dan keamanan Negara. 2) Golongan b, merupakan bahan galian vital, yaitu menjamin hajat hidup orang banyak, contohnya besi, tembaga, emas, perak dan lain-lain. 3) Golongan c, bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran internasional. Contohnya marmer, batu kapur, tanah liat, pasir, yang sepanjang tidak mengandung unsur mineral.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan menyebutkan bahwa

pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana pencarian sendiri. (As'ad, 2005). Pertambangan rakyat dilakukan oleh rakyat, artinya dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat-alat sederhana. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan secara sederhana dan dengan alat sederhana, jadi tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal besar dan memakai teknologi canggih. Dari uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat, yaitu: 1) Usaha pertambangan. 2) Bahan galian meliputi bahan galian strategis, vital dan galian c. 3) Dilakukan oleh rakyat. 4) Domisili di area tambagan rakyat. 5) Untuk kehidupan sehari-hari. 6) Diusahakan dengan cara sederhana.

METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Tahap Persiapan: a) Menentukan masalah yang akan dikaji dan mencermati fenomena yang terjadi pada masyarakat di kecamatan Ambalawi kabupaten Bima. b)Mendalami literatur untuk menentukan teori yang dianggap tepat dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. c)Merancang proposal yang berisi permasalahan serta teori yang menjadi dasar sudut pandang hingga penganalisan. d) Membuat instrumen pertanyaan untuk memperoleh informasi sesuai rumusan masalah yang diangkat.

Tahap Pelaksanaan: a) Melaksanakan penelitian pada objek kajian yang menekankan pencarian informasi pada proses penambang pasir pantai. b) Mengumpulkan informasi dengan wawancara.

Tahap Akhir: a) Menelaah data sesuai teori secara deskriptif. b) Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian.c) Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian.

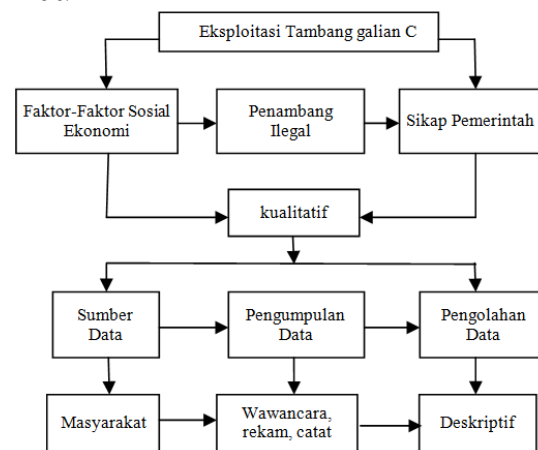
Setting Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Informan (subjek penelitian) yang dibutuhkan dalam penelitian adalah masyarakat penambang pasir pantai. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara (daftar pertanyaan), dan caat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Metode dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis, secara cermat mengenai fakta-fakta yang akan diperoleh dari objek yang ditelaah.

Untuk memahami tentang penggunaan metode tersebut dalam penelitian ini akan dikemukakan rancangan penelitian sebagai berikut.



Teknik Pengumpulan Data

Mempertimbangkan penelitian akan dilakukan di lapangan untuk memperoleh informasi tentang proses penambang pasir pantai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara, dan catat. Penggunaan wawancara untuk menggali informasi kepada informan terkait proses penambang pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima bisa dijadikan materi pelajaran di Sekolah Dasar. Wawancara untuk memperoleh keterangan yang disampaikan informan yang telah diwawancarai dapat membantu memudahkan peneliti mendeskripsikan informasi lisan menjadi tulisan tuntut menunjang pengumpulan informasi saat peneliti melakukan wawancara, proses

mendeskripsikan sumber pustaka dengan mengutip informasi dianggap sangat penting.

Teknik Penganalisisan Data

Proses pengumpulan data telah dirampungkan, maka ditindak lanjuti dengan proses pengolahan data. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dalam menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan. Proses yang dimaksud melalui uraian kata-kata dalam menjawab permasalahan dan solusi pada objek yang akan diteliti. Langkah pengolahan data secara deskriptif meliputi rangkaian dan mentranskripsi per kata dalam proses wawancara sehingga bisa dikelompokkan menjadi kata, maupun kalimat. Memperoleh informasi penunjangnya dan selanjutnya uraikan dengan model pembelajaran berwawasan lingkungan di Sekolah Dasar. Penyajian hasil pengolahan data secara deskriptif dilakukan secara formal dan informal. Formal direalisasikan dalam deskripsi bagan, tabel, dan gambar sedangkan informal disajikan dalam uraian terperinci kata per kata. Secara khusus penggunaan informal dalam penyajian penelitian memungkinkan menghasilkan penjelasan suatu permasalahan lebih rinci sehingga dapat memberikan tingkat keterbacaan yang tinggi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di kecamatan ambalawi yang tingaal di daerah pesisir pantai merupakan sebagian besar sebagai petani dan ada juga sebagai nelayan. Pada bulan mei masyarakat petani yang ada di daerah pesisir pantai banyak yang beralih profesi sebagai penambang Pasir pantai karena merupakan bahan material yang mudah di dapat dan banyak dibutuhkan dalam berbagai pembangunan sarana fisik. Pembangunan yang banyak membutuhkan pasir sehingga masyarakat banyak melakukan sebagai penambangan pasir pantai. penambangan pasir dilakukan secara sederhana dengan alat sederhana. Pasir pantai bagi sebagian masyarakat pesisir merupakan salah satu sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas penambangan dilakukan di sepanjang pesisir pantai yang ada di kecamatan ambalawi.

PEMBAHASAN

Faktor sosial ekonomi: a) Tingkat Pendidikan. Dalam mendukung kehidupan sosial, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM). Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, dan interaksi sosial seseorang sebagai anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Pendidikan secara langsung memberi kontribusi terhadap keterampilan dan kelangsungan hidup pada seseorang. Sementara kualitas sumber daya manusia Indonesia relative masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, terdapat tamatan berbagai jenjang pendidikan, yaitu tamatan SD bahkan ada tidak sempat menamatkan di bangku SD, tamatan SLTP, tamatan SLTA dan tamatan perguruan tinggi yang hanya berjumlah sangat kecil. Pada umumnya masyarakat pesisir pantai hanya sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan SLTP selebihnya mereka lebih memilih bekerja untuk menghasilkan uang atau pergi merantau. Seiring perkembangan jaman masyarakat pesisir pantai Sadar akan pentingnya pendidikan, terbukti sudah banyak melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi bahkan sudah ada yang menggelar sarjana dari berbagai jurusan. b) Mata Pencapaian. Potensi ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir pantai di Ambalawi untuk penunjang mata pencaharian umumnya berkaitan dengan sektor petani, nelayan dan penambang pasir. Disamping itu juga ada sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, dan sebagainya.

Sumber mata pencaharian masyarakat pesisir pantai di kecamatan ambalawi terpusat pada petani, nelayan, penambang pasir, yang mana hampir semua masyarakat pesisir pantai ini menggantungkan hidupnya pada hasil petani nelayan, penambang pasir. Dilihat dari segi partisipasi anggota keluarga dalam bekerja, setiap anggota keluarga baik suami atau istri bahkan anak terlibat dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup. c) **Aktivitas**

Sosial. Selain melakukan aktivitas ekonomi, masyarakat pesisir pantai juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk gotong royong dan sebagainya. Kegiatan yang sering Organisasi sosial tumbuh dengan baik seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok penambang pasir, Organisasi Kependudukan lainnya. Kegiatan sosial lain yang biasa dilaksanakan seperti acara tujuh belas Agustus, dan pertandingan bola voli, sepakbola antar desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin keakraban.

Proses penambangan pasir pantai

Proses penambangan pasir yang dilakukan di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yaitu dilakukan dengan cara tradisional. Penambangan pasir yang dilakukan hanya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana/tradisional seperti: cangkul, sekop pasir, dan kendaraan pengangkut pasir ini langsung dimasukan ke lokasi penambangan yang dekat dengan jalan, guna mempermudah proses pengangkutan.

Dampak terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan aktivitas penambangan pasir pantai memiliki dampak yang cukup besar terhadap perubahan lingkungan fisik. Dengan adanya aktivitas penambangan pasir pantai secara tradisional/sederhana di Kecamatan Ambalawi ditemukan adanya dampak positif dan negatif, dampak positif diantaranya menambah penghasilan atau pendapatan masyarakat dan tersedianya lapangan kerja sedangkan dampak negatifnya terdiri dari meningkatnya kerusakan pada tanggul dan terjadi abrasi, kerusakan jalan di sepanjang pantai.

Sikap pemerintah

Sikap pemerintah terhadap penambang pasir pantai seakan membiarkan karena pemerintah tidak memberikan himbauan atau mensosialisasikan terhadap masyarakat mengenai dampak yang akan di timbulkan dari penambang pasir pantai tersebut.

KESIMPULAN

Kegiatan eksploitasi pasir pantai yang berlebihan akan berdampak pada rusaknya kelestarian sumber daya alam dan rusaknya

fungsi lingkungan pantai. Eksploitasi pasir pantai yang terus mengalami peningkatan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh kegiatan penambangan yang dilakukan secara kelompok terus-menerus dan dilakukan secara ilegal atau tidak berizin. Kerusakan pantai karena eksploitasi yang terus terjadi di sepanjang pantai di kecamatan ambalawi.

Dengan bertambahnya Jumlah penduduk yang terus meningkat dan ketersediaan lahan pertanian dan ketersediaan lapangan kerja yang sedikit menyebabkan masyarakat banyak yang alih profesi menjadi penambang pasir pantai. Hal ini yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan ambalawi kabupaten Bima. Ada berbagai alasan yang menyebabkan kegiatan eksploitasi pasir pantai terus dilakukan di Kecamatan ambalawi kabupaten Bima antara lain: 1) Pengetahuan masyarakat tentang dampak kerusakan lingkungan pantai. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak jangka panjang yang di timbulkan oleh kegiatan eksploitasi pasir pantai. Masyarakat hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat menganggap bahwa lingkungan itu milik umum, sehingga masyarakat berhak mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. 2) Pengetahuan masyarakat tentang illegal. Bagi masyarakat ilegal diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di perbolehkan. Masyarakat yang melakukan penambangan akan dianggap legal sehingga masyarakat melakukan kegiatan penambangan tersebut.

Dalam hal ini Peran pemerintah daerah dalam menyikapi aktivitas penambangan pasir pantai secara illegal sangat diperlukan Peraturan Daerah (Perda), teguran lisan, dan sosialisasi. Perda penambangan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Peraturan dan Teguran lisan yang diberikan berupa peringatan.

DAFTAR PUSTAKA

Akademi Teknik Pertambangan Nasional, Banjarbaru.
As'ad, 2005. Tesis: Pengelolaan Lingkungan pada Penambang Rakyat (Studi Kasus

Penanbang Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan selatan).

Kartasapoetra, dkk, 2005, Teknologi Konservasi Tanah dan air, cetak ke V, Rineka Cipta: Jakarta

Nurkartika, 2001. *Intisari Biologi*. PT Aksarindo Prima Cipta: Jakarta

Rahmi, F., 1995. Sistem dan Alat Tambang,

Problem Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Ahmadin

STKIP Taman Siswa Bima

madin_uni15@yahoo.co.id

ABSTRAK

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, memiliki dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek sosial ekonomi. Zakat ditinjau dari aspek agama merupakan suatu bukti kepatuhan seorang hamba kepada tuhan, dan dari aspek sosial-ekonomi, zakat memiliki fungsi strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu zakat sering kali disebut sebagai ibadah *Maliyah Ijtima'iyah*. Namun fungsi zakat untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan akan terwujud jika zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk konsumtif, melainkan dalam bentuk produktif, dimana zakat yang peroleh terlebih dahulu dimanfaatkan menjadi suatu usaha, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan penghasilan tetap, sehingga tujuan utama penyaluran zakat dapat terwujud yaitu merubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Kemudian dilihat dari Pelaksanaan zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan secara kontekstual dalam kehidupan modern, misalnya orang yang memiliki modal menzakatkan modalnya kepada orang yang memiliki skill dan sebaliknya orang yang memiliki skill menzakatkan skillnya kepada yang memiliki modal. Maka zakat yang disebut dalam al-quran sejajar dengan shalat karena merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam suatu tatanan kehidupan sosial.

Kata kunci: Zakat, Pengelolaan dan Problem

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, ada ajaran yang penting untuk diketahui bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqoh. Perintah menafkahkan harta, guna membantu sesama anggota masyarakat yang kurang beruntung tersebut merupakan pelaksanaan kongkrit dari prinsip Islam tentang keadilan sosial.

Cendekiawan Monzer Kahf (1995) mengatakan bahwa zakat dan sistem waris (*faraidh*) mengarah kepada distribusi harta yang egaliter, dan sebagai akibat dari zakat maka harta selalu beredar. Zakat mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan maupun hubungan dengan sosial kemasyarakatan antar manusia. Zakat mengandung makna yang lebih luas dari pada sekedar pelaksanaan syariat islam.

Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang

menjadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja umat. Selain dari pada rukun islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, zakat juga disebut rukun masyarakat. Kalau seseorang melaksanakan shalat, puasa dan haji, manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Orang lain dan masyarakat tidak rugi kalau ada orang islam yang meninggalkan shalat, puasa, atau haji. Lain halnya dengan zakat. Jika seorang muslim yang membayar zakat maka manfaatnya dirasakan langsung oleh orang lain dan masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, jika seseorang tidak membayar zakat pasti menimbulkan kerugian bagi banyak orang atau masyarakat pada umumnya karena rusaknya mekanisme penyeimbang sistem kepemilikan harta dan penghasilan.

Pelaksanaan zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat

dikembangkan secara kontekstual dalam kehidupan modern, misalnya orang yang memiliki modal menzakatkan modalnya kepada orang yang memiliki skill dan sebaliknya orang yang memiliki skill menzakatkan skillnya kepada yang memiliki modal. Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh, mendidik umat islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri dan sebaliknya mewujudkan semangat berbagi dengan orang lain. Kesadaran berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran islam. Perintah mendirikan shalat didalam alquran tidak pernah dipisahkan dengan perintah membayar zakat, sebagaimana allah swt mensejajarkan iman dengan ukhuwah (persaudaraan sesama muslim) didalam kitab sucinya.

Allah swt berfirman: dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya disisi allah swt. Sungguh, allah melihat atas segala yang kamu lakukan. (QS. Al-baqaroh: 110).

Nabi muhammad saw dalam khutbah terakhirnya menegaskan, wahai manusia, tunaikanlah zakat hartamu. Ketahuilah, barang siapa tidak menunaikan zakat, tidak sempurna shalatnya. Ketahuillah, barang siapa tidak sempurna shalatnya, tidak sempurna pula agamanya, tidak sempurna puasanya dan tidak sempurna jihadnya.

Umar Hasyim dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul pilar-pilar Islam yang dikutip dalam bukunya yang berjudul pedoman berzakat ditulis oleh kementerian agama, menjelaskan Allah maha bijaksana telah mengatur ukuran wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan biaya dan tenaga dalam memperolehnya. Harta yang sedikit tenaga dalam memperolehnya lebih besar zakatnya.

Oleh karena itu, zakat yang disebut dalam al-quran sejajar dengan shalat karena merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam suatu tatanan kehidupan sosial. Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang mempunyai petugas (amil) yang

disebut secara eksplisit dalam al-quran. Agar lebih jelas makna yang sesungguhnya zakat. maka, perlu kita memberikan pengertian zakat.

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata **Zakat** merupakan kata dasar (mashdar) dari *Zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik.

Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah.

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain.

Zakat menurut syara' adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syara' dengan niat karena Allah.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi* pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu."

Istilah zakat diberikan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk *shodaqoh* wajib dan kata *shodaqoh* digunakan untuk *shodaqoh* sunat.

Zakat merupakan *al'ibadah al-maalayah al-ijtima'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *ibadah mahdloh* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing. Hukum zakat yang wajib

meniscayakan bahwa zakat bukan semata merupakan bentuk kedermawanan, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan pembagiannya. Oleh karena itu, para ulama fiqih kemudian memasukkan ibadah zakat sebagai *qadla'iy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil), bukan ibadah *dayyaniy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan tidak ada hak orang lain yang terambil), seperti sholat. Karena sifat zakat yang *qadla'iy*, maka pelaksanaan zakat tidak bisa dilakukan secara individual, oleh karena itu pada zaman rosululloh dan *khulafaurraasyidin*, pengelolaan zakat menjadi tugas dan tanggung jawab penguasa, bukan masyarakat secara perseorangan.

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Pertama, dari sisi muzakki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infaq, maupun shodaqoh, akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

سَبْعَ أُنْبُوتَاتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٌ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَاعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٍ مِّنْهُ سُنْبُلَةٌ كُلٌّ فِي سَنَابِلِ
عَلِيمٍ وَاسِعٍ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui." (Q.S. Al-Baqoroh Ayat 261)

Dan Rosululloh SAW bersabda: "Tidak akan berkurang harta karena bersedekah, dan tidak akan dizholimi seseorang dengan kezholiman lalu ia bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambahnya kemuliaan, dan tidaklah seorang

hamba membuka jalan keluar untuk suatu permasalahan kecuali Allah akan membebaskannya dari pintu kemiskinan atau semisalnya. (H.R. Tirmidzi).

Kedua, dari sisi mustahiq, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahiq, akan bisa mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahiq menjadi muzakki.

Hukum Zakat

Hukum zakat adalah **wajib**. Zakat adalah sebuah kewajiban individu (*fardhu 'ain*) yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu, dan diambil oleh para petugas zakat. Perhatikan firman Allah SWT dibawah ini:

إِنَّ ۗ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتَزَكَّيْهِمْ تَطَهَّرَهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ
عَلِيمٍ سَمِيعٍ وَاللَّهُ ۗ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103)

Ancaman Untuk Orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat

Bagi mereka yang sudah kena kewajiban zakat, tapi tidak mau membayarnya, maka siksa yang sangat pedih akan mereka terima di akherat kelak. Bahkan ancaman Allah SWT demikian kerasnya. Allah SWT berfirman didalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya: "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang adzab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk, dan punggung, dan dikatakan kepada mereka, "Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu." (Q.S. At-Taubah ayat 34-35).

Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan *mustahiq zakat* adalah seperti yang Allah SWT firmankan dalam quran

surat At-Taubah ayat 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (amilin), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S At-Taubah: 60)

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa mustahiq zakat itu ada 8 ashnaf (bagian). Yaitu sebagai berikut: 1) Fakir ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer (kebutuhan sehari-hari) karena **tidak bisa** kasab (usaha); 2) Miskin ialah orang yang bisa kasab (usaha) tapi tidak mencukupi kebutuhan primer (kebutuhan sehari-hari); 3) Amilin ialah orang yang diangkat oleh pemimpin untuk menggarap tugas-tugas pemungutan atau pengumpulan, pendayagunaan atau pemeliharaan, pencatatan dan atau pelaporan, serta Pendistribusian atau pembagian zakat; 4) Muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan islam dan kaum muslimin; 5) Riqob adalah membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya dari perhambannya (budak) sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya; 6) Ghorimin adalah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak mampu membayar. Utang tersebut bukan untuk maksiat, penghamburan, atau karena kebodohan, belum dewasa, dll; 7) Fii sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi; dan 8) Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak bisa mempergunakan hartanya.

Macam Macam Zakat

Secara global, zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu **zakat fitrah** dan **zakat maal**; 1) Zakat Fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu Sha' (1.k 3,5 liter/2,5

Kg) per orang, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah sholat shubuh sebelum sholat Iedul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Seperti yang diterangkan dalam hadits yang diterima oleh Ibnu Abbas yang artinya: "Rosululloh SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang shaum dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan selama mereka shaum, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin". (H.R. Abu Daud); dan 2) Zakat Maal/Zakat Harta terdiri dari beberapa macam, yaitu: a) Zakat Emas, Perak, dan Uang. Zakat ini hukum nya wajib seperti yang Allah firmankan dalam quran surat At-Taubah ayat 34-35 (silahkan lihat diatas). Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada nishabnya, Nishab emas sebesar 20 dinar (90 gram), nishab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Dan zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang mempunyai emas yang sudah mencapai nashab (90 gram) dan disimpan/dipunyai selama satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat; b) Zakat Ziro'ah (pertanian/segala macam hasil bumi) Yaitu zakat dari pertanian. Zakat ini wajib seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam quran surat Al-An'am ayat 141; c) Zakat Ma'adin (barang galian). Maksud ma'adin yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi; d) Zakat Rikaz (harta temuan/harta karun). Yang dimaksud rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%; e) Zakat Binatang Ternak. Orang yang memelihara hewan ternak wajib mengeluarkan zakatnya; f) Zakat Tizaroh (perdagangan). Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

Manajemen Zakat

Pada bulan Ramadhan, umat Islam selain diperintahkan untuk berpuasa, juga diperintahkan berzakat, terutama zakat fitrah, baik yang berupa makanan pokok maupun berupa uang yang seharga dengan hitungan

makanan pokok. Zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi vertikal (manusia-Tuhan) dan horizontal (manusia-manusia) sekaligus. Secara vertikal, zakat adalah perintah Allah kepada manusia yang wajib ditunaikan dan itu sudah final (*tauqify*), tidak bisa ditawar-tawar lagi. Secara horizontal, pengelolaan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*) terbuka peluang untuk ijtihad (*ijtihad*).

Aspek horizontal inilah yang perlu didiskusikan dan dikembangkan terus-menerus mengingat zakat memiliki potensi yang besar dalam menyejahterakan rakyat dan mengandung nilai humanisme, tapi pengelolaannya selama ini belum maksimal.

Tragedi pembagian zakat yang memakan korban (mati, terinjak, berdesak-desakan) di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di Pasuruan, beberapa tahun lalu, merupakan contoh kecil dari buruknya manajemen dan strategi.

Dalam hal ini, setidaknya ada empat unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, badan atau lembaga sebagai pengumpul zakat bisa berupa Islamic Center, masjid, dan lain-lain. Kedua, proses kerja, yakni sebuah usaha untuk mengumpulkan, mengelola, mengoptimalkan, dan memberikan zakat. Ketiga, orang yang melakukan proses dalam hal ini adalah amil zakat. Keempat, tujuan, yakni terkumpul sekurang-kurangnya 25-50 persen dari wajib zakat.

Untuk melakukan kerja-kerja tersebut, seorang manajer akan melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut fungsi manajemen sebagai berikut. Pertama, *planning*, yakni harus ditentukan goal yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedua, *organizing*, harus ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai goal tersebut. Ketiga, *staffing*, harus ada penentuan sumber daya manusia yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian *training*, dan pengembangannya. Keempat, *motivating*,

pemberian motivasi dan arahan untuk menuju goal. Kelima, *controlling*, pengukuran *performance* untuk mencapai goal yang telah ditentukan, penentuan sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari goal, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada. Fungsi manajemen yang standar di atas acapkali diabaikan untuk mengatakan dianggap tidak penting. Padahal, tanpa fungsi manajemen tersebut, pengorganisasian apa pun akan tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Akhirnya, tujuan mulia zakat hanya menguap begitu saja di udara. *Naudzubillah*. Apabila fungsi manajemen dilakukan dengan baik (*well-done*), tinggal dilakukanlah strategi-strategi pembangunan zakat.

Potensi dana zakat dan realisasi pengumpulannya dapat *gap* yang besar. Salah satu bentuk sosialisasinya adalah kampanye sadar zakat yang dilakukan oleh komponen bangsa, bahkan kalau perlu sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari tingkat presiden sampai RT. Pasalnya, masyarakat hanya menyadari bahwa zakat fitrah sajalah yang wajib di bayarkan. Padahal, masih banyak jenis zakat lainnya yang harus dibayarkan, seperti zakat ternak, tanaman, profesi, dan lain-lain.

Bahkan, mungkin juga perlu dibentuk semacam NPWZ (nomor pokok wajib zakat) sebagai bukti keterlibatan mereka dalam mendukung sosialisasi zakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, zakat pun sebenarnya bisa dilakukan dengan media IT sebagaimana di Singapura dan Malaysia, yakni e-Zakat: Zakat System Online.

Kedua, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antarsesama komponen masyarakat.

Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat fundamental. Citra yang kuat dan baik akan menggiring masyarakat yang berkecenderungan muzaki untuk mau menyalurkan dana zakat melalui amil. Amanah, *equitable*, akuntabilitas, transparansi, dan *corporate culture* merupakan tiga hal pokok dalam menentukan citra lembaga zakat (*zakat corporation*) yang profesional.

Ketiga, membangun sumber daya manusia yang siap berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia. Keempat, memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan tentang zakat di Indonesia, termasuk merevisi Undang-undang No. 38/1999. Hal ini sangat penting mengingat UU tersebut merupakan landasan legal formal bagi pengelolaan zakat secara nasional. Di Yordania, misalnya, pemerintahnya sangat memperhatikan aspek perundang-undangan zakat. Mereka menghapus hukum zakat tahun 1944 dengan Undang-Undang Pajak Pelayanan Sosial tahun 1978, diperkuat lagi dengan Undang-Undang Zakat Fund tahun 1978 sebagai bentuk otonomi untuk mendirikan Funding Zakat, pembentukan direktorat zakat untuk ibu kota provinsi, dan ada pula sekitar 43 Komite Voluntary Zakat dan ahli-ahli syariah zakat di bawah Kementerian Awqaf.

Di Indonesia, perlu adanya inovasi-inovasi dan pengembangan ke arah yang lebih baik terkait dengan undang-undang zakat. Kelima, membangun database mustahik dan muzaki secara nasional sehingga diketahui peta penyebarannya secara tepat.

Indikator seorang dinilai mustahik maupun muzaki juga harus diatur secara jelas, tepat, dan di sesuaikan kondisi yang ada. Keenam, menciptakan standar disasi mekanisme kerja Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai parameter kinerja kedua lembaga tersebut.

Selama ini, belum ada standar baku dalam praktiknya. Ini menjadi hal urgen agar masyarakat memiliki ukuran yang jelas dalam mengontrol pengelolaan zakat.

Perbedaan Pajak dengan Zakat

Zakat berbeda dengan pajak, karena; a) Zakat adalah suatu kewajiban agama dan merupakan ibadah, sedangkan pajak adalah iuran yang diambil untuk mengumpulkan pendapatan negara; b) Zakat dipungut dari kaum muslim saja, sedangkan pajak dipungut dari seluruh warga negara bersangkutan tanpa memandang status sosial, kepercayaan, ataupun warna kulit; c) Zakat adalah tugas wajib kaum muslim yang harus dijalankan dalam segala keadaan dan sama sekali tidak boleh dikurangi, sedangkan pajak

dapat dikurangi oleh pemerintah; d) Berbeda dengan pajak, sumber dan tarif zakat telah ditentukan Al Qur'an dan Sunnah, serta tidak dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keperluan pemerintah dari negara; e) Jenis harta yang terkena zakat serta pihak-pihak yang berhak menerimanya sudah ditetapkan oleh Al Qur'an dan Sunnah. Adapun pembelanjaan pajak dapat saja dimodifikasi sesuai kebutuhan pemerintah; f) Zakat diterima dari orang kaya dan dibelanjakan untuk orang miskin serta yang membutuhkan, sedangkan pajak menguntungkan baik yang kaya maupun miskin; dan, dalam kondisi tertentu bahkan lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin; g) Zakat dipungut dari total harta yang ada pada si pemilik selama setahun penuh (bukan dari penghasilan kotor-ed.); dan h) Pungutan zakat pada dasarnya bertujuan mencegah distribusi harta kekayaan yang tidak merata dan tidak adil dan pemusatan kekayaan, sedangkan pajak dipungut terutama untuk tujuan-tujuan pendapatan negara.

Problem Pengelolaan Zakat

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah; 1) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini -meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi

semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) Amanah; (2) Manajerial Skills; (3) Ikhlas; (4) Leadership Skills; (5) Inovatif; (6) No Profit Motives; b) Pemahaman fikih amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berjihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat; c) Rendahnya kesadaran masyarakat. Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah

ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat; d) Teknologi yang digunakan. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat dan e) Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau

mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara. Kelima hambatan inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

Pemanfaatan Zakat Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

Pemerintah ingin menjadi aktor yang dapat memiliki langkah strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Karena dukungan pemerintah dan perannya akan berdampak positif bagi kehidupan negara secara menyeluruh terhadap bangsa. Sangatlah wajar apabila pemerintah melalui hak kekuasaannya ingin mensejahterakan masyarakatnya.

Oleh karena sebagian besar masyarakat muslim Indonesia adalah miskin maka pemerintah ikut bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat. Karena zakat adalah sebuah jangkar Islam dalam mengatasi kemiskinan dengan keadilan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. menurut jenisnya secara garis besar, organisasi amil zakat dibedakan menjadi dua, yaitu yang dikelola oleh pemerintah disebut badan amil zakat nasional dan yang dikelola swasta atau masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah,

disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). serta Badan Amil Zakat yang dibentuk secara tingkat nasional disebut BAZNAS yang membawahi tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ).

Sebenarnya sudah sekitar 49 tahun lamanya pemerintah Indonesia ingin membuat undang-undang zakat. mulai tahun 1950-an sudah dicetuskan perumusan tentang Undang-Undang tersebut, hingga pada tahun 1999 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan. namun kenyataannya, Undang-Undang ini seolah hanya berjalan di tempat, tetapi belum efektif untuk mengkondisikan masyarakat agar gemar menunaikan zakat melalui lembaga. Manfaat dengan di undangkannya UU No. 38 Tahun 1999 yang berdampak langsung terhadap keberadaan lembaga pengumpul zakat yang secara legal dapat memungut zakat. selain itu, belum ada manfaat yang sangat signifikan terhadap diberlakukannya undang-undang tersebut.

Kemudian di tahun 2011 terdapat amandemen Undang-Undang tentang zakat yang dsidangkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Pada Undang-Undang ini mengandung muatan inti dalam pengelolaan zakat: a) Pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada ijin dari pemerintah; b) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ); c) Anggota BAZNAS terdiri dari 8 orang perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur perwakilan kementerian agama terkait; d) Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan sebagai pembantu BAZNAS dalam mengelola zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan).

Dan alasan dikeluarkannya Undang-Undang tentang zakat ini, karena pemerintah ingin mengendalikan pengelolaan zakat disektor Desa hingga pusat supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia yang sebahagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim yang

miskin, maka pemerintah ingin samaratakan kesejahteraannya melalui zakat.

KESIMPULAN

Penghasilan atau rezeki yang diperoleh setiap orang adalah datangnya Allah SWT dan kembalinya kepada Allah SWT. Mengingat harta yang diperoleh tersebut bukan sepenuhnya menjadi miliknya dan masih terdapat milik orang lain mengingat rezeki merupakan problem yang paling utama, sehingga dengan kemiskinan dapat menimbulkan kekufuran, maka tepat pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriyah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan yang harus dikeluarkan.

Pada zaman dinasti umawiyah dan abbasyah diupayakan pengkajian fiqh zakat kemudian bermunculan fuqaha-fuqaha dan memulai kajian-kajian monumentalnya yang menuangkan renungan ijtihad dengan menguraikan secara lengkap mulai dari konsep dasar hukum dan etika penyaluran zakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan waktu itu dengan mengkategorikan dengan dua hal: a) Zakat merupakan bagian ibadah dan rukun Islam, secara doktrin terkait dengan nilai-nilai yang diangkat dari al-Quran dan sunnah sehingga orang muslim bertanggung jawab untuk mensosialisasikannya; b) Zakat disadari mempunyai dimensi sosial ekonomi umat sebagai instrument pemerataan rezeki untuk menanggulangi problem ekonomi umat Islam dan menjadi tumpuan menanggulangi kemiskinan.

Dari dua hal tersebut dapat diambil bahwa zakat adalah sebagai jalan pemerataan rezeki terhadap seseorang sebagaimana halnya pada masa kejayaan Islam Khalifah Umar memilih memerangi memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menolak untuk membayar zakat. Sebagaimana dalam suatu khutbahnya “ demi Allah saya akan berperang melawan mereka yang membedakan antara shalat dan zakat”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin (2006) *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Dalam..* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dirjen Bimas Islam, Depag RI (2009) *Fiqh Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat dan Wakaf Paradigma Baru*. Jakarta: Depag RI
- Ichsan, M Surjani dan Tim (2009) *Pedoman Aplikasi Untuk Kriteria Manajemen Zakat Unggul*. Jakarta: Forum Zakat
- Khan, Mumtaz Ali (2003) *Zakat dan Amal Harus Menjadi Alat Untuk Mengembangkan Masyarakat Miskin*. Diperoleh dari *islamicvoice*. Situs web.: <http://www.Islamicvoice.com>
- Qaradhawi, Yusuf (2005) *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul
- Pedoman Zakat seri ke 9, (2010) Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Surat Lukman Ayat 13-19

Subhan

STKIP Taman Siswa Bima
subhantanjung@gmail.com

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang selanjutnya di jadikan pedoman hidup (*way of life*) kaum muslim yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok (prinsip dasar) menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa dan kapanpun masanya dan hadir secara fungsional memecahkan problem kemanusiaan. Manusia dalam kenyataan hidupnya menunjukkan bahwa ia membutuhkan suatu proses belajar yang memungkinkan dirinya untuk menyatakan eksistensinya secara utuh dan seimbang. Manusia tidak dirancang oleh Allah SWT. untuk dapat hidup secara langsung tanpa proses belajar terlebih dahulu untuk memahami jati dirinya dan menjadi dirinya. Dalam proses belajar itu seseorang saling tergantung dengan orang lain. Proses belajar itu dimulai dengan orang terdekatnya. Proses belajar itulah yang kemudian menjadi basis pendidikan. Ketidakberhasilan tertanamnya nilai-nilai rohaniyah (keimanan dan ketaqwaan) terhadap peserta didik (murid) dewasa ini sangat terkait dengan dua faktor penting dalam proses pembelajaran di samping banyak faktor-faktor yang lain, kedua faktor tersebut adalah strategi pembelajaran serta orang yang menyampaikan pesan-pesan ilahiyah (guru). Dalam sistem pendidikan Islam seharusnya menggunakan metode pendekatan yang menyeluruh terhadap manusia, meliputi dimensi jasmani dan rohani (lahiriyah dan batiniyah), di samping itu keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat ditunjang oleh kepribadian setiap penyampai pesan (guru). Materi pendidikannya mencakup pendidikan Aqidah, pendidikan Syari'ah dan pendidikan Akhlak. Metode pengajarannya dengan mauidloh dan tanya jawab. Sifat pendidik mencakup bijaksana dan kasih sayang terhadap anak didik.

Kata Kunci: *Konsep Pendidikan, Al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang selanjutnya di jadikan pedoman hidup (*way of life*) kaum muslim yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok (prinsip dasar) menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa dan kapanpun masanya dan hadir secara fungsional memecahkan problem kemanusiaan (Zakiah Daradjat: 2002).

Petunjuk pendidikan dalam al-Qur'an tidak terhimpun dalam kesatuan pragmen tetapi ia diungkapkan dalam berbagai ayat dan surat al-Qur'an, sehingga untuk menjelaskannya perlu melalui tema-tema pembahasan yang relevan dan ayat-ayat yang memberikan informasi-informasi pendidikan yang dimaksud.

Petunjuk-petunjuknya bertujuan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia,

baik secara pribadi maupun kelompok, dan karena itu ditemukan petunjuk-petunjuk bagi manusia dalam kedua bentuk tersebut. Muhammad Rasulullah dipandang sukses dalam mendidik masyarakatnya menjadi masyarakat yang berbudi tinggi dan akhlak mulia. Pada mulanya masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, sehingga perkataan primitif tidak cukup untuk menggambarkannya, hingga datang Rasulullah yang membawa mereka untuk meninggalkan kejahiliahan tersebut dan mencapai suatu bangsa yang berbudaya dan berkepribadian yang tinggi, bermoral serta memberi bengetahuan.

Di lihat dari segi tanggung jawab, orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua, orang yang pertama kali dijumpai anak adalah orang tuanya, jadi secara tidak langsung ayah dan ibu adalah guru

pertama bagi anak, disadari atau tidak oleh orang tua itu sendiri (Achmad Djazuli: 2005).

Seharusnya disaat para orang tua menanti kelahiran anaknya bahkan jauh sebelum itu, di saat merencanakan sebuah pernikahan mereka sudah merancang bagai mana pola asuh dan metode apa yang akan digunakan untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya kelak. Ibarat seorang calon guru yang sedang kuliah mempelajari tentang seluk beluk menjadi seorang pendidik.

Kenyataan yang terlihat dikehidupan yang serba canggih dan serba materi ini, hal yang paling dikhawatirkan para orang tua bukan masalah pendidikan tapi masalah uang. Di saat anak lahir kedunia ini yang jadi pikirkan orang tua (kebanyakan), apakah nanti ada uang untuk beli susu anak, apakah nanti bisa membahagiakan anak dengan membelikan apa yang dimintanya.

Sementara dalam al-Qur'an sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan sangat penting, jika al-Qur'an dikaji lebih mendalam maka kita akan menemukan beberapa prinsip dasar pendidikan, yang selanjutnya bisa kita jadikan inspirasi untuk dikembangkan dalam rangka membangun pendidikan yang bermutu. Ada beberapa indikasi yang terdapat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan antara lain; Menghormati akal manusia, bimbingan ilmiah, fitrah manusia, penggunaan cerita (kisah).

Manusia dalam kenyataan hidupnya menunjukkan bahwa ia membutuhkan suatu proses belajar yang memungkinkan dirinya untuk menyatakan eksistensinya secara utuh dan seimbang. Manusia tidak dirancang oleh Allah SWT. untuk dapat hidup secara langsung tanpa proses belajar terlebih dahulu untuk memahami jati dirinya dan menjadi dirinya. Dalam proses belajar itu seseorang saling tergantung dengan orang lain. Proses belajar itu dimulai dengan orang terdekatnya. Proses belajar itulah yang kemudian menjadi basis pendidikan.

Aktivitas pendidikan terkait dengan perubahan yang secara moral bersifat lebih baik, ciri perubahan atau kemajuan secara fundamental adalah terjadinya perkembangan

internal diri manusia yaitu keimanan dan ketaqwaan, bukan hanya perubahan eksternal yang cenderung bersifat material yang dapat menghancurkan keimanan dan ketaqwaan manusia.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, produk pendidikan sering hanya diukur dari perubahan eksternal yaitu kemajuan fisik dan material yang dapat meningkatkan pemuasan kebutuhan manusia. Masalahnya adalah bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan sering bersifat tidak terbatas, bersifat subyektif yang sering justru dapat menghancurkan harkat kemanusiaan yang paling dalam yaitu kehidupan rohaninya. Produk pendidikan berubah menghasilkan manusia yang cerdas dan terampil untuk melakukan pekerjaannya, tetapi tidak memiliki kepedulian dan perasaan terhadap sesama manusia. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan menjadi instrumen kekuasaan dan kesombongan untuk memperdayai orang lain, kecerdikannya digunakan untuk menipu dan menindas orang lain, produk pendidikan berubah menghasilkan manusia yang serakah dan egois.

Ketidakberhasilan tertanamnya nilai-nilai rohaniyah (keimanan dan ketaqwaan) terhadap peserta didik (murid) dewasa ini sangat terkait dengan dua faktor penting dalam proses pembelajaran di samping banyak faktor-faktor yang lain, kedua faktor tersebut adalah strategi pembelajaran serta orang yang menyampaikan pesan-pesan ilahiyah (guru). Dalam sistem pendidikan Islam seharusnya menggunakan metode pendekatan yang menyeluruh terhadap manusia, meliputi dimensi jasmani dan rohani (lahiriyah dan batiniyah), di samping itu keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat ditunjang oleh kepribadian setiap penyampai pesan (guru).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai “Konsep Pendidikan Anak Menurut Konsep Al-Qur’an Surat Lukman Ayat 13-19.

Pengertian Pendidikan Islam

Dari berbagai literatur terdapat berbagai macam pengertian pendidikan Islam. Menurut Athiyah Al-Abrasy, pendidikan Islam adalah

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sehat jasmaninya, sempurna budi pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, profesional dalam bekerja dan manis tutur sapanya.

Sedang Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Sedangkan menurut Sayed Muhammad Naquib Al-Attas, pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia mengacu kepada metode dan sistem penamaan secara bertahap, dan kepada manusia penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut.

Dari definisi dan pengertian itu ada tiga unsur yang membentuk pendidikan yaitu adanya proses, kandungan, dan penerima. Kemudian disimpulkan lebih lanjut yaitu "sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia".

Jadi definisi pendidikan Islam adalah, pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia, tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian.

Dalam pandangan Al-Attas pendidikan Islam harus terlebih dahulu diberikan kepada manusia sebagai peserta didik, pendidikan tersebut berupa pengetahuan tentang manusia disusul dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dengan demikian dia akan tahu jati dirinya dengan benar, tahu "dari mana dia, sedang dimana dia, dan mau kemana dia kelak". Jika ia tahu jati dirinya, maka ia akan selalu ingat dan sadar serta mampu dalam memposisikan dirinya, baik terhadap sesama makhluk, dan yang terlebih lagi kepada Allah SWT. Ketiga realita yaitu, manusia, alam, dan Tuhan diakui keberadaannya, dengan Tuhan sebagai sumber dari segalanya (alam dan manusia).

Tuhan dapat dipahami sebagaimana diinformasikan dalam Al-Quran sebagai Rabb al-Alamin, dan Rabb al-Nass. Amrullah Ahmad menilai bahwa dalam definisi pendidikan Al-Attas mengandung proses pengajaran seseorang dalam tatanan kosmis dan sosial yang akan mengantarkannya untuk menemukan fungsinya sebagai kholifah.

Keluarga Dan Pendidikan Anak

Peran ayah muslim dalam kehidupan anaknya adalah hal yang paling penting. Al-Quran dan hadits menyebutkan ayah sebagai kepala keluarga, penanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan penguasa. Bahkan peran seorang ayah terlihat sangat jelas daripada peran ibu karena lebih banyak terlihat dalam aktifitas social dari pada wanita. Seperti yang telah kita lihat, Al-Quran menunjukkan beberapa contoh dari ayah yang menjadi Nabi, seperti Lukman menuntun anaknya dan melaksanakan fungsinya kebabakkannya dengan keadilannya, kebijaksanaan dan kebenaran

Berdasarkan tingginya status ibu dalam Islam, lebih tinggi dari ayah maka kita sangat mudah untuk memahami mengapa wanita muslimah menginginkan anak dan mengapa mereka bahagia tinggal di rumah dan suka memberi perhatian pada anak-anaknya. Seorang ibu bisa saja bekerja pada saat anak-anak berkembang. Namun demikian, ketika diperlukan, bisa saja ambil ibu angkat atau kerabat yang lain dapat menggantikan posisi ibu, dalam waktu sementara atau waktu yang lama. Dalam banyak kasus, usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menciptakan kehangatan, cinta, suasana yang penuh damai dengan segala masalah pribadi dan sifat yang terdapat dalam anggota keluarga, membutuhkan banyak hal. Tidak bisa dipungkiri, semua ini adalah jihad yang sesungguhnya bagi kaum wanita. Nabi saw bersabda : *"Setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan setiap kamu juga bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap mereka; suami adalah pemimpin keluarga dan bertanggung jawab pada keluarganya, wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab untuk itu; pelayan adalah pemimpin bagi kekayaan*

majikannya dan bertanggung jawab untuk itu.” (HR. Bukhari, 329).

Ketika wanita memenuhi perannya sebagai pengasuh dan pria sebagai pelindungnya, maka masyarakat akan menjadi baik; ketika wanita dan pria tidak menjalankan perannya, masyarakat akan jatuh. Dan masyarakat juga mengakui dan mendukung hal ini dengan menjadikan bantuan bagi orang tua dalam menjalankan perannya yang utama.

Metode Pendidikan Anak

Anak dilahirkan tidak dalam keadaan lengkap dan tidak pula dalam keadaan kosong. Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Memang ia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, akan tetapi anak telah dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan kata hati.

Dengan diberikannya penglihatan, pendengaran, dan kata hati tersebut, diharapkan orang tua harus mampu membimbing, mengarahkan, dan mendidiknya dengan ekstra hati-hati karena anak sebagai peniru yang ulung. Oleh karena itu semaksimal mungkin orang tua memberikan pelayanan terhadap anaknya. Pelayanan yang maksimal akan menghasilkan suatu harapan bagi bapak ibunya, tiada lain suatu kebahagiaan hasil jerih payahnya. Sebab anak adalah sumber kebahagiaan, kesenangan, dan sebagai harapan dimasa yang akan datang. Harapan-harapan orang tua akan terwujud, tatkala mereka mempersiapkan sedini mungkin pendidikan yang baik sebagai sarana pertumbuhan dan perkembangan bagi anak.

Memang diakui bahwa mengemudikan bahtera rumah tangga yang baik, yang sakinah, dan yang masalah merupakan tugas kewajiban yang sangat rumit, tidak kalah rumitnya dengan mengelola sebuah pabrik, dan tidak kalah canggihnya dengan mengemudikan pesawat terbang karena orang tua harus siap untuk memperpadukan sekian banyak unsur dan dimensi mulai dari dimensi sikap mental, ilmu pengetahuan, ketrampilan dan lain sebagainya. Sebagai kewajiban dari orang tua, dalam hal ini adalah pemegang amanat, maka barang siapa yang mampu menjaga amanat tersebut akan diberi pahala, dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan janji Allah SWT dalam firman, QS.al-Kahfi (18) : 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
(الكهف:46)

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi : 46).

Dalam mendidik anak, tentunya harus ada kesepakatan antara bapak ibu sebagai orang tua, akan dibawa kepada pendidikan yang otoriter atau pendidikan yang demokratis atau bahkan yang liberal, sebab mereka penentu pelaksana dalam keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat terkecil, yaitu keluarga, suami secara fungsional adalah penanggung jawab utama rumah tangga (keluarga) sedangkan istri adalah mitra setia yang aktif konstruktif mengelola rumah tangga. Operasionalisasi kehidupan berkeluarga sebaiknya dilakukan berdasarkan amar makruf nahi munkar.

Salah satu wujud amar makruf nahi munkar dalam kehidupan berkeluarga adalah memberikan pendidikan kepada putra putrinya berdasarkan ajaran Islam. Antara keluarga satu dengan keluarga lainnya mempunyai prinsip dan sistem sendiri-sendiri dalam mendidik anaknya. Namun orang tua jangan terbuai atau melupakan terhadap ajaran-ajaran Islam, terutama dalam hal pendidikan anak sebagaimana yang telah dicontohkan Rasul saw. sebagai pembawa panji-panji Islam, Rasul SAW tidak pernah mendidik putra-putrinya dengan pendidikan keras dan tidak dengan membebaskan anak-anaknya, tetapi beliau dalam mendidik keluarganya terutama kepada anak-anaknya adalah dengan limpahan kasih sayang yang amat besar. Senada dengan yang dikatakan oleh sahabat Anas ra. yaitu “aku tidak mendapatkan seseorang yang kasih sayangnya pada keluarganya melebihi Rasulullah SAW.”

Seorang muslim sepatutnya mencontoh teladan yang telah diberikan Rasul SAW, dalam memuliakan putra putrinya. Beliau dalam mendidik anak-anaknya melalui ajaran wahyu Ilahi yaitu dengan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Dengan pemberian kasih sayang tersebut, diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebab

anak merupakan aset masa depan. Sebagai orang tua dapat meneladani ajaran-ajaran Rasul SAW tersebut, melalui para pemikir dan pemerhati pendidikan (anak) dalam Islam. Salah satu pemerhati pendidikan (anak) dalam Islam yang memberikan gambaran yang benar sesuai dengan ajaran Islam adalah Ulwan. Ia memberikan pandangannya dalam mendidik anak dalam keluarga melalui metode-metode yang harus diterapkan dalam pendidikan anak termasuk dalam hal pendidikan moral. Apabila metode-metode tersebut diterapkan, niscaya apa yang menjadi harapan bersama sebagai muslimin yaitu tumbuhnya para generasi Islam yang tangguh dan sebagai penebar kebenaran, dapat direalisasikan.

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pelaksanaan pendidikan (moral) maka harus memenuhi beberapa faktor-faktornya. Salah satu faktornya adalah metode. Metode merupakan sarana untuk menyampaikan isi atau materi pendidikan tersebut, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan hasil yang baik.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka pengumpulan datanya merupakan telaah atau kajian pustaka yang berupa data verbal atau sekunder dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk angka.

Sumber data

Data primer yaitu sumber data asli dari permasalahan yang akan diteliti. Yang termasuk sumber data primer adalah buku-buku mengenai konsep pendidikan anak menurut konsep al-Qur'an surat Lukman ayat 13-19 yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder yaitu sumber data dari buku-buku karangan seseorang (buku data asli) tentang permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku-buku dan artikel-artikel majalah yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang relevan dan menunjang penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis,

sedangkan dalam pembahasannya menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif.

Metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat atau bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus dirangkaian menjadi pemecahan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN

Biografi Luqman

Biografi Lukmanul Hakim Dalam buku berjudul "Lukmanul Hakim, kepribadian dan Mutiara Hikmahnya" Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan bin Umar Al-Athas menuliskan tentang asal-usul Luqmanul Hakim dari berbagai versi yang mana satu sama lain berbeda pendapat tentang asal-usul Luqmanul Hakim. Ibnu Ishak berpendapat bahwa Luqmanul Hakim adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tariha sedangkan Tariha adalah Azar, ayah Ibrahim as. Assuhaailybahawa Luqmanul Hakim adalah putra Unga bin Sarun dari penduduk Aylah Palestina. Wahab mempunyai pendapat lain, bahwa Luqmanul Hakim itu putra saudari Ayyub as. Tetapi menurut pendapat yang dinukil dari Muqotil beliau adalah putra Ayyub as. Konon Luqmanul Hakim hidup selama seribu tahun semasa dengan Dawud as. Sebelum Dawud as di utus Lukmanul Hakim memberi fatwa kepada manusia, namun setelah Dawud as diutus, beliau tidak lagi memberikan fatwa. Waqidi berpendapat bahwa Luqmanul Hakim itu adalah sebagai Qadhi (hakim) di kalangan Bani Israil. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Lukmanul Hakim itu hamba sahaya (budak) dari negeri Habsyi (Ethiopia). Ibnu Abil Qosim meriwayatkan dari Abdullah bin Az-zubair, katanya: "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah, apa yang engkau ketahui tentang Lukman?. ia menjawab "Beliau adalah orang yang berbadan pendek, berhidung pesek dari negeri Negro". Luqmanul hakim bekerja sebagai tukang jahit. Ada yang berpendapat beliau adalah tukang kayu. Dan ada juga yang

berpendapat bahwa Luqman itu adalah sebagai pengembala kambing.

Sebagian para ahli berpendapat bahwa “Luqmanul Hakim itu seorang yang arif budiman, bukan seorang nabi. Imam An-Nawawi dalam kitab al-Adzar menulis, bahwa Luqman dan Maryam bukanlah nabi. Sebenarnya kedua-duanya itu adalah tergolong sebagai Shiddiqin”.

Konon beliau disuruh memilih antara kenabian dan hikmah lantas beliau memilih hikmah. Diriwayatkan bahwa Jibril as ketika menyuruh Luqmanul Hakim untuk memilih antara kenabian dan hikmah, maka beliau memilih hikmah. Seraya Jibril mengusap dada Luqman Hakim dengan sayapnya, lalu Luqman Hakim berbicara dengan mutiara hikmah "Ketika Jibril berpamitan ia berbicara kepada Luqmanul Hakim" Aku berwasiat kepadamu dengan wasiat, maka jagalah wasiatku ini, wahai Lukman : Sekiranya engkau masukan tanganmu sampai sakumu kedalam mulut ular besar, maka hal itu lebih baik bagimu daripada engkau meminta-minta seperti seorang fakir yang merasa kaya. Luqman mempunyai putra bernama Taran sebagaimana dikemukakan oleh Ath-Thabari, juga ada yang mengatakan Tsaran atau Anum atau Masykum. “Ada yang mengatakan bahawa putra Luqman itu seorang kafir yang musyirik. Oleh karena itu Luqman selalu tak henti-henti memberi nasihat sehingga ia memeluk agama Islam”.

Perbedaan Ucapan Luqman Dengan Firman Allah

Secara tekstual ayat-ayat ini memang berbicara secara khusus tentang pesan Luqman dalam konteks mendidik anak sesuai dengan pesan al-Qur'an. Apalagi pesan Luqman dalam surat ini sebenarnya adalah pesan Allah yang dibahasakan melalui lisan Luqman Al-Hakim sehingga sifatnya mutlak dan mengikat ; pesan Luqman dalam bentuk perintah berarti perintah Allah, demikian juga nasehatnya dalam bentuk larangan pada masa yang sama adalah juga larangan Allah yang harus dihindari.

Nasehat Luqman

Satu-satunya manusia yang bukan nabi pada jamannya, bukan pula Rasul tapi kisah hidupnya

diabadikan dalam al-Qur'an adalah Luqman Al Hakim. Kenapa, tak lain, karena hidupnya penuh hikmah. Suatu hari ia pernah menasehati anaknya tentang hidup.

- 1) Wahai anakku! Elakkan dirimu dari berhutang kerana sesungguhnya dengan berhutang itu akan menjadikan dirimu hina diwaktu siang hari dan menjadikan dirimu gelisah di waktu malam hari.
- 2) Wahai anakku! Sekiranya kedua ibu bapamu memarahimu kerana sesuatu kesalahan yang telah kamu lakukan maka kemarahan kedua mereka itu adalah seperti baja untuk menyuburkan tanaman.
- 3) Wahai anakku! Engkau akan dapat rasakan betapa beratnya ketika mengangkat batu yang besar atau besi yang padat tetapi ada yang lebih berat dari itu iaitu apabila kamu mempunyai jiran tetangga yang jahat.
- 4) Wahai anakku! Tidaklah dinamakan kebaikan sekalipun kamu sibuk mencari dan mengumpul ilmu pengetahuan tetapi tidak pernah mengamalkannya. Perbuatan ini tak ubah seperti seorang pencari kayu api yang sentiasa menambah timbunan kayunya sedangkan ia tidak mampu untuk mengangkatnya.
- 5) Wahai anakku! Berhati-hatilah terhadap tutur tata dan bicaramu, peliharalah budi bahasamu dan sentiasalah bermanis muka nescaya kamu akan disenangi dan disukai oleh orang yang berada di sekelilingmu. Perumpamaannya seolah mereka telah mendapat barang yang amat berharga darimu.
- 6) Wahai anakku! Jika kamu mahu mencari sahabat sejati maka kamu ujilah ia terlebih dahulu dengan berpura-pura membuatkan ia marah terhadapmu. Sekiranya dalam kemarahan itu ia masih mahu menasihati, menyedarkan dan menginsafkan kamu, maka dialah sahabat yang dicari. Jika berlaku sebaliknya maka berwaspadalah kamu terhadapnya.
- 7) Wahai anakku! Bila kamu mempunyai teman yang karib maka jadikanlah dirimu sebagai seorang yang tidak mengharap sesuatu apapun darinya sebaliknya biarkanlah

temanmu itu sahaja yang mengharapkan sesuatu darimu.

- 8) Wahai anakku! Jagalah dirimu selalu supaya tidak terlalu condong kepada dunia dan segala kesenangan dan kemewahannya kerana Allah tidak menciptakan kamu hanya untuk kehidupan di dunia sahaja. Ketahuilah tidak ada makhluk yang lebih hina selain dari mereka yang telah diperdayakan oleh dunia.
- 9) Wahai anakku! Janganlah kamu ketawa jika tiada sesuatu yang menggelikan, janganlah kamu berjalan jika tiada arah hala tujuan, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang tidak memberi apa-apa faedah pun kepadamu dan janganlah kamu mengsiakan hartamu pada jalan maksiat.
- 10) Wahai anakku! Siapa yang bersifat penyayang sudah tentu dia akan disayang, siapa yang bersifat pendiam sudah tentu dia akan selamat dari mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Ketahuilah sesiapa yang tidak dapat menahan lidahnya dari mengeluarkan ucapan kotor, sudah tentu ia akan menyesal kelak.
- 11) Wahai anakku! Bergaul dan berkawanlah dengan orang-orang yang soleh dan berilmu. Bukalah pintu hatimu dan dengarlah segala nasihat dan tunjuk ajar darinya. Sesungguhnya nasihat dari mereka bagaikan mutiara hikmah yang bercahaya yang dapat menyuburkan hatimu seperti tanah kering lalu disirami air hujan.
- 12) Wahai anakku! Sesungguhnya kehidupan kita ini diibaratkan seperti sebuah kapal yang belayar di lautan dalam dan telah banyak manusia yang karam didalamnya. Jika kita ingin selamat maka belayarlh dengan kapal yang bernama takwa, isi kandungannya ialah iman sedang layarnya pula ialah tawakal kepada Allah.
- 13) Wahai anakku! Bila kamu menerima dua undangan majlis, satu majlis perkahwinan dan satu lagi majlis takziah kematian, maka utamakanlah majlis kematian kerana dengan menghadiri majlis ini akan mengingatkan kamu kepada kampung akhirat, sedangkan dengan menghadiri majlis perkahwinan akan mengingatkan kamu kepada keseronokkan dunia sahaja.
- 14) Wahai anakku! Janganlah kamu terus menelan apa saja yang kamu rasa manis dan meludah setiap apa yang kamu rasa pahit. Ingatlah, tidak semua yang manis itu akan menjadikan kita segar dan tidak semua yang pahit itu akan menjadikan kita segar.
- 15) Wahai anakku! Janganlah kamu makan dengan terlalu kenyang yang berlebihan. Sesungguhnya adalah lebih baik jika bahagian dari yang kenyang itu diberikan kepada anjing sahaja.
- 16) Anakku, jika makanan telah memenuhi perutmu, maka akan matilah pikiran dan kebijaksanaanmu. Semua anggota badanmu akan malas untuk melakukan ibadah, dan hilang pulalah ketulusan dan kebersihan hati. Padahal hanya dengan hati bersih manusia bisa menikmati lezatnya berdzikir.
- 17) Anakku, kalau sejak kecil engkau rajin belajar dan menuntut ilmu. Dewasa kelak engkau akan memetik buahnya dan menikmatinya.
- 18) Wahai anakku! Carilah harta di dunia ini sekadar keperluanmu sahaja dan nafkahkanlah hartamu yang selebihnya pada jalan Allah sebagai bekalmu di akhirat. Janganlah kamu membuat dunia ini tujuan, kelak dirimu akan menjadi pengemis dan membebankan pula orang lain tetapi jangan pula kamu terlalu mengejar dunia sehingga terlupa bahawa kamu akan mati. Ketahuilah, apa yang kamu makan dan pakai itu semuanya dari tanah belaka.
- 19) Wahai anakku! Jangan kamu melantik seseorang yang bodoh menjadi utusanmu. Jika tiada siapa yang lebih cerdas, pintar dan bijak maka yang sebaiknya dirimu sendirilah yang menjadi utusan.
- 20) Wahai anakku! Orang yang bersedia untuk mendengar nasihat dan bimbingan dari orang yang lebih alim, maka dia layak untuk mendapat penjagaan dari Allah tetapi bagi orang yang insaf dan sadar setelah menerima teguran maka dia lebih layak untuk mendapat kemuliaan dari Allah.

- 21) Anakku, aku sudah pernah memikul batu-batu besar, aku juga sudah mengangkat besi-besi berat. Tapi tidak pernah kurasakan sesuatu yang lebih berat daripada tangan yang buruk perangnya.
- 22) Anakku, aku sudah merasakan semua benda yang pahit. Tapi tidak pernah kurasakan yang lebih pahit dari kemiskinan dan kehinaan
- 23) Anakku, aku sudah mengalami penderitaan dan bermacam kesusahan. Tetapi aku belum pernah merasakan penderitaan yang lebih susah daripada menanggung hutang.
- 24) Anakku, sepanjang hidupku aku berpegang pada delapan wasiat para nabi. Kalimat itu adalah:
 - (a) Jika kau beribadah pada Allah, jagalah pikiranmu baik-baik.
 - (b) Jika kau berada di rumah orang lain, maka jagalah pandanganmu
 - (c) Jika kau berada di tengah-tengah majelis, jagalah lidahmu
 - (d) Jika kau hadir dalam jamuan makan, jagalah perngaimu
 - (e) Ingatlah Allah selalu
 - (f) Ingatlah maut yang akan menjemputmu
 - (g) Lupakan budi baik yang kau kerjakan pada orang lain
 - (h) Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu

Klasifikasi Nasihat Luqman Berdasarkan Ajaran Islam

1. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya (Tsaran) dan ia menasehatinya : Hai anaku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar," (Qs-Luqman (31 : 13)
2. Hai anaku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau berada di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membawanya) sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." (Qs-Luqman (31) : 16)
3. Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) me-ngerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (Allah)." (Qs-Luqman: 17)
4. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (Qs-Luqman: 18)
5. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. (Qs-Luqman: 19)

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini perlu kiranya penulis menarik beberapa kesimpulan yang di perlukan. Adapun kesimpulan yang perlu penulis sam paikan adalah sebagai berikut : bahwa metode pendidikan anak yang terkandung dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 - 19 adalah: 1) Materi pendidikannya mencakup pendidikan Aqidah, pendidikan Syari'ah dan pendidikan Akhlak; 2) Metode pengajarannya dengan mauidloh dan tanya jawab; 3) Sifat pendidik mencakup bijaksana dan kasih sayang terhadap anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Laila binti. 2008. *Cara Islami Sukses Mendidik Buah Hati*. Klaten: Inas Media.
- Achmad Djazuli, *Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar*, (Jakarta : Pen. Bag. Proy. Peningkatan Wawasan Pendidikan Guru Agama, 2005)
- Ahmad D. Marimba, *Seminar Pendidikan Agama Islam se Indonesia* (Bogor: Cipayung, Tanggal 7-11 Mei 1960)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Latif, Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul. 1998. *Pelajaran Tauhid untuk Lanjutan*. Jakarata: as-Sofwa

- Niron, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 2, 1996.
- Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Al-Maarif, Bandung 1980
- Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Hamdani Bakran Adz-Dzakiey Kecerdasan Kenabian, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Al-Furqan, (2006)
- Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI,
<http://iklanbaris.kilu.de/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses tgl 28 Mei
- <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/> diakses tgl 28 Mei
- <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>
- <http://www.generasimuslim.com/mutiara-hikmah/244-info-pendidikan-anak> diakses tgl 21 Mei
- <http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/ilmu-pendidikan-islam-f17/pengertian-pendidikan-islam136.htm> diakses tgl 14 Mei
- Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Genta Press, 1996),
- Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Muhammad ‘Ali Quthb, Auladuna fi-Dlaw-it Tarbiyyatil Islamiyah, Terj. Bahrun Abu Bakar Ihsan, “Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam”, Bandung : Diponegoro, Cetakan II, 1993
- Muhibbin Syah M.Ed Psikologi Pendidikan (Penerbit PT Remaja Rosda Karia Bandung cet, ke XI September 2005)
- Tarazi Norma Wahai Ibu Kenali Anakmu, (Mitra Pustaka, Jakarta 1998)
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),